

**KAJIAN OPTIMASI POLA DAN TINGKAT PELAYANAN
SARANA DASAR
DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK - SUBANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

RATNA ISWARI UTORO
L4D 004 127



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**KAJIAN OPTIMASI POLA DAN TINGKAT PELAYANAN
SARANA DASAR DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK –
SUBANG**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

RATNA ISWARI UTORO
L4D004127

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 25 Maret 2006

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 29 Maret 2006

Pembimbing Utama

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. Sumarsono, MS Dra. Bitta Pigawati, MT Ir. Holi Bina Wijaya, MUM

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/ Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, 29 Maret 2006

RATNA ISWARI UTORO
NIM L4D004127

Blue skies smiling on me
Nothing but blue skies do I see
Blue bird singing a song
Nothing but blue skies from now
on
I never saw the sun shining so
bright
Watching all the days Hurrying by
Those blue days, all of them gone
Nothing but blue skies from now
on

Ku persembahkan tesis ini untuk
My be loved ibu dan bapak all you've done with
all your heart to support me was my strength to
get trough this episode of my life.

Kisses **Suri** 

KAJIAN OPTIMASI POLA DAN TINGKAT PELAYANAN SARANA DASAR KOTA KECAMATAN JALANCAGAK-SUBANG

Oleh: Ratna Iswari Utoro

ABSTRAK

Pembangunan desa melalui pendekatan kebutuhan dasar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat pedesaan seperti penyediaan kesehatan dan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa adalah tingkat pelayanan sarana dasar meliputi sarana kesehatan dan pendidikan dikhawatirkan berfungsi tidak optimal sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini ingin mengetahui: 'Bagaimana pola dan tingkat pelayanan sarana dasar dan optimalisasinya di Kota Kecamatan Jalancagak. Tujuannya adalah mendapatkan optimalisasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar Kota Kecamatan Jalancagak.

Untuk menjawab Research Question maka dilakukan Analisis Optimalisasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar yang terdiri dari: (1) Analisis Pola Wilayah dengan menggunakan metoda Nearest Neighbour Statistic ,untuk mendapatkan pola desa dalam kesatuan wilayah (2) Analisis Pola Pelayanan Sarana Dasardengan menggunakan metode Next Oppurtunity Matrix untuk mendapatkan jangkauan pelayanan sarana (3) Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Dasar menggunakan standar peraturan PU 1987, dan Deskriptive Statistic untuk mendapatkan frekuensi tingkat ketidak puasan masyarakat dan perilaku masyarakat terhadap sarana pelayanan yang ada dan (4) Analisis Optimalisasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar dengan menggunakan metode skoring dan pendekatan prinsip Neighborhood Unit sebagai perencanaan optimalisasi, sebagai penyeimbang penelitian ini maka Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah digunakan sebagai masukan analisis ini.

Hasil temuan yang diperoleh adalah pola sebaran fasilitas pelayanan dasar di kota Kecamatan Jalancagak adalah berkelompok dan membentuk pusat pelayanan di Desa Jalancagak dan memiliki kemudahan aksesibilitas. Kondisi Ini sesuai dengan teori Sujarto (1977) dan Daniels (1988), Walter Christaller dalam Daldjoeni (2004), bahwa distribusi fasilitas lokasi terdapat pada kedudukan pusat pelayanan dan dipengaruhi faktor kepadatan penduduk dan lingkungan. Tingkat pelayanan sarana dasar khususnya pada desa-desa masih kurang optimal diakibatkan ambang batas minimum kesehatan belum tercapai dilayani dan terdapat tingkat pelayanan yang melebihi kapasitasnya yaitu fasilitas sarana pendidikan. Kondisi ini belum sesuai dengan teori Devas and Rakodi (1993) dan Dillinger (1994) yang menyatakan ukuran optimal tingkat pelayanan diukur dari sisi supply-demand, daya layan, standar dan pola pelayanan saat ini.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Kota Kecamatan Jalancagak merupakan wilayah Kota Kecamatan Jagak memiliki pola desa yang berkelompok dengan nilai continuum $T < 1$, hal ini juga berkaitan dengan keadaan kondisi wilayah yang homogen. Kondisi geografis mengakibatkan pelayanan sarana dasar terkonsentris pada satu pusat pelayanan yang berada di desa Jalancagak. Sehingga jarak jangkau minimum yang ada di desa pada wilayah studi, dari pemukiman (pusat desa) menuju ke pusat pelayanan sarana dasar memakan waktu tempuh selama 2 km dengan berjalan kaki. Untuk mengoptimisasi tingkat pelayanan pada desa yang kurang optimal maka perencanaan dilakukan melalui pendekatan prinsip neighborhood unit yaitu prinsip social governance dan prinsip sharing system agar tingkat pelayanan yang kurang optimal dapat saling bekerjasama kepada pelayanan sarana dasar desa yang cukup otimal. Untuk mendukung penelitian ini, maka direkomendasikan untuk melakukan perencanaan berdasarkan prinsip dan syarat Neighborhood Unit, karena berdasarkan temuan di lapangan, prinsip ini dapat mengembangkan potensi yang ada di wilayah desa dengan dukungan sarana dasar yang ada sehingga optimalisasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar dapat tercapai sesuai kebutuhan basic needs dan pelayanan sarana yang ada di Kota Kecamatan Jalancagak.

Kata kunci: Optimasi, Pola, dan Tingkat pelayanan.

OPTIMIZING OF BASIC SERVICES PATTERN STUDIES AT KOTA KECAMATAN JALANCAGAK-SUBANG

Ratna Iswari Utoro

ABSTRACT

The rural development through basic needs approach is intended to fulfill its community needs such as the availability of health and education facilities. The problem is the level of basic facility services, which cover health and education facilities, is not functioned optimally so that the community doesn't get their needs. This thesis is proposed to research the form and basic services at Kota Kecamatan Jalancagak. The aims are to get the optimizing form and basic services at Kota Kecamatan Jalancagak.

The methods used to analyze the optimizing form and basic services at kota kecamatan Jalancagak are (1) Nearest Neighbor Statistic used to identify the village form in whole district, (2) Next Opportunity Matrix used to identify the district scope of its services, (3) Level of basic facility services analysis that use 1987 PU standard regulations and descriptive statistic used to identify community behavior and satisfaction value for their current facility services, (4) optimal form and level of basic facility services analysis which use scoring method and Neighborhood Unit approach to design it. District development policy is used as research input for this thesis

The analysis shows that the spreading pattern of basic facility services at Kota Kecamatan Jalancagak forms concentric pattern and centered at Desa Jalancagak which has the easiest accessibility. Sujarto's theory (1977), Daniels (1988), Walter Christaller on Daldjoeni (2004) say that distribution of facility location is located at center and is influenced by its environment and community population. The level of basic facility services at rural area is not optimal which is caused by lack of health facilities and on the other hand the educational facilities exceeds its community needs. This is the opposite condition with Devas and Rakodi's theory (1993) and Dillinger (1994) that state the measurement for optimal level of services can be measured from supply and demand, services, standards, and current services forms.

According to analysis, Kota Kecamatan Jalancagak is a district with concentric rural pattern, which has value of continuum $T < 1$. This is connected with this area condition as a homogeneous agriculture area. This geographic condition make basic services are located at one service center at Jalancagak, therefore the minimum distant at study area from the settlement to center of basic facility services is 2 km. Neighborhood Unit that is social governance and sharing system can be used to design the optimizing of basic services through its principle that is collaboration between the minimal facility services and the optimal services at this area. To support this thesis, it is recommended to do research based on Neighborhood Unit principles and conditions, because these principles can develop the area potencies. Thus the optimizing form and level of basic services needed at Kota Kecamatan Jalancagak can be achieved.

Key word: Optimizing, Form and Basic Services.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah

Atas segala rahmat, kasih sayang dan bimbingan-Nya penulis dapat menyusun tesis ini dengan penuh rasa syukur.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus pada banyak pihak yang atas ijin Nya telah membantu penulis :

- **Dr. Ir. Sumarsono, MS**, (pembimbing utama) **Dra. Bitta Pigawati, MT** (menntor) dan **Ir. Holi Bina Wijaya, MUM** (co-mentor) yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan pengertian terhadap segala kondisi dan keterbatasan yang dialami dan dimiliki penulis, sejak awal hingga saat ini.
- **Ir. Nany Yuliasuti, MSP** (penguji I) dan **Ir. Mardwi Rahdriawan, MT** (penguji II), yang telah memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan tesis ini.
- Kepada yang *Tercinta* ayahanda **Utoro** dan ibunda **Tekni** terimakasih atas doanya dan support yang selalu mengiringi kehidupan penulis.
- Rekan-rekan MPWK 2004 atas kebersamaan dan masukan serta saran pada penulis, selama menyusun tesis ini.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan dan bantuan yang tulus yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Amin

Semarang, 29 Maret 2006

Ratna Iswari Utoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Sasaran	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Sasaran	5
1.4 Ruang Lingkup Studi	5
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	6
1.4.2 Ruang Lingkup Substansial	6
1.5 Kerangka Pemikiran.....	8
1.6 Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian	11
1.6.1 Pendekatan Penelitian	11
1.6.2 Metoda Penelitian	15
1.6.2.1 Kebutuhan Data.....	17
1.6.2.2 Pengumpulan Data	19
1.6.2.3 Teknik Penentuan Responden	19
1.6.3 Teknik Analisis	23
1.6.3.1 Analisis Kuantitatif	24
1.6.3.2 Analisis Kualitatif	27
BAB II KAJIAN LITERATUR OPTIMASI POLA DAN TINGKAT PELAYANAN SARANA DASAR	29
2.1 Karakteristik Wilayah	29
2.2 Kategori Pola Desa.....	31
2.2.1 Persebaran Desa dan Ciri-Ciri Desa.....	33
2.2.2 Tipologi Desa.....	34
2.2.3 Hirarki Desa	35
2.2.4 Struktur dan Pola Tata Ruang Desa	37

	2.2.5 Sosiologi Masyarakat Desa	39
2.3	Tingkat Pelayanan Sarana Dasar.....	40
2.4	Teknik Optimal	44
	2.4.1 Kriteria –kriteria Optimalisasi Fasilitas.....	45
	2.4.2 Konsep Ruang Neighborhood Unit.....	46
2.5	Rangkuman Kajian Teori	48
2.6	Variabel Penelitian	51
BAB III KONDISI UMUM PELAYANAN SARANA DASAR KOTA KECAMATAN JALANCAGAK-SUBANG.....		53
3.1	Tinjauan Internal Wilayah Penelitian Kota Kecamatan Jalancagak	53
	3.1.1 Kondisi Perwilayahan Kecamatan Jalancagak.....	53
	3.1.2 Wilayah Administratif.....	54
	3.1.3 Wilayah Homogen	60
	3.1.4 Kondisi Geografis	60
	3.1.5 Penggunaan Lahan.....	61
	3.1.5 Karakteristik Sosial.....	62
	3.1.6 Aspek Transportasi.....	67
	3.1.7 Aspek Sarana dan Prasarana	68
3.2	Arah Kebijakan Pembangunan.....	70
3.3	Karakteristik Pelayanan di Wilayah Studi	71
3.4	Rangkuman	72
BAB IV ANALISIS OPTIMASI POLA DAN TINGKAT PELAYANAN SARANA DASAR KOTA KECAMATAN JALANCAGAK.....		73
4.1	Analisis Pola Wilayah	73
	4.1.1 Perwilayahan Kecamatan Jalancagak	73
	4.1.2 Pola Perwilayahan Desa	76
	4.1.3 Bentuk Desa	77
4.2	Analisis Pola Pelayanan Sarana Dasar	83
	4.2.1 Jaringan Transportasi	83
	4.2.2 Persebaran Fasilitas Sosial	86
	4.2.3 Jangkauan Pelayanan	89
4.3	Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Dasar.....	96
	4.3.1 Perilaku Masyarakat.....	96
	4.3.2 Kapasitas Pelayanan.....	98
4.4	Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	103
	4.4.1 Kebijakan Publik Penyediaan Sarana Sosial Dasar di Kota Kecamatan Jalancagak	103
	4.4.2 Arahan Kebijakan Pengembangan	104
4.5	Analisis Optimalisasi Pola dan Tingkat Pelayanan	111
	4.5.1 Pembobotan Sarana Dasar.....	111
	4.5.2 Perencanaan.....	121
4.6	Hasil Temuan Penelitian	128
	4.6.1 Temuan Perwilayahan di Kota Kecamatan Jalancagak ..	128

4.6.2	Temuan Pola Pelayanan Sarana Dasar	129
4.6.3	Temuan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar.....	130
4.6.4	Temuan Optimasi Pelayanan Sarana Dasar	131
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	133
5.1	Kesimpulan	133
5.2	Rekomendasi	136
DAFTAR PUSTAKA		142

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Kebutuhan Data Penelitian.....	18
Tabel I.2	: Jumlah Sample Penelitian	23
Tabel II.1	: Standar Fasilitas Sosial	46
Tabel II.2	: Rangkuman Kajian Teori Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar	48
Tabel II.3	: Variabel Penelitian	52
Tabel III.1	: Fungsi Bagian Wilayah Kota Jalancagak.....	58
Tabel III.2	: Kelengkapan Komponen Desa Berdasarkan Hirarki Di Kecamatan Jalancagak 2004	58
Tabel III.3	: Hirarki Desa Di Kota Kecamatan Jalancagak	59
Tabel III.4	: Kemiringan Lereng Kecamatan Jalancagak.....	61
Tabel III.5	: Jenis Penggunaan Lahan di Kota Kecamatan Jalancagak Tahun 2004	62
Tabel III.6	: Kepadatan Penduduk Per Desa di Kota Kecamatan Jalancagak Tahun 2004.....	63
Tabel III.7	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Kecamatan Jalancagak Tahun 2004.....	64
Tabel III.8	: Persentase Pertumbuhan Penduduk Di Kota Kecamatan Jalancagak Tahun 2000 – 2004	64
Tabel III.9	: Angka Ketergantungan Menurut Kelompok Umur Produktif Di Kota Kecamatan Jalancagak Tahun 2004	65
Tabel III.10	: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2004.....	66
Tabel III.11	: Jumlah Penduduk Menurut Struktur Mata Pencaharian Tahun 2004	67
Tabel III.12	: Jumlah Sarana Pendidikan Tahun 2004	69
Tabel III.13	: Jumlah Tempat Pelayanan Sarana Kesehatan Tahun 2004.	69
Tabel III.14	: Jumlah Sarana Perekonomian Tahun 2004.....	70
Tabel III.15	: Pembagian BWK Kecamatan Jalancagak Dan Fungsi.....	71
Tabel IV.1	: Matriks Jangkauan Pelayanan (Km) Kota Kecamatan Jalancagak	90
Tabel IV.2	: Jangkauan Pelayanan Fasilitas Sarana Kesehatan Di Kota Kecamatan Jalancagak 2004	94
Tabel IV.3	: Jangkauan Pelayanan Fasilitas Sarana Pendidikan Di Kota Kecamatan Jalancagak 2004	95
Tabel IV.4	: Tingkat Ketidak Puasan Pelayanan Sarana Dasar	97
Tabel IV.5	: Transportasi Responden ke Pelayanan Sarana Dasar.....	98
Tabel IV.6	: Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan Di Kota Kecamatan Jalancagak Tahun 2004.....	100
Tabel IV.7	: Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan Di Kota Kecamatan Jalancagak Tahun 2004.....	102

Tabel IV.8	: Jumlah Fasilitas Sosial Standar, Eksisting dan Kebijakan RDTR (Desa Jalancagak).....	106
Tabel IV.9	: Jumlah Fasilitas Sosial Standar, Eksisting dan Kebijakan RDTR (Desa Bunihayu).....	107
Tabel IV.10	: Jumlah Fasilitas Sosial Standar, Eksisting dan kebijakan RDTR (Desa Sarireja).....	108
Tabel IV.11	: Jumlah Fasilitas Sosial Standar, Eksisting dan kebijakan RDTR (Desa Tambak)	109
Tabel IV.12	: Jumlah Fasilitas Sosial Standar, Eksisting dan kebijakan RDTR (Desa Tambakan)	111
Tabel IV.13	: Kategori Pembobotan Sarana Kesehatan Kota Kecamatan Jalancagak	112
Tabel IV.14	: Kategori Pembobotan Sarana Pendidikan Kota Kecamatan Jalancagak	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Peta Orientasi Kota Kecamatan Jalancagak.....	7
Gambar 1.2	: Kerangka Pikir Pola Dan Optimasi Tingkat Pelayanan Sarana Dasar Kota Kecamatan Jalancagak - Subang.....	10
Gambar 1.3	: Kerangka Analisis Optimasi Pola dan Tingkat pelayanan Sarana Dasar Kota Kecamatan Jalancagak	16
Gambar 1.4	: Penentuan Sampel Populasi Sasaran.....	22
Gambar 1.5	: Continuum Nilai Nearest Neighbour Statistic T.....	26
Gambar 2.1	: Bentuk-Bentuk Umum Desa	34
Gambar 2.2	: Bentuk Pola Desa Tersebar	35
Gambar 2.3	: Diagram Tata Ruang Pedesaan Konsentrik.....	39
Gambar 2.4	: Pola Pemukiman Pedesaan.....	39
Gambar 3.1	: Orientasi Kabupaten Subang.....	56
Gambar 3.2	: Orientasi Kecamatan Jalancagak.....	57
Gambar 4.1	: Wilayah Homogenitas Kota Kecamatan Jalancagak 2004..	75
Gambar 4.2	: Bentuk Desa Linier Di Desa Tambakan.....	78
Gambar 4.3	: Bentuk Desa Terpusat Di Desa Sarireja.....	79
Gambar 4.4	: Bentuk Desa Tersebar Di Desa Jalancagak.....	80
Gambar 4.5	: Bentuk Desa Tersebar Di Desa Curugrendeng	81
Gambar 4.6	: Bentuk Desa Tersebar Di Desa Bunihayu.....	82
Gambar 4.7	: Persebaran Fasilitas Sarana Kesehatan Kota Kecamatan Jalancagak 2004	87
Gambar 4.8	: Persebaran Fasilitas Sarana Pendidikan Kota Kecamatan Jalancagak 2004	88
Gambar 4.9	: Jangkauan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kota Kecamatan Jalancagak 2006	91
Gambar 4.10	: Jangkauan Pelayanan Fasilitas Pendidikan Kota Kecamatan Jalancagak 2006	92
Gambar 4.11	: Grafik Tingkat Pelayanan Fasilitas Sarana Kesehatan Di Kota Kecamatan Jalancagak 2004	99
Gambar 4.12	: Grafik Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan di Kota Kecamatan Jalancagak 2004	101
Gambar 4.13	: Analisis Optimasi Tingkat Pelayanan Kesehatan di Kota Kecamatan Jalancagak	122
Gambar 4.14	: Analisis Optimasi Tingkat Pelayanan Pendidikan di Kota Kecamatan Jalancagak	127

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A : Jumlah responden kota Kecamatan Jalancagak	142
LAMPIRAN B : Kuisisioner	144
LAMPIRAN C : Pengolahan dan Analisis Data (SPSS)	147
LAMPIRAN D : Nearest Neighbour Statistic T	162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perdesaan sangat penting diperhatikan secara nasional karena penduduk perdesaan merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia. Sensus Penduduk tahun 1990 memperlihatkan bahwa lebih dari 69% penduduk memiliki perhatian besar terhadap pedesaan. Pembangunan perdesaan dimaksudkan agar meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Secara umum menurut Sujarto (2004) ciri daerah perdesaan ditandai oleh struktur kegiatan penduduk berbasis agraris atau pertanian, kepadatan penduduk lebih jarang rendah, cara hidup maupun pola budaya yang dekat dengan pemanfaatan sumber daya alam, tempat tinggal penduduk berkelompok tersebar, potensi tenaga dengan pendidikan yang baik agak langka, dan mempunyai sistem organisasi sederhana berbasis kegiatan subsisten atau primer. Dugaan bahwa masyarakat perdesaan di Indonesia mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dari sisi kebijaksanaan seperti terjadi di daerah perkotaan, terjadi migrasi sumber daya manusia ke daerah yang lebih maju, sehingga secara keseluruhan menyebabkan proses pembangunan tidak optimal, meskipun input kesempatan yang diberikan sama kepada masyarakat di daerah perkotaan.

Pendekatan kewilayahan dalam pembangunan perdesaan menurut Rondinelli (1985), Belsky dan Karaska (1990), Hanafiah (1982) bahwa pendekatan pembangunan perdesaan ditempuh dengan memadukan semua

aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara fungsional dan spasial. Keterpaduan fungsional mencakup semua kegiatan sosial-ekonomi yang mempengaruhi kehidupan penduduk, termasuk kesehatan, pendidikan, industri kecil, pertanian dan aspek-aspek lainnya.

Pembangunan desa melalui pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat pedesaan seperti penyediaan kesehatan (imunisasi polio, hepatitis, pemberantasan nyamuk malaria) dan pendidikan (SD Inpres) dapat mengurangi kesenjangan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konsep penyediaan sarana secara efisien dan ekonomis dalam melayani seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan tingkat pelayanan diharapkan dapat mengurangi pembangunan yang tidak optimal, seperti dalam pembangunan SD atau pusat pelayanan sosial, mengakibatkan bangunan yang didirikan hanya bertahan beberapa tahun karena jumlah murid yang kurang, penyediaan guru yang terbatas.

Kecamatan Jalancagak berada di Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat memiliki 17 desa dan diantaranya terdapat 5 desa sebagai BWK seperti yang tercantum di dalam RUTRK Kecamatan Jalancagak. Kecamatan Jalancagak yang terletak di daerah pegunungan dan memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam sehingga menjadikan kawasan ini sebagai kawasan budidaya dan lindung. Kondisi wilayah Kecamatan Jalancagak seperti yang sudah dijelaskan di atas mengakibatkan penyebaran pusat-pusat permukiman atau desa-desa tersebar dengan jarak yang tidak mudah terjangkau sehingga kebutuhan sarana tidak

tersebar secara merata. Adanya 5 BWK di Kecamatan Jalancagak diharapkan kebutuhan sarana pelayanan dasar dapat tertampung untuk sub-sub desa lainnya.

Kebutuhan sarana dasar di Kecamatan Jalancagak meliputi fasilitas pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan sarana ini diharapkan menjadi faktor penunjang pendidikan dan kesehatan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan sejarah Kecamatan Jalancagak yang merupakan kawasan perkebunan dimulai saat pemerintahan Raffles yang dikenal dengan nama P&T Land (Pamanoekan dan Tjiasem Land) pada tahun 1813-1839, kemudian Inggris menyerahkan kekuasaan kepada Belanda berdasarkan kepada Konvensi London dan dijual kepada Hofland seorang Belanda selama 70 tahun (1840-1911). Kemudian tanah ini dijual kembali kepada Inggris dan dikuasai selama 43 tahun (1911-1954) sebelum diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. (*Subang Giwang Permata, 1994*). Hingga saat ini wilayah Kecamatan Jalancagak masih menjadi kawasan perkebunan yang dikelola oleh Persero Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN).

Mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang, Kota Kecamatan Jalancagak sebagai Kota Kecamatan Jalancagak berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial bagi wilayah kecamatan. Selain itu Kota Kecamatan Jalancagak sebagai simpul-simpul (*nodes*) dalam pengembangan Wilayah Kabupaten Subang. Agar fungsi-fungsi yang diemban dapat berjalan dengan baik maka tingkat pelayanan di wilayah kota kecamatan maka

diperlukannya kebijakan tentang jenjang fungsi-fungsi pelayanan kegiatan berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas dan lokasi pelayanan.

Kajian yang diangkat pada penelitian ini adalah tingkat pelayanan sarana dasar di wilayah Kota Kecamatan Jalancagak yaitu aspek fisik, sosial dalam ketersediaan sarana. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa adalah tingkat pelayanan sarana dasar meliputi sarana kesehatan dan pendidikan dikuatirkan berfungsi tidak optimal sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan tersebut tidak terpenuhi. Wilayah Kecamatan Jalancagak yang persentasenya lebih besar sebagai kawasan pertanian dan perkebunan mengakibatkan sebaran penduduk tidak berorientasi pada satu pusat melainkan menyebar. Adanya kendala tersebut maka diperlukannya tinjauan pelayanan sarana dasar yang strategis agar masyarakat dapat mencapai kebutuhan secara optimal dari pusat pemukiman ke tempat sarana sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Jalancagak harus memenuhi suatu intensitas hubungan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya secara fungsional.

Sehingga penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk mengetahui pola dan optimasi tingkat pelayanan sarana dasar dengan aspek kesehatan dan pendidikan di Kota Kecamatan Jalancagak. Adapun *research question*, isu pokok permasalahan pokok dirumuskan dalam pertanyaan berikut: **Bagaimana mencapai optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar di wilayah studi?**

1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam penelitian Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar di Kota Kecamatan Jalancagak Subang menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah (sasaran) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar Kota Kecamatan Jalancagak.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut adalah

1. Mengidentifikasi kondisi fisik wilayah.
2. Mengidentifikasi karakteristik sosial.
3. Mengidentifikasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar (kesehatan dan pendidikan) dan optimasi di wilayah studi.
4. Menganalisis Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar.
5. Menganalisis Optimasi Tingkat Pelayanan Sarana Dasar.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansial. Ruang lingkup ruang lingkup wilayah adalah

pembatasan ruang atau wilayah kajian. Sedangkan ruang lingkup substansial adalah pembatasan terhadap materi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Subang Jawa Barat. Kota Kecamatan Jalancagak terdiri dari Desa Jalancagak, Desa Bunihayu, Desa Curugrendeng, Desa Sarireja dan Desa Tambakan memiliki luas total wilayah sebesar 26.269 Ha. Wilayah studi Kota Kecamatan Jalancagak dapat dilihat pada gambar 1.1.

1.4.2 Ruang Lingkup Substansial

Studi ini mengkaji mengenai optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar di Kecamatan Jalancagak. Optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar Kota Kecamatan Jalancagak, sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah, karakteristik sosial, daya dukung fasilitas pelayanan sarana dasar, sehingga ruang lingkup substansial dibatasi oleh :

1. Membahas fisik kewilayahan meliputi kondisi fisik wilayah yaitu geografi, topografi, fungsi perwilayahan dan homogenitas.
2. Membahas karakteristik sosial meliputi jumlah penduduk, pola persebaran/kepadatan penduduk dan kecenderungan perilaku penduduk terhadap pelayanan sarana dasar.
3. Membahas pola dan tingkat pelayanan sarana dasar (kesehatan dan pendidikan) di wilayah studi. Pola dan tingkat pelayanan sarana yang meliputi persebaran pelayanan sarana dasar dan permukiman dan jangkauan

Gambar 1.1
Peta Orientasi Kota Kecamatan Jalancagak

4. Menganalisis Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar dengan menggunakan metode *nearest neighbour statistic*, metode *next opportunity matrix*, Kepmen PU 1987.
5. Menganalisis Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar. Menganalisis optimasi berdasarkan hasil temuan dari analisis pola dan tingkat pelayanan sarana dasar dengan menggunakan metode skoring.

1.5 Kerangka Pemikiran

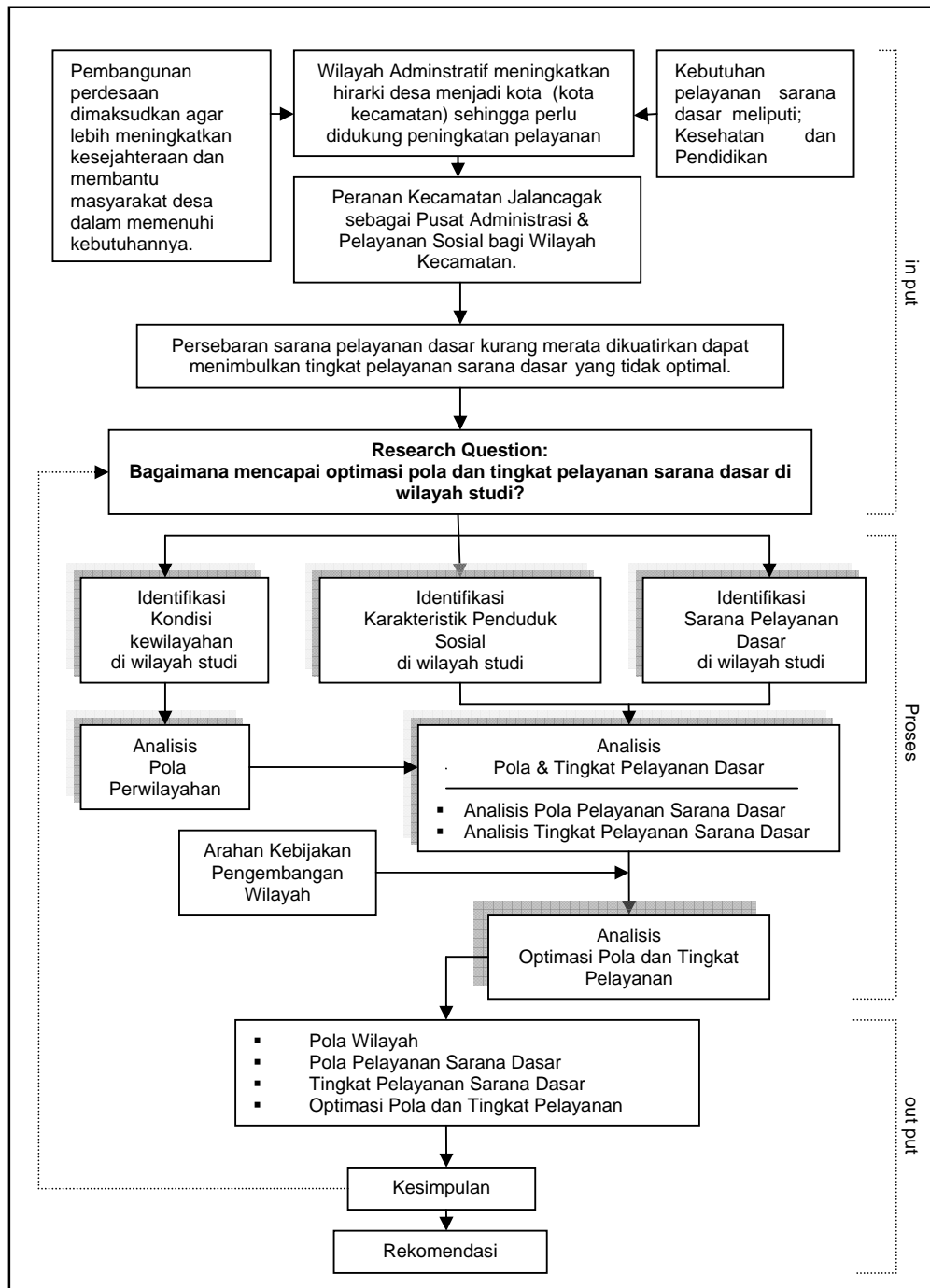
Kerangka pikir Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar di Kecamatan Jalancagak dapat dilihat pada gambar 1.2.

Pembangunan perdesaan dimaksudkan agar meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai maksud tersebut dibutuhkan pemenuhan kebutuhan pelayanan sarana dasar meliputi pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pelayanan sarana dasar dibutuhkan seiring dengan peningkatan tekanan populasi, sehingga meningkatkan hirarki desa menjadi kota (kota kecamatan). Pada saat ini tampak peningkatan peranan Kota Kecamatan Jalancagak sebagai Pusat Pelayanan Sosial bagi wilayah kota, kecamatan dan desa di sekitarnya. Permasalahan yang dihadapi adalah pola persebaran sarana pelayanan dasar yang kurang merata dikhawatirkan dapat menimbulkan tingkat pelayanan sarana dasar yang tidak optimal. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dibuat suatu research question, yaitu: Bagaimana mencapai optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar di wilayah studi?

Untuk menjawab research question ini maka diperlukan identifikasi yang meliputi: (a) Identifikasi kondisi fisik wilayah untuk memperoleh batas

administrasi, penruntukan lahan, geografi, dan fungsi wilayah; (b) Identifikasi karakteristik penduduk dan sosial untuk memperoleh jumlah penduduk, sebaran penduduk, tingkat mata pencaharian, mengetahui pendapatan dan pengeluaran; dan (c) Identifikasi pelayanan sarana dasar di wilayah Kecamatan Jalancagak meliputi pola wilayah, pola pelayanan sarana dasar dan tingkat pelayanan sarana dasar untuk memperoleh fungsi wilayah, hirarki desa, bentuk desa, pola pemukiman, sebaran pelayanan dasar di wilayah pedesaan, tingkat pelayanan (kapasitas) pada saat ini, kecenderungan/prilaku masyarakat terhadap kondisi sarana saat ini, jangkauan jarak terdekat dari pusat pemukiman dan memperoleh proyeksi kapasitas sarana pelayanan yang optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi pelayanan sarana dasar maka akan dianalisis optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar. Hasil dari analisis ini akan ditemukan antara lain: pola wilayah dengan menggunakan metoda *Nearest Neighbour Statistic* pola pelayanan sarana dasar dengan menggunakan metoda *Next Opportunity Matrix* dan tingkat pelayanan sarana dasar berdasarkan standar fasilitas sosial PU 1987 dan *descriptive statistic*. Hasil dari analisis pola dan tingkat pelayanan ini akan di gabungkan dengan arahan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk memperoleh optimasi pelayanan sarana dasar, berdasarkan hasil penelitian dan arahan kebijakan. Sehingga hasil dari penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi.



Sumber: Hasil Analisis, 2006

GAMBAR 1.2
KERANGKA PIKIR OPTIMASI POLA DAN TINGKAT PELAYANAN SARANA DASAR KOTA KECAMATAN JALANCAGAK - SUBANG

1.6 Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu pendekatan untuk mengkategorikan sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada sesuatu masa sehingga dapat diperoleh, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003).

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti melihat seberapa jauh optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar pada desa-desa di Kota Kecamatan Jalancagak, maka langkah-langkah pendekatan (gambar 1.3) yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Pola Wilayah

Wilayah adalah suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Pendekatan perwilayahan homogenitas dilakukan sebagai tahapan yang dalam penelitian untuk melihat suatu wilayah berdasarkan ciri-ciri yang sama atau dengan kemiripan relatif. Kemiripan ciri tersebut dapat berupa kesamaan sumberdaya alam yang meliputi perkebunan teh, pertanian dan perhutanan Melalui metoda *Nearest Neighbour Statistic* diperoleh secara deskriptif mengenai fisik dasar yang meliputi penggunaan lahan, keseragam sumberdaya alam, sehingga dapat diketahui kawasan-kawasan mana saja yang dipergunakan sebagai

kegiatan pelayanan sosial untuk menunjang kebutuhan pokok penduduk Kota Kecamatan Jalancagak.

2. Pendekatan Pola Pemukiman dan Sarana Dasar

Pola adalah persebaran menggerombolnya ataupun saling menjauhi , biasanya persebaran ini dilatar belakangi oleh kondisi geografi di setiap daerah pedesaan dan kondisi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya sebaran. Sebaran yang dimaksud pada penelitian ini adalah sebaran pemukiman dan sebaran fasilitas pelayanan sarana dasar.

Pendekatan pola pemukiman dilakukan untuk melihat orientasi penduduk dalam memenuhi kebutuhan pelayanan disekitarnya dan juga memperoleh karakteristik pola penduduk berdasarkan tipologi desa. Pendekatan persebaran pelayanan sarana ini digunakan untuk dapat melihat sebaran fasilitas pelayanan sarana dasar yang sudah ada di wilayah permukiman maupun di pusat pelayanan. Dengan menggunakan analisis diperoleh secara deskriptif mengenai kepadatan penduduk, fungsi wilayah dan aksesibilitas.

Mengukur jangkauan pelayanan digunakan untuk mengukur fasilitas sosial pada jarak capai terhadap area yang dilayani. Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh jarak minimal pencapaian dengan menggunakan metoda matriks jarak kesempatan terdekat (*Next Opportunity Matrix*) sehingga sebaran sarana pelayanan dasar di dalam wilayah Kota Kecamatan Jalancagak dapat terukur berdasarkan jarak dari setiap desa-desa

3. Pendekatan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar

Tingkat pelayanan sarana dasar adalah untuk (1) memenuhi kebutuhan layanan kota/desa bagi wilayah kota/desa yang memerlukan dilihat dari sisi *supply* dan *demand*; dan (2) mengarahkan perkembangan kota. Dari tujuan pertama tersebut dikarenakan area yang ada sudah terlanjur berkembang tetapi belum dilengkapi dengan layanan yang memadai. Sementara tujuan yang kedua adalah dalam kerangka menjadi daya tarik area yang belum berkembang. Pendekatan tingkat pelayanan sarana dasar di Kota Kecamatan Jalancagak dilakukan dengan cara:

- a) Mengukur perilaku masyarakat atau pengguna (*user approach*) untuk mengetahui masyarakat bisa memberikan respon dengan adanya pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga akan diperoleh frekuensi kecenderungan masyarakat, tingkat ketidakpuasan dan kepuasan dan alasannya.
- b) Mengukur kapasitas pelayanan berdasarkan persyaratan fasilitas pelayanan dasar melalui Kepmen PU No.378/KPTS/1987 Peraturan dan Pembangunan Fasilitas Sosial di Lingkungan Perumahan di Indonesia untuk memperoleh tingkat pelayanan yang optimal dari segi *supply* dan *demand* berdasarkan ketentuan atau syarat yang digunakan untuk skala kecamatan. Data-data yang dibutuhkan meliputi jumlah ambang batas usia sekolah yang meliputi SD, SLTP, dan SLTA dan jumlah penduduk di wilayah studi

4. Pendekatan Optimasi

Optimasi adalah suatu proses kolektif dalam mendapatkan suatu set kondisi yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang terbaik dari suatu situasi yang bersifat tertentu atau *given* (Beveridge dan Schecter, 1970). Agar optimasi tercapai maka pendekatan optimasi pada studi ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Melalui metode skoring untuk memperoleh ukuran bobot optimal, cukup optimal dan kurang optimal pelayanan sarana dasar pada tiap desa-desa dalam wilayah kota Kecamatan Jalancagak, sehingga dapat diketahui desa mana yang harus di berikan perencanaan agar pelayanan sarana dasar dapat berfungsi sebaik mungkin.
- b) Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Subang untuk memperoleh dasar penentuan skala prioritas setiap tahapan yang bersifat strategis yang perlu dilaksanakan pembangunannya dan dikembangkan pembangunannya oleh Pemerintah maupun masyarakat. Yang dimaksud dengan strategi disini adalah yang berkaitan dengan kebutuhan penyediaan sarana yang sudah sangat mendesak sekali, baik ditinjau dari skala kebutuhan maupun dari segi kelancaran sistem kegiatan kota (Strategi “*Basic Needs*”).
- c) *Neighborhood Unit* digunakan untuk dapat mencari hasil solusi berdasarkan penataan fisik lingkungan agar dapat membuat interaksi sosial di antara penghuni pemukiman. Untuk penelitian ini diambil beberapa prinsip *neighborhood unit* yaitu prinsip *sharing system* dan prinsip *social*

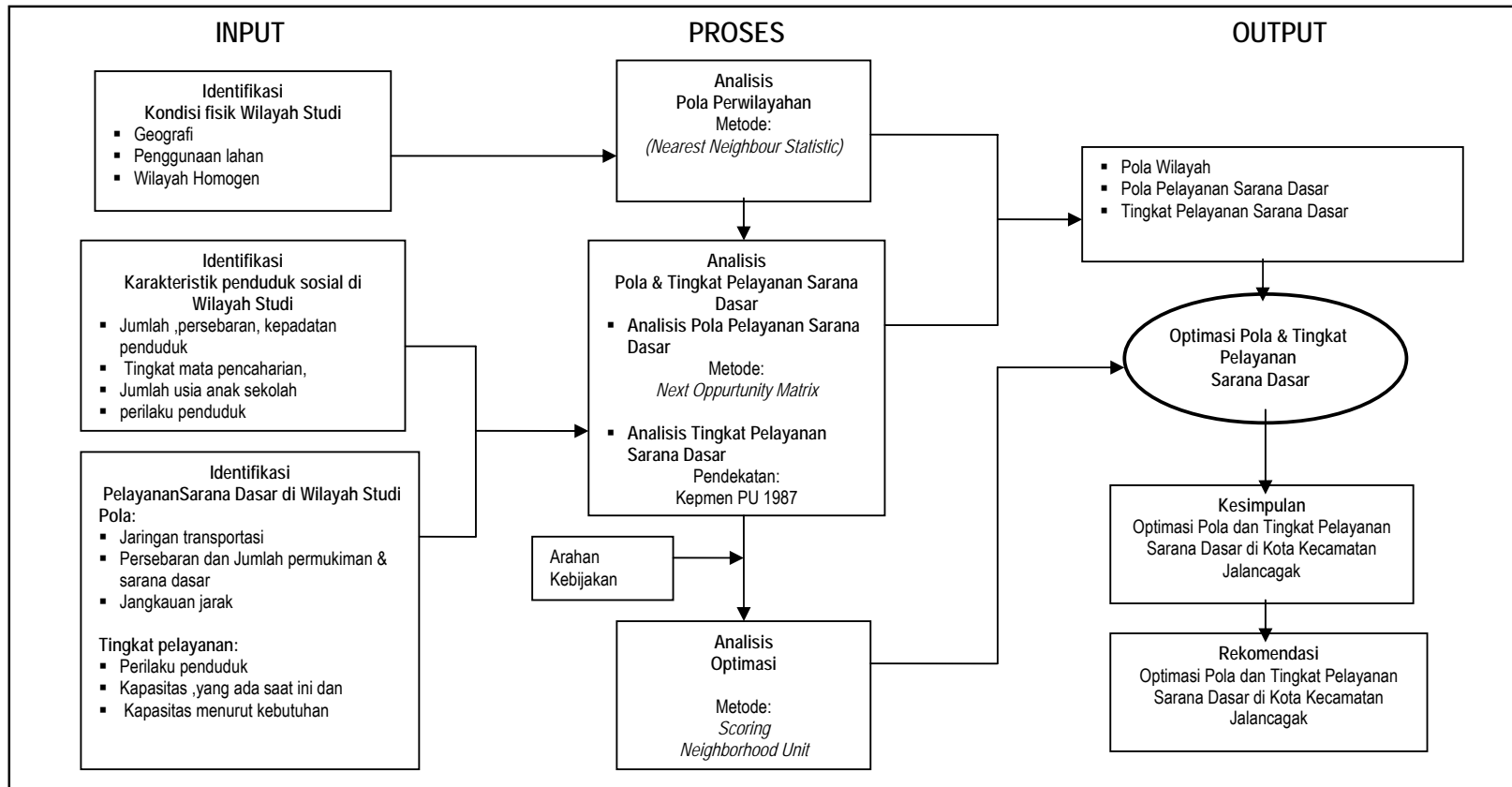
governance yang dapat dipakai untuk mengoptimasikan pelayanan sarana dasar pada wilayah studi.

1.6.2 Metoda Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam suatu penelitian. Metode penelitian terdiri dari prosedur dan teknik yang akan dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada penelitian urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat ukur yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian (Nasir, 1986). Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah (1) *Nearest Neighbour Statistic*, (2) *Next Oppurtunity Matrix*, dan (3) Skoring pembobotan optimal, cukup optimal dan kurang optimal.

Prosedur kajian optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar di Kecamatan Jalancagak terdiri dari : tahapan pelaksanaan penelitian, penentuan variabel data dan jenis data serta pengambilan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data serta teknik sampling. Data-data yang dipergunakan ada dua (2) macam yaitu data sekunder dan data primer.

Data primer yaitu hasil pengisian *questioner* kepada penduduk di Kota Kecamatan Jalancagak. Data sekunder yaitu kumpulan data-data dari instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.



Sumber: Hasil Analisis, 2006

GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS OPTIMASI POLA DAN TINGKAT PELAYANAN SARANA DASAR
KOTA KECAMATAN JALANCAGAK-SUBANG

1.6.2.1 Kebutuhan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu data yang dibutuhkan untuk optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar Kecamatan Jalancagak, yaitu :

- a. Data primer dilakukan dengan observasi lapangan untuk mendapatkan informasi dari penduduk dan tokoh masyarakat untuk mengetahui tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan pengeluaran, serta perilaku dan tanggapan masyarakat terhadap tingkat pelayanan dasar yang ada. Pelaksanaan kuisisioner, dilengkapi dengan peta pemukiman untuk mempermudah melihat orientasi penduduk ke tempat pelayanan. Dari hasil ini semua maka dapat terjawab optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar di Kota Kecamatan Jalancagak.
- b. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di Kecamatan Jalancagak (kecamatan, kelurahan), dan beberapa dinas di Kabupaten subang yang terkait untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Data-data sekunder yang dibutuhkan adalah :
 - Data fisik dasar wilayah meliputi; kondisi geografi, topografi, dan tata guna lahan di wilayah Kecamatan Jalancagak Subang.
 - Data kependudukan meliputi; jumlah penduduk, persebaran penduduk, tingkat kepadatan penduduk, di Kota Kecamatan Jalancagak.
 - Data hirarki desa serta kelengkapan fasilitas sarana pelayanan dasar.
 - Data jumlah sarana pelayanan dasar meliputi; sarana kesehatan, sarana pendidikan dan jumlah kapasitas yang terlayani saat ini.

- Data jaringan transportasi meliputi; jaringan jalan, kondisi jalan dan jumlah terminal.
- Data RTRW dan RDTR Kota Kecamatan Jalancagak.

Kebutuhan data untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel I.1 sebagai berikut:

TABEL I.1
KEBUTUHAN DATA PENELITIAN

No	Analisis	Sub variabel	Sasaran	Jenis Data
1.	Pola Perwilayahan	Fisik dasar wilayah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geografi ▪ Penggunaan Lahan ▪ Batas administrasi ▪ Homogenitas ▪ Tipologi Desa ▪ Pola Pemukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pola wilayah (Peter Hagget dalam Bintarto 1987) pola desa dalam satu kesatuan wilayah dapat diketahui bentuk <i>uniform</i> $T=2,15$ <i>random</i> $T=1$ dan <i>cluster</i> $T=0$ di melalui metode <i>Nearest Neighbour Statistic</i>. 2. Mendapatkan wilayah homogenitas berdasarkan ciri-ciri dominasi penggunaan lahan. 3. Mendapatkan tipologi desa-desa dan pola pemukiman di dalam wilayah studi. 	<u>Sekunder</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kabupaten Subang. ▪ Peta Kota Kecamatan Jalancagak <u>Primer</u> : Observasi
2. 3.	Pola Pelayanan Sarana Dasar dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar	Sosial : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola Pertumbuhan Penduduk. ▪ Pola Persebaran Penduduk Kecamatan Jalancagak. Pola: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebaran Transportasi ▪ Sebaran Pelayanan ▪ Jangkauan Pelayanan Tingkat Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecenderungan masyarakat. ▪ kapasitas yang ada ▪ Kebutuhan kapasitas 	Pola Pelayanan Sarana Dasar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan sebaran transportasi sebagai penunjang aksesibilitas ke pelayanan. 2. Mendapatkan sebaran sarana dasar didalam wilayah studi 3. Mendapatkan jarak jangkauan pemukiman ke sarana berdasarkan metode <i>Next Oppurtunity Matix</i>. Tingkat Pelayanan Sarana Dasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan perilaku dan pola masyarakat terhadap sarana pelayanan di wilayah studi. 2. Mendapatkan jumlah kapasitas yang ada dan kebutuhan berdasarkan Kepmen PU.1987 	<u>Primer</u> : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi visual ▪ Kuisisioner <u>Sekunder</u> : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Dalam Angka 2004 ▪ Kepmen PU 1987 ▪ Peta Desa
4.	Opimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil dari Analisis Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar dantinjauan Arahan Kebijakan RDTR Kota Kecamatan Jalancagak ▪ <i>Times and Distance</i> ▪ <i>Cost and Distance</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan kategori desa-desa berdasarkan optimal, cukup optimal dan kurang optimal yang dilakukan dengan menggunakan metode skoring pembobotan. 2. Merencanakan optimasi untuk desa yang kurang optimal dengan pendekatan prinsip <i>Neighborhood Unit</i> 	<u>Primer</u> : Observasi visual <u>Sekunder</u> RDTR

Sumber : Hasil Analisis, 2006

1.6.2.2 Pengumpulan Data

Secara umum metoda pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua (2) cara yaitu :

1. Pengumpulan data primer, diperoleh dari wawancara dengan responden, dengan menggunakan kuesioner yang akan disiapkan sebelumnya. Kuesioner dapat bersifat terbuka dan tertutup, tergantung dari kedalaman informasi yang diperlukan. Observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah yang akan diteliti. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan antara peneliti dan responden untuk menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian.
2. Pengumpulan data sekunder, diperoleh dari instansi yang terkait dalam penelitian pola dan optimasi tingkat pelayanan sarana dasar yaitu Bappeda, Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan, Kantor Desa, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa. Data yang dibutuhkan meliputi : (1) Data Kecamatan Dalam Angka; (2) Data Monografi atau Profil Desa; (3) Tata Ruang Kota Kecamatan Jalancagak.

1.6.2.3 Teknik Penentuan Responden

1. Teknik Sampling

Sampel menurut Hasan (2002) adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap tidak bias mewakili populasi. Pengambilan sampel adalah

pemilihan sejumlah jenis (*item*) tertentu terhadap seluruh jenis yang ada, dengan tujuan mempelajari sebagian item untuk mewakili seluruh item atau populasi. Dengan meneliti sebagian populasi atau sampel mewakili, diharapkan hasil yang menggambarkan karakteristik seluruh populasi yang ada (Arikunto, 1998). Teknik pengambilan sampel atau teknik *sampling* yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *stratified random sampling* dan *purposive sampling*.

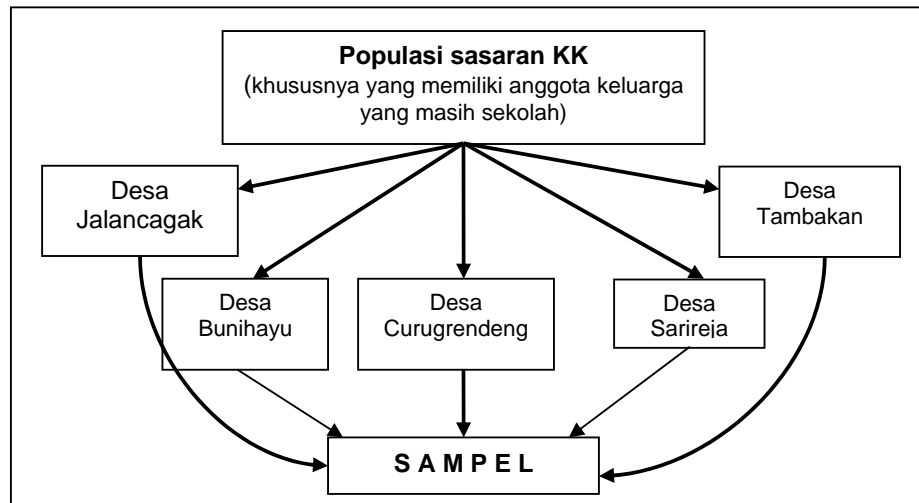
Stratified sampling atau pengambilan sampel secara acak (random), dengan terlebih dahulu membagi populasi Kota Kecamatan Jalancagak. Pada penelitian ini akan dilengkapi dengan penggunaan proporsional, sehingga setiap desa (Jalancagak, Bunihayu, Curugrendeng, sarireja dan Tambakan) akan diwakili oleh jumlah yang sebanding (Gambar 1.3). *Stratified random sampling* yang dilengkapi dengan proporsional disebut *proportional stratified random sampling*. Keuntungan menggunakan cara *proportional stratified random sampling* adalah anggota sample yang diambil lebih representatif yaitu kepala keluarga yang memiliki anak usia sekolah, pemilihan ini dimaksudkan sudah mewakili masyarakat akan kebutuhan sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Kelemahannya adalah lebih banyak memerlukan usaha pengenalan terhadap karakteristik populasinya.

Purposive sampling merupakan salah satu teknik sampling nonrandom yaitu dilakukan dengan mengambil sasaran/ obyek yang terpilih betul menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel (Nasution, 2004). Keuntungan *purposive sampling* yaitu bahwa sampel ini dipilih sedemikian rupa, sesuai dengan desain peneliti. Sampel yang dipilih adalah individu yang menurut

pertimbangan peneliti dapat didekati. Kelemahan *purposive sampling* yaitu bahwa tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sampel itu representatif seperti halnya dengan sampel random. Pada penelitian pola dan optimasi tingkat pelayanan sarana dasar (pendidikan), sampel *purposive* yang akan dipakai adalah para kepala keluarga yang memiliki anak yang masih melanjutkan pendidikan sesuai dengan populasi sasaran. Berdasarkan populasi dari jumlah penduduk terseleksi tersebut kemudian ditentukan kembali jumlahnya dengan cara *proportional*. Jumlah sampel berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive proportional sampling* masih terlalu besar, dikarenakan keterbatasan dana dan waktu, maka jumlah sampel diacak dalam strata dan diambil secara proporsional atau *stratified proportional random sampling*.

2. Populasi Sasaran

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan variabel (Nasir 2003). Populasi dalam penelitian ini kepala keluarga (KK) yang berlokasi di Desa Jalancagak, Desa Bunihayu, Desa Tambakan, Desa Sarireja, dan Desa Curugrendeng serta memiliki anggota keluarga yang masih melanjutkan pendidikan (SD, SMP, SMA) pada sarana pendidikan yang ada di Kota Kecamatan Jalancagak. Pemilihan KK yang memiliki anak usia sekolah dapat mewakili seluruh 3 variabel yang akan diketahui yaitu sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana perdagangan, hal ini diasumsikan bahwa setiap keluarga membutuhkan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan sarana dasar yang ada di Kota Kecamatan Jalancagak.



Sumber: Hasil Analisis, 2006

GAMBAR 1.4
PENENTUAN SAMPEL POPULASI SASARAN

3 Jumlah sampel

Teknik untuk menghitung besarnya ukuran data jumlah sampel secara proporsi yaitu :

$$n \geq pq \left(\frac{Z \frac{1}{2} \alpha}{\alpha} \right)^2$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel minimal
- p = proporsi kelompok pertama
- q = Proporsi kelompok kedua = (1 – p)
- α = Taraf signifikansi
- $Z \frac{1}{2} \alpha$ = Harga tabel chi-kuadrat untuk taraf signifikan tertentu

Jumlah populasi penduduk di wilayah Kota Kecamatan Jalancagak sebesar 26.269 jiwa. Jumlah sampel yang diambil dari jumlah KK tiap desa di –

Kota Kecamatan Jalancagak dengan perhitungan berikut ini:

- a = jumlah penduduk yang bersekolah (Profil Desa Tahun 2004)
- b = jumlah total penduduk (Profil Desa Tahun 2004)
- p = a/b
- q = 1-p

$$\begin{aligned}\alpha &= \text{Taraf Signifikansi yang digunakan adalah } 0,05 \\ Z^{1/2} \alpha &= 1,98 \\ 1 \text{ KK} &= 5 \text{ Jiwa}\end{aligned}$$

Total sampel yang dipergunakan dalam penelitian Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar di Kecamatan Jalancagak sebanyak 109 kepala keluarga yang memiliki anak sekolah dengan dengan pembagian jumlah sampel secara proporsional di tiap desa-desa wilayah studi dapat dilihat pada Tabel I.2

TABEL I.2
JUMLAH SAMPLE PENELITIAN

No	Nama Desa	Jumlah Sample (KK)
1	Jalancagak	33
2	Bunihayu	16
3	Curugrendeng	24
4	Sarireja	13
5	Tambakan	23
Total Sample		109

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Teknik Analisis

Analisa data menunjukkan pada kegiatan mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka penginterpretasikan data (tabulasi) dan peta sesuai dengan susunan kajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian (Sanapiah, 1989).

Analisis analisis pola wilayah, analisis pola pelayanan sarana dasar, analisis tingkat pelayanan sarana dasar. merupakan cara untuk menggambarkan kondisi perwilayahan di Kota Kecamatan Jalancagak, melihat hirarki desa-desa di dalam wilayah, sebaran permukiman, bentuk pemukiman (terkonsentir atau tersebar) dan sebaran sarana pelayanan dasar yang sudah ada di desa-desa

sehingga dapat diketahui optimal dan tidak optimal pada tingkat pelayanan sarana dasar yang dibutuhkan.

1.6.3.1 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang mempergunakan alat analisis berupa model-model, seperti model matematika, model statistik dan model ekonometrik, yang hasil analisisnya berbentuk angka-angka dan selanjutnya akan di uraikan (Hasan,2002). Bentuk analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pola wilayah, analisis pola pelayanan sarana dasar, analisis tingkat pelayanan sarana dasar.

Analisis Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar diperlukan untuk melihat pola wilayah,sebaran fasilitas sarana di dalam perwilayahan, mengukur jarak pemukiman ke lokasi fasilitas pelayanan sarana dasar, mengukur tingkat ketidak puasan dan kepuasan masyarakat terhadap fasilitas sarana pelayanan dasar yang sudah ada, dan juga melihat jumlah tingkat pelayanan fasilitas terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat terlihat ke optimalan setiap tingkat pelayanan sarana.

Dengan demikian akan terjadi suatu keseimbangan yang adil dan merata di antara wilayah pemukiman yang ada, dalam memperoleh/ membawa pusat-pusat pelayanannya sesuai dengan kebutuhan. Menurut Rondinelli (1983) dalam Riyadi (2005) bahwa sebuah distrik tidak hanya merupakan sebuah sistem pemukiman yang secara fungsional berbeda, tetapi juga merupakan sebuah jaringan interaksi sosial, ekonomi, dan fisik. Dalam penelitian ini, metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah: (1) analisis jarak terdekat, (2) analisis

keruangan dan (3) analisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas sarana pelayanan yang sudah ada dan dilengkapi oleh persyaratan standar fasilitas sosial yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum .

A. Analisis Wilayah berdasarkan Keruangan (*Nearest Neighbour Statistic*)

Analisis wilayah menggunakan *nearest neighbour statistic* untuk mengetahui pola desa yang dikatakan seragam (*uniform*), random, mengelompok (*clustered*). Dengan demikian pembandingan antara pola desa di wilayah kecamatan dapat dilihat dari segi keruangan (*space*). Analisa ini memerlukan batas wilayah, pola sebaran desa, ukuran jarak terdekat, dan parameter tetangga terdekat (*nearest neighbour statistic*) dengan rumus:

$$T = \frac{\bar{j}_u}{\bar{j}_h}$$

T = indeks penyebaran tetangga terdekat

\bar{j}_u = jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat

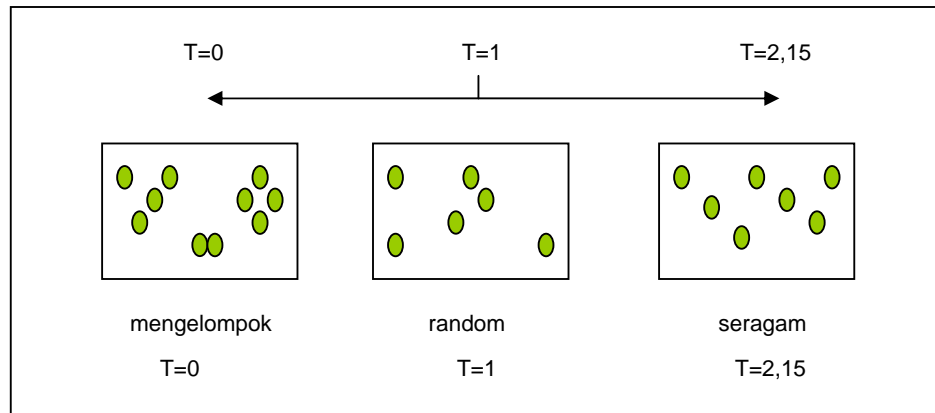
\bar{j}_h = jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola

$$\text{random} = \frac{1}{2\sqrt{p}}$$

P = kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan luas wilayah dalam kilometer persegi (A), sehingga menjadi $\frac{N}{A}$.

Parameter tetangga terdekat atau indeks penyebaran mengukur kadar kemiripan pola titik terhadap pola random. Untuk memperoleh \bar{j}_u digunakan cara dengan menjumlahkan semua jarak terdekat dan kemudian dibagi dengan jumlah titik

yang ada. Parameter tetangga terdekat T dapat ditunjukkan dengan rangkaian kesatuan (continuum) untuk mempermudah perbandingan antar pola titik.



Sumber: Peter Hagget dalam Bintarto (1987)

GAMBAR I.5
CONTINUUM NILAI NEAREST NEIGHBOUR STATISTIC T

B. Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Dasar berdasarkan Perilaku Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat dapat diketahui dengan deskriptif statistik dengan SPSS, berdasarkan data kuisioner terhadap pelayanan sarana dasar dapat diperoleh frekuensi masyarakat yang menunjukkan tingkat pendidikan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana pelayanan yang ada, dan alasan ketidakpuasan. Sehingga trend atau perilaku masyarakat dapat membantu penelitian ini untuk mengetahui keaktifan masyarakat terhadap penggunaan pelayanan sarana dasar pada wilayah kota Kecamatan Jalancagak.

C. Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Dasar berdasarkan Kapasitas Pelayanan

Persyaratan standar fasilitas sosial, menggunakan standar dari Kepmen PU. No.378/KPTS/1987 untuk melihat kemampuan tingkat pelayanan maksimal kapasitas yang dapat dibangun atau yang ada.

D. Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Dasar berdasarkan Jangkauan Pelayanan (*Next Oppurtunity Matrix*)

Matriks jarak dan kesempatan terdekat digunakan untuk mengetahui lokasi fungsi pelayanan dasar yang ditempuh dalam jangka waktu dan jarak tempuh minimum (paling dekat), sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya guna memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dalam jangka waktu dan jarak terdekat dari tempat permukiman.

E. Analisis Optimasi Tingkat Pelayanan Sarana Dasar

Melalui pendekatan skoring untuk memperoleh ukuran bobot optimal, cukup optimal dan kurang optimal pelayanan sarana dasar pada tiap desa-desa dalam wilayah kota Kecamatan Jalancagak, sehingga dapat diketahui desa mana yang harus di berikan perencanaan terlebih dahulu agar pelayanan sarana dasar dapat berfungsi sebaik mungkin.

1.6.3.2 Analisis Kualitatif

Pendekatan umum yang dilakukan pada analisis kualitatif adalah deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tertulis data-data yang telah didapat dan diolah, menguraikan dan menafsirkan data-data tersebut. Artinya, analisis kualitatif adalah memberikan gambaran penjelasan tentang keadaan atau fenomena yang ada di wilayah studi dengan sejelas-jelasnya.

Data yang diperlukan dalam analisis kualitatif pada penelitian adalah data yang menunjang optimasi tingkat pelayanan sarana dasar meliputi; (1) data peruntukan lahan, administrasi untuk menjelaskan wilayah homogenitas di gunakan untuk analisis pola wilayah; (2) data *nearest neighbour statistic* untuk

menjelaskan pola desa digunakan pada analisis pola wilayah; (3) data tipe desa untuk menceritakan sebaran pemukiman dan sarana di wilayah desa dan perilaku penduduk desa dan hasil data *next opportunity matrix* untuk menceritakan jarak jangkauan dari setiap desa ke sarana pelayanan dasar yang ada di wilayah studi data ini digunakan untuk analisis pola sarana pelayanan sarana dasar; (4) data tingkat kepuasan untuk menjelaskan perilaku atau kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan sarana dasar digunakan pada analisis tingkat pelayanan sarana dasar; (5) data persyaratan standar fasilitas sosial untuk menerangkan pelayanan yang tersedia, jumlah penduduk yang terlayani dan kebutuhan kapasitas secara optimal di gunakan pada analisis tingkat pelayanan sarana dasar; (6) data arahan kebijakan pengembangan wilayah untuk melihat pemanfaatan dan perencanaan ruang di wilayah studi dan (7) data hasil skoring pembobotan kategori desa optimal, cukup optimal dan kurang optimal untuk dapat menguraikan kekurangan pelayanan sarana dasar pada setiap desa di dalam wilayah Kota Kecamatan Jalacagak dan memberikan suatu alternatif perencanaan optimasi untuk jangka pendek dengan menggunakan data prinsip *neighborhood unit*.

BAB II

KAJIAN LITERATUR OPTIMASI POLA DAN TINGKAT PELAYANAN SARANA DASAR

2.1 Karakteristik Wilayah

Wilayah adalah suatu batasan ruang geografis tanpa tapal batas spasial yang akurat baik secara administratif maupun fungsional. Sedangkan menurut Dahuri (2004) wilayah adalah suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Hartson dalam Hanafiah (1982) mengatakan bahwa wilayah adalah suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam aspek tertentu berbeda dengan *erea* lain. Menurut Glasson (1974) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah yaitu *subjektif* dan *objektif*. Cara pandang *subjektif* adalah cara untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Pandangan *objektif* menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam disetiap wilayah (berdasarkan iklim atau konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, atau kepadatan penduduk).

Glasson (1974) mengatakan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisi dan fungsinya. Kondisi wilayah berdasarkan kelompok atas isinya (*homogenety*) misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri dan lain sebagainya. Fungsi wilayah dibedakan dengan kota dan wilayah belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan perkotaan hierarki jalur transportasi dan lain-lain.

Blair dalam Tarigan (2004) yang membagi wilayah atas tiga tipe yaitu:

1. **Wilayah Homogen** dicirikan oleh adanya kemiripan relatif dalam wilayah . Kriteria tersebut dapat dilihat dari aspek sumber daya alam (iklim, tanah danvegetasi), sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh Kawasan Puncak adalah wilayah homogen berdasarkan iklim yang sejuk, wilayah kumuh dan perkotaan homogen dengan penduduk miskin, wilayah miskin adalah homogen sebagai wilayah yang tertinggal dan terbelakang karena tidak tersentuh oleh manfaat pembangunan, wilayah jasa adalah homogen wilayah perdagangan dan jasa-jasa lainnya dan wilayah Pantura homogen yang berkonotasi sebagai sebagai produksi padi.
2. **Wilayah Fungsional**, dicirikan oleh adanya derajat integrasi antara komponen-komponen di dalamnya yang berinteraksi ke wilayah luar. Terbentuknya wilayah fungsional dikarenakan adanya pelaku ekonomi yang saling berinteraksi antara mereka dengan luar wilayah. Wujud dari wilayah fungsional adalah wilayah nodal.
3. **Wilayah Admistratif**, dibentuk untuk kepentingan pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain. Batas geografis dilandasi oleh keputusan politik dan hukum. Wilayah admistratif lebih dianggap penting karena sering digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembagian wilayah berdasarkan propinsi, kota, kabupaten, kecamatan dan pedesaan. Wilayah administratif sering menjadi penentu perkembangan wilayah homogen dan atau wilayah fungsional.

2.2 Kategori Pola Desa

Menurut Russwurm (1987) bahwa daerah pinggiran wilayah perkotaan memiliki konotasi yang luas. Secara keruangan dalam batasan jarak fisik, wilayah ini mencakup radius sekitar 50 kilometer pada satu kota. Cakupan wilayah dapat dibedakan dalam beberapa tahapan. *Pertama* wilayah bagian dalam atau *inner fringe*, mencakup daerah beradius sekitar 10-15 kilometer. Kedua wilayah bagian luar atau *outer fringe* yang mencakup daerah perluasan antara 25-50 km.

Daerah yang mengalami pengaruh sangat kuat dari suatu kota diilustrasikan oleh Bar-Gal (1987) sebagai daerah *urban fringe*. Daerah ini ditandai oleh berbagai karakteristik, seperti peningkatan harga tanah yang drastis, perubahan fisik penggunaan tanah, perubahan kondisi penduduk dan tenaga kerja, serta berbagai aspek sosial lainnya.

Desa dalam arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berpangku jiwa agraris. Desa dalam Bahasa Indonesia sehari-hari disebut juga kampung. Desa dalam arti lain adalah kesatuan administrative (Daldjoeni, 2003). Desa/kampung adalah tempat utama kediaman (perumahan) dan bukan suatu pusat bisnis. Desa terdiri dari perkebunan dan mereka dihubungkan bangunan tambahan (Finch, 1957). Desa/kampung adalah suatu total organisasi dari hidup sosial di dalam suatu area yang terbatas (William).

Desa adalah suatu hasil perpaduan yang erat antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial,

ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut, dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.(Bintarto, 1983)

Bintarto selanjutnya mengemukakan bahwa ada tiga (3) unsur pembentuk desa-desa Jawa yaitu *daerah*, *penduduk* dan *tata kehidupan*. Unsur daerah adalah tanah perkarangan, pertanian beserta penggunaannya, termasuk lokasi, luas, batas yang merupakan lingkungan geografi. Penduduk meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan dan penyebaran serta matapecaharian. Sedangkan tata kehidupan merupakan ikatan sosial warga masyarakat desa. Ketiga unsur desa itu tidak lepas satu sama lain, artinya suatu kesatuan hidup atau "*living unit*".

Unsur lain yang termasuk unsur desa adalah letak. Letak suatu desa pada umumnya selalu jauh dari kota atau dari pusat-pusat keramaian. Desa-desa yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan berkembang yang lebih besar daripada desa-desa di pedalaman. Unsur letak menentukan besar kecil isolasi suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya.

Penduduk merupakan unsur yang penting bagi desa sebagai "*potential manpower*", di mana kondisi ini terdapat di desa masih terikat hidupnya dalam bidang pertanian. Masyarakat merupakan suatu "*gemeinschaft*" (kerjasama) yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini diakibatkan karena penduduk desa merupakan "*face to face group*" dimana mereka saling mengenal satu dengan lainnya seolah-olah mengenal dirinya. Faktor lingkungan goeografis memberikan pengaruh terhadap kegotong royongan (Wisadirana, 2005).

- a. Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk.

- b. Faktor iklim yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama petani-petani.
- c. Faktor bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, banjir, dan sebagainya yang harus dihadapi dan dialami bersama.

Unsur desa merupakan sesuatu yang penting, sehingga tidaklah berlebihan jika desa telah diberi predikat sebagai sendi negara.

Rodinelli (1985) mengemukakan pendekatan kewilayahan dalam pembangunan perdesaan. Intinya adalah pembangunan perdesaan ditempuh dengan memadukan semua aktivitas sosial, ekonomi masyarakat secara fungsional dan spasial. Keterpaduan ini mencakup semua aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.

2.2.1 Persebaran Desa dan Ciri-Ciri Desa

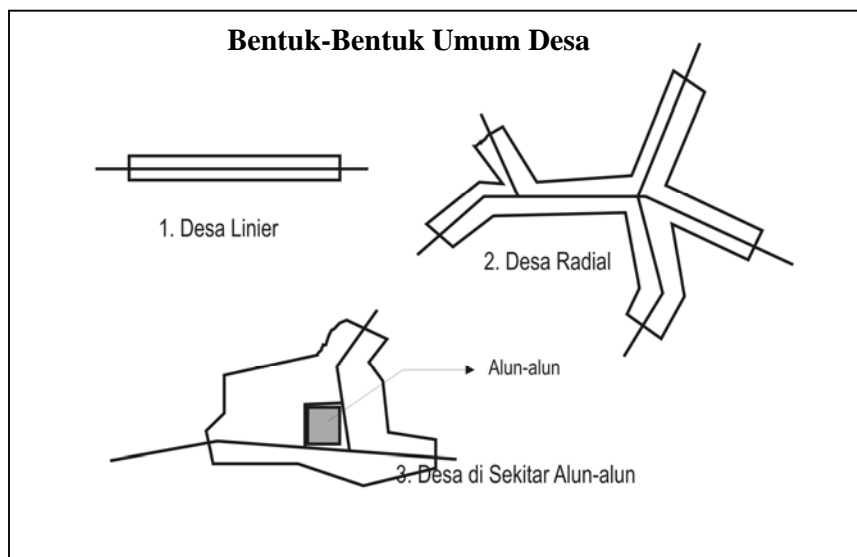
Persebaran desa adalah menggerombolnya ataupun saling menjauhi antara satu desa dengan yang lainnya, biasanya persebaran ini dilatar belakangi oleh kondisi geografi di setiap daerah pedesaan dan kondisi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya (Daldjoeni 2003).

Ciri-ciri wilayah desa antara lain: (1) perbandingan lahan dengan manusia cukup besar, (2) lapangan kerja yang dominant agraris, (3) hubungan antar warga desa amat akrab, (4) tradisi lama masih berlaku (Dikjen Penataan Ruang 2004).

2.2.2 Tipologi Desa

Desa-desa mempunyai beberapa bentuk umum apabila dilihat dari segi bentuk pengelompokan permukimannya. Menurut Sujarto (1979) bentuk fisik desa selalu akan berorientasi pada faktor-faktor dan potensi perkembangan dan pertumbuhan. Bentuk-bentuk umum tersebut diantaranya :

1. Bentuk desa linier, dimana desa berkembang memanjang mengikuti sepanjang suatu jalan raya, sungai atau lembah.
2. Bentuk desa radial, dimana desa terletak pada persimpangan jalan dan berkembang keluar mengikuti jalan-jalan yang bersimpangan itu.

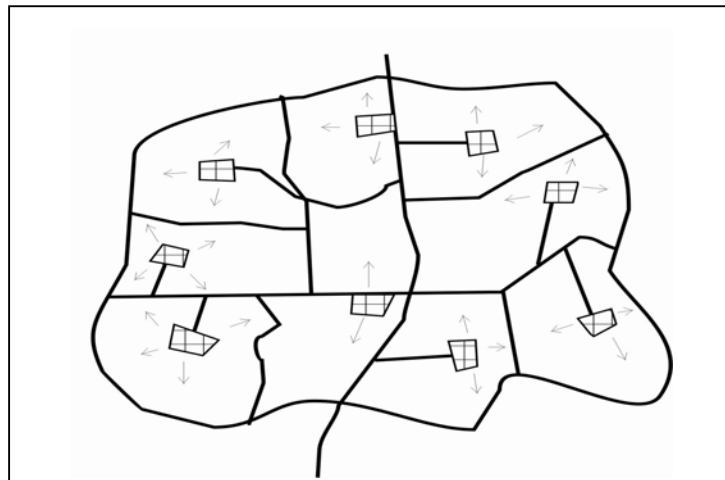


Sumber: Perencanaan Desa Dirjen Cipta Karya 1983

GAMBAR 2.1
BENTUK-BENTUK UMUM DESA

Bentuk desa sangat berpengaruh pada pengembangan dan penggalian sumber daya desa secara optimal. Sehingga diperlukannya perencanaan perkembangan secara bijaksana di dalam area permukiman.

Disamping bentuk desa, juga memperjelas pola desa, ciri-ciri pola desa di Kecamatan Jalan Cagak yaitu tersebar atau *scattered*. Perkembangan desa termotivasi orientasi ketempat bekerja di lapangan pertanian dengan maksud agar perjalanan ketempat bekerja tidak terlalu lama. Pola ini juga terdapat di perdesaan/ perkampungan perkebunan, karena terisolasi oleh kawasan perkebunan.



Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah, 1979

GAMBAR 2.2
BENTUK POLA DESA TERSEBAR

2.2.3 Hirarki Desa

Terbentuknya suatu tingkatan herarki dilihat dari ukuran jumlah penduduk desa, kemampuan daya pelayanan untuk masyarakat desa sendiri atau desa-desa. Berdasarkan tingkat kemajuan desa maka desa dapat di bagi menjadi tiga (3) golongan menurut tipologi kemajuan sosial, ekonomi desa kemampuan pembangunan, pembinaan dan pengolahan dan kemajuan perkembangan. Tipologi-tipologi desa (Departemen Dalam Negeri)menurut klasifikasi tingkat

perkembangan desa yaitu ; pra desa, desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada. Tipologi tersebut pada hakekatnya didasari oleh pertimbangan mengenai kemajuan sosial dan ekonomi desa kemampuan pembangunan, pembinaan dan pengelolaan dan kemajuan perkembangan.

Menurut Asy'ari (1993) yang dimaksud dengan tipologi desa teknik untuk mengenal tipe-tipe desa berdasarkan ciri-ciri menonjol (tipikal) yang dimiliki dalam kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan klasifikasi tingkat perkembangan desa berdasarkan kesamaan tingkat perkembangannya yaitu tahapan Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada.

1. *Desa Swadaya* (Tradisional)

Adalah Desa yang belum mampu mandiri dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa belum terselenggara dengan baik dan LKMD belum berfungsi dengan baik dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu.

2. *Desa Swakarya* (Transisional)

Adalah Desa setingkat lebih tinggi dari Desa Swadaya. Pada Desa Swakarya ini, mulai mampu mandiri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa sudah terselenggara dengan cukup baik dan LKMD cukup berfungsi dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara terpadu.

3. *Desa Swasembada* (Berkembang)

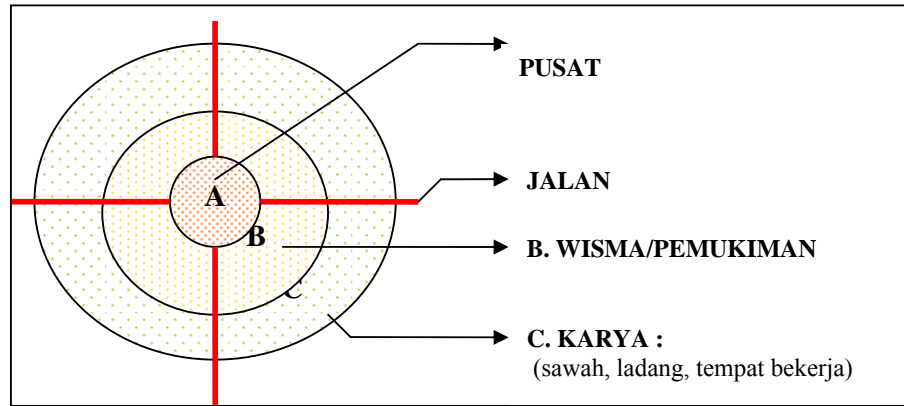
Adalah Desa setingkat lebih tinggi dari Desa Swakarya, Desa Swasembada adalah desa yang telah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa sudah terselenggara dengan baik dan LKMD telah berfungsi dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu.

2.2.4 Struktur dan Pola Tata Ruang Desa

Menurut Beratha (1991) tata ruang fisik desa sebenarnya adalah setiap potongan-potongan tanah yang digunakan berbagai macam tujuan, sehingga tercapai suatu pola yang harmonis antara pengembangan wilayah dan tata bangunan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya adalah :

- a. *Wisma* (perumahan) adalah lingkungan tempat tinggal penduduk dimana mereka memulai kegiatan kehidupannya.
- b. *Karya* adalah bidang pekerjaan penduduk dalam usaha memenuhi kehidupannya yang meliputi (1) kegiatan primer (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan), (2) kegiatan sekunder (kerajinan, pertukangan, pabrik dan industri lainnya), (3) kegiatan tertier (perdagangan dan jasa).
- c. *Marga* adalah prasarana perhubungan, transportasi dan komunikasi.
- d. *Suka* adalah tempat rekreasi, olah raga dan kesenian.
- e. *Penyempurna* adalah fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan antara lain: tempat beribadatan, pendidikan, kesehatan, perkantoran, kelistrikan dan lain sebagainya.

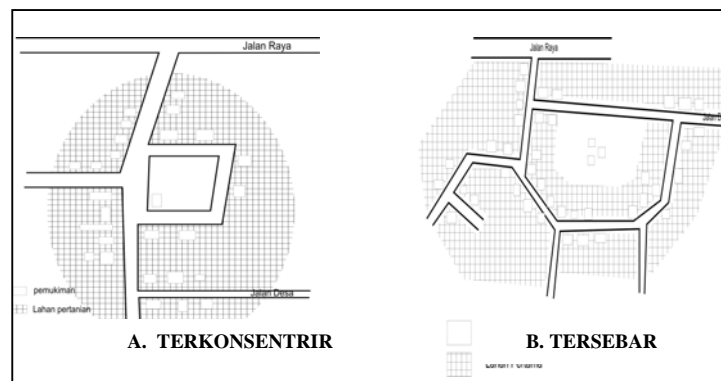
Untuk menyusun ruang fisik desa selain memperhatikan unsur-unsur *wisma*, *karya*, *marga*, *suka* dan *penyempurna* harus dapat memperhatikan perpaduan antara nilai letak, fungsi, nilai estetika, nilai sosial. Dengan ini semua diharapkan bahwa suatu desa dapat berjalan optimal.



Sumber : modifikasi dari Burgess 1925 dalam Daldjoeni 1991

GAMBAR 2.3
DIAGRAM TATA RUANG PEDESAAN KONSENTRIK

Pola tata letak adalah jarak antara tempat tinggal dan tempat bekerja. Di desa sebuah jarak umumnya ditentukan oleh kemampuan seseorang dengan jalan kaki. Sehingga faktor geografi di sebuah pedesaan sangat menentukan letak pemukiman.



Sumber : Pola Tata Desa (Sujarto 1979)

GAMBAR 2.4
POLA PEMUKIMAN PEDESAAN

Pada dasarnya daerah pemukiman penduduk pedesaan dapat dibagi menjadi dua (2) golongan yaitu;

- a) Pemukiman penduduk secara **terkonsentir** (berkelompok), perumahan penduduk berkumpul di suatu tempat.
- b) Pemukiman penduduk dengan perumahan yang **tersebar** pada daerah pertanian, dapat dilihat pada (gambar 2.4)

Bentuk pemukiman terkonsentir memiliki beberapa keuntungan dari segi keamanan dan kenyamanan karena memudahkan penyediaan fasilitas umum berada dekat dengan daerah pemukiman akan tetapi penduduk akan jauh ke tempat bekerja atau ke lahan pertaniannya. Sedangkan pemukiman tersebar, penduduk lebih mudah ke lahan pertaniannya, desa juga merasa lebih tenang karena jauh dari pusat pelayanan tetapi dalam menyediakan lokasi fasilitas umum lebih sukar karena jarak yang saling berjauhan.

2.2.5 Sosiologi Masyarakat Desa

Dari segi sejarah desa dengan norma yang dianut oleh warganya dapat diketahui strata tentang warga desa yaitu ada 4 kategori warga desa menurut Kartohadikusumo dalam Asy'ari (1990) yaitu; (1) mereka yang berasal dari turunan keluarga yang mendirikan desa (cikal bakal). Mereka adalah masyarakat pemilik tanah pertanian yang terbaik di desa; (2) mereka yang datang kemudian membuka tanah yang menjauhkan tempatnya dari pusat desa; (3) penduduk yang mempunyai tanah diatas perkarangan orang lain (menyewa); (4) orang-orang yang menumpang dalam rumah orang lain.

Tipe masyarakat desa pertanian, sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa memiliki sumber mata pencaharian pokok di bidang pertanian baik sebagai petani pemilik maupun buruh tani. Pada hakekatnya suatu keluarga petani dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sepenuhnya dalam melengkapi keperluan hidup pokoknya, mereka memproduksi pangannya sendiri, sekaligus mencakupi kebutuhan esensial lainnya seperti sandang, dan peralatan (Test Plan Pola Tata Desa 1978/1979)

Desa dan masyarakatnya terbentuk dengan sejarah dan kondisi lingkungan yang sangat bervariasi, sebagai ciri khas masyarakat desa tradisional yaitu kuatnya ikatan dengan alam, eratnya ikatan kelompok, gotong royong.

2.3 Tingkat Pelayanan Sarana Dasar

Pelayanan dasar yaitu fasilitas pelayanan dasar, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya (UU No. 4 /1992 Tentang Perumahan dan Permukiman). Fasilitas pelayanan dasar meliputi fasilitas sarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA), sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, balai kesehatan), dan prasarana jaringan jalan untuk menghubungkan dari ke setiap lokasi. Menurut Van Dusseldorp (1971) mengenai Pusat pertumbuhan dan Pelayanan Kecil di Pedesaan lebih mengutamakan fungsi –fungsi (a) pelayanan; (b) pemukiman; dan (c) ekonomi. Menurut beberapa literatur, pengertian dan jenis fasilitas sosial adalah sebagai berikut :

- Gedung, tanah, dan jasa yang melayani publik. Contoh fasilitas sosial adalah rumah sakit, sekolah, taman, kantor polisi dan pemadam kebakaran (Daniels. 1988).

- Komponen-komponen kota yang fungsi utamanya adalah penyediaan pelayanan yang sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah atau bersama-sama dengan pihak swasta (Tjahjaty,1990). Fasilitas sosial meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan.

Salah satu teori lokasi yang mendasari pendistribusian fasilitas lokasi adalah teori kedudukan pusat (*central place theory*) dari Walter Christaller (1966) (dalam Daldjoeni, 1987). Teori ini menyatakan bahwa setiap kegiatan yang akan menghasilkan barang dan jasa mempunyai pertimbangan ambang penduduk dan jangkauan pasar. Teori lokasi mempertimbangkan ambang penduduk (*threshold population*) yaitu jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan untuk kelancaran dan kesinambungan penawaran barang. Sedangkan jangkauan pasar (*range*) adalah jarak yang perlu ditempuh seseorang untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan.

Pendistribusian fasilitas juga terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penduduk dalam mengkonsumsi. Menurut Doxiadis (1968), dalam De Chiara kepuasan yang dapat diberikan oleh suatu pusat pelayanan bergantung pada jarak-waktu (*time-distance*) dan jarak-biaya (*cost-distance*).

Berdasarkan karakteristik fasilitas maka, dalam penentuan dan pendistribusian fasilitas sosial harus dipertimbangkan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan dan pendistribusian fasilitas sosial atau disebut juga pusat pelayanan, menurut Sujarto (1977), yaitu:

1. Faktor manusia yang akan mempergunakan pusat-pusat pelayanan. Faktor manusia terutama menyangkut pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan mempergunakan pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan dan antropologi.
2. Faktor lingkungan manusia melaksanakan kegiatan kehidupannya. Faktor lingkungan menyangkut pertimbangan mengenai skala lingkungan dalam arti fungsi dan peranan sosial ekonominya, jaringan pergerakan, letak geografis lingkungan dan sifat keterpusatan lingkungan.

Menurut Daniels (1988), kebutuhan fasilitas sosial tergantung pada banyak faktor, yaitu: (1) ukuran daerah perencanaan; (2) jumlah populasi penduduk, kepadatan, dan tingkat pertumbuhannya; (3) pendapatan lokal; (4) kapasitas dari fasilitas yang telah ada.

Tingkat pelayanan diukur berdasarkan (1) Pemenuhi kebutuhan layanan sarana dasar bagi wilayah yang memerlukan dilihat dari sisi *supply* dan *demand*; dan (2) Arah perkembangan wilayah. Ukuran pertama menunjuk seberapa area yang ada sudah terlanjur berkembang tetapi belum dilengkapi dengan layanan sarana dasar yang memadai. Sementara ukuran yang kedua adalah dalam kerangka area yang belum berkembang menjadi daya tarik.

Tingkat pelayanan dapat ditinjau dari lokasi untuk fasilitas sarana sosial yang merupakan pertimbangan efisiensi biaya. Lokasi penempatan fasilitas sosial mempertimbangkan kuantitas dan kualitas masyarakat penggunaannya. Disebut kualitas karena menyangkut sosio-kultural masyarakatnya sebagai contoh bila mata pencaharian masyarakatnya lebih banyak memiliki anak usia sekolah dasar

maka lebih banyak fasilitas pendidikan SD, sedangkan kuantitasnya adalah jumlah layanan yang sudah terlayani. Untuk itu, Jim Amos juga menekankan kepada manajer kota untuk mengetahui jumlah penduduk, perubahan ekonomi dan struktur sosial serta distribusi dan intensitas dan kegiatan utama kota (Devas and Rakodi, 1993).

Tingkat pelayanan dapat ditinjau dari jangkauan pelayanan masing-masing layanan kota/desa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada masing-masing komponen atau aspeknya. Jangkauan pelayanan untuk fasilitas sosial dapat diukur berdasarkan jarak capai dan area yang dilayani. Area yang dilayani tergantung pada penduduk yang akan dilayani sehingga model pelayanannya berjenjang. Sebagai ilustrasi pengadaan sarana fasilitas pendidikan dengan karakteristik fasilitas SLTP dan SLTA yang mampu menampung lebih banyak murid dibandingkan fasilitas SD dengan persyaratan penduduk ambang (rasio 1:3) artinya 1 sekolah lanjutan (4.800 penduduk ambang) setara dengan 3 sekolah dasar (1.600 penduduk ambang). Dengan pertimbangan ini maka jangkauan pelayanan pendidikan hanya dibatasi hanya dengan kapasitas dan jarak tempuh.

Dalam perencanaan layanan kota/desa yang menjadi pertimbangan utama adalah memenuhi kebutuhannya. Sehingga kata kunci. "apa yang dilayani, dimana yang dilayani, seberapa besar harus dipenuhi, bagaimana cara memenuhi" merupakan hal yang juga perlu dipahami. Berdasarkan skenario pengembangan kota (Dillinger. W, 1994), maka beberapa langkah untuk perencanaan layanan

kota yang dilakukan adalah:

- a. memperkirakan kebutuhan (*demand*)
- b. bagaimana penyediaan (*supply*) dengan mempertimbangkan daya layan, standard dan pola pelayanan saat ini
- c. strategi implementasinya yang berupa pembangunan utuh (*piece-meal*) atau sepotong-sepotong (*incremental*).

Menurut para ahli psikologi; Louis Thurstone, Rensis Likert sikap dan perilaku didefinisikan sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan (Azwar, 1995). Bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, yang dampaknya terbatas pada tiga hal yaitu (1) perilaku lebih banyak ditentukan oleh sikap spesifik; (2) perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga norma-norma (*subjective norms*); (3) sikap terhadap perilaku bersama norma subyektif membentuk intensi atau niat untuk berperilaku tertentu.

2.4 Teknik Optimasi

Optimasi yaitu mengupayakan agar suatu sumberdaya dapat digunakan secara optimal. **Optimasi** adalah suatu proses kolektif dalam mendapatkan suatu set kondisi yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang terbaik dari suatu situasi yang bersifat tertentu atau *given* (Beveridge dan Schechter, 1970). Tujuan dari optimasi adalah untuk melakukan seleksi dari sekian banyak alternatif solusi yang memungkinkan, sehingga dapat dihasilkan solusi yang terbaik, berkaitan dengan kriteria yang disyaratkan dalam optimasi tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kriteria menjadi suatu tahapan yang sangat penting dalam optimasi.

2.4.1 Kriteria –kriteria Optimasi Fasilitas

1. *Aspek Lokasi*

Mengacu pada Rushton, agar tercapai optimalitas spasial maka penempatan suatu fasilitas sosial (dalam hal ini meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan dan perdagangan) harus memperhatikan lokasi yang paling aksesibel. Pengertian paling aksesibel dalam hal ini dapat didekati dari dua pendekatan, yaitu :

- a. *Aggregate distance minimization/ aggregate distance criterion*, yaitu apabila jarak total rata-rata semua penduduk akan dilayani dari fasilitas terdekat adalah minimum.
- b. *Equal assignment criterion*, yaitu apabila jumlah penduduk yang akan dilayani di sekitar fasilitas terdekat kurang lebih sama.

Sujarto (1978) menyatakan, secara spesifik dalam penempatan fasilitas kesehatan dan hubungannya dengan perkembangan fisik wilayah dan kota, beberapa faktor perlu dipertimbangkan, antara lain distribusi kepadatan penduduk dan aksesibilitas. Dari segi perwilayahan

2. *Aspek Karakteristik Permintaan dan Kebutuhan dari Masyarakat*

Menurut Lawrence A. Brown (1974) untuk mengidentifikasi pengalokasian fasilitas-fasilitas pelayanan umum perlu ditetapkan karakteristik-karakteristik target penduduk yang akan dilayani.

Standar penyediaan jumlah sarana dasar ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378 /KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 Tanggal 31 Agustus 1987 dapat dilihat pada Tabel II.1.

TABEL II.1
STANDAR FASILITAS SOSIAL DAN EKONOMI

FASILITAS PENDIDIKAN		
JENIS	PENDUDUK USIA SEKOLAH	JANGKAUAN
1 Sekolah Dasar (SD) Kapasitas 1 unit = 240 murid (6 tingkat x 1 kelas x 40 murid)	Penduduk usia 7-12 tahun (% pdkk desa x (3/5 pdkk 5-9 th + 3/5 pdkk 10-14 th))	1.000 m
2 Sekolah Lanjutan Tingkat Petama (SLTP) Kapasitas 1 unit =480 murid (3 tingkat x 4 kelas x 40 murid)	Penduduk usia 13-15 tahun (% pdkk desa x (2/5 pdkk 10-14th + 1/5 pdkk 15-19 th))	1.000 m
3 Sekolah Lanjutan Tingkat Petama (SLTA) Kapasitas 1 unit =480 murid (3 tingkat x 4 kelas x 40 murid)	Penduduk usia 16-18 tahun (% pdkk desa x 3/5pdkk 15-19 th)	3.000 m
FASILITAS KESEHATAN		
JENIS	BATAS AMBANG PENDUDUK	JANGKAUAN
1 Posyandu	1.000 penduduk	200 m
2 Balai Pengobatan/Poliklinik	3.000 penduduk	400 m
3 Praktik Dokter	5.000 penduduk	1.000 m
4 BKIA	10.000 penduduk	400 m
5 Apotek	10.000 penduduk	1.000 m
6 Puskesmas Pembantu	30.000 penduduk (1 pusat permukiman)	1.000 m
7 Puskesmas Utama	120.000 penduduk (1 kecamatan)	

Sumber: Hasil Pengolahan Standar Fasilitas Departemen PU (1987)

2.4.2 Konsep Ruang Neighborhood Unit

Sir Ebenezer Howard (1850-1928) yang memperkenalkan konsep *neighborhood unit* untuk mengangkat sistem dan bentuk komunitas tradisional perdesaan sebagai komunitas ideal. Pada daerah yang tradisional masih terbagi dalam unit-unit pemukiman atau unit fungsional yang spesifik homogen, yaitu dikenal sebagai *neighborhood* tradisional yang diikat oleh ikatan sosial kekerabatan. Dalam konteks ini *neighborhood* merupakan suatu lingkungan spesifikasi yang homogen, dengan pengikat kegiatan yang sejenis dan hubungan kekerabatan.

Neighborhood unit diadaptasi oleh Clarence Perry pada tahun 1929 untuk merencanakan suatu lingkungan yang berlandaskan suatu pemikiran sosial psikologis agar dapat menjawab optimasi dengan mengatasi penurunan kualitas

kehidupan masyarakat di negara-negara industri saat itu. Perry mengidentifikasi *neighborhood unit* sebagai suatu unit pemukiman yang mempunyai batasan yang jelas yaitu: (1) ukuran atas dasar keefektifan jarak jangkauan pejalan kaki dan (2) adanya kontak langsung individual serta ketersediaan fasilitas pendukung kebutuhan pemukiman (Keating dan Krumholz 2000).

Dalam konsep *neighborhood unit* ini, dapat disimpulkan bahwa Perry mempunyai tujuan utama bagi sebuah lingkungan permukiman yang baik untuk membuat interaksi sosial di antara penghuni lingkungan permukiman, sedangkan penataan fisik lingkungan merupakan cara untuk tujuan utama tersebut (Golany, 1976).

Adapun prinsip yang dapat menentukan perencanaan pembentukan unit *neighborhood* yang lebih baik salah satunya dengan cara (1) *Prinsip Sharing System*, terjadinya tukar menukar pelayanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari pusat-pusat pelayanan yang ada dilingkungannya dan (2) *Prinsip Social Governance*, terjadinya pengaturan dan pengelolaan (Golany, 1984).

Sedangkan untuk menjamin dapat terlaksananya konsep *Neighborhood Uunit*, Perry membuat ketentuan persyaratan untuk terpenuhinya kebutuhan sosio-psikologis permukiman. Syarat tersebut adalah: (1) memiliki jarak layanan yang mudah dicapai dengan berjalan kaki, dimana daya jangkauan jarak layanan efektif setiap fasilitas pelayanan sosial akan mempengaruhi ukuran *neighborhood*; (2) Jumlah warga, yaitu ukuran jumlah anggota menghasilkan suatu ukuran kepadatan yang memungkinkan tingkat ikatan fisik dan skala komunitas tetap tinggi, dengan tetap menjaga keseimbangan dengan daya dukung alam.

2.5 Rangkuman Kajian Teori

Dari kajian teori diatas maka dapat disimpulkan dan dikaitkan dengan penelitian optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar Kota Kecamatan Jalancagak – Subang seperti di lihat pada tabel II.2 berikut ini:

TABEL II.2
RANGKUMAN KAJIAN TEORI OPTIMASI
POLA DAN TINGKAT PELAYANAN SARANA DASAR

No.	Sumber	Uraian	Kaitan dengan Penelitian	Variabel
1.	Blair (1991) (dalam Tarigan 2004)	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Homogen - Wilayah Fungsional - Wilayah Administratif 	Memberikan arahan tipe wilayah berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri di dalam wilayah studi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Homogenitas ▪ Penggunaan Lahan ▪ Geografi ▪ Batas administrasi
2.	Van Dusseldrop(1971) Tjahjaty(1990).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil pedesaan lebih mengutamakan fungsi-fungsi pelayanan, permukiman, dan ekonomi. ▪ Fasilitas sosial meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan. 	Memberikan batasan ruang lingkup mengenai pelayanan sarana dasar (kesehatan, pendidikan dan perdagangan) untu di wilayah pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebaran sarana sosial
3.	Beveridge dan Schecter (1970); Rushton G. (1979); Sujarto (1978); Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378 /KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 Tanggal 31 Agustus 1987	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimasi adalah suatu proses kolektif dalam mendapatkan suatu set kondisi yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang terbaik dari suatu situasi yang bersifat tertentu atau <i>given</i> ▪ Jarak minimum penduduk yang akan dilayani. ▪ Penempatan fasilitas dipertimbangkan dari kepadatan penduduk dan aksesibilitas. 	Melakukan seleksi sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik, berkaitan dengan criteria atau persyaratan dalam meng optimalkan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan hasil variabel-variabel terpilih dari pola dan tingkat pelayanan sarana dasar.

TABEL II.2 Lanjutan

No.	Sumber	Uraian	Kaitan dengan Penelitian	Variabel
4.	Dillinger, W, 1994; Devas, N & Rakodi, C, 1993	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pelayanan bertujuan untuk (1) memenuhi kebutuhan layanan kota bagi wilayah kota yang memerlukan dilihat dari sisi supply dan <i>demand</i>; dan (2) mengarahkan perkembangan kota. ▪ Jangkauan pelayanan masing-masing layanan kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda 	Dengan demikian dapat diberikan untuk analisis tingkat pelayanan secara umum mempertimbangkan: (1) kebutuhan saat ini; (2) proyeksi kebutuhan yang ada; (3) kemampuan maksimal kapasitas yang dapat dibangun atau yang ada; kontribusi yang dapat diharapkan khususnya dalam pengembangan kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan kebutuhan penduduk ▪ Jangkauan pelayanan
5.	Doxiadis (1968:309) dalam De Chiara, Sujarto (1977), Daniels (1988), Walter Christaller (1966),	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor pertimbangan jumlah penduduk yang akan mempergunakan pelayanan, kepadatan penduduk, status sosial ekonomi dan faktor lingkungan ▪ Kepuasan yang dapat diberikan oleh suatu pusat pelayanan bergantung pada jarak-waktu (<i>time-distance</i>) dan jarak-biaya (<i>cost-distance</i>). 	Menentukan kebutuhan tingkat pelayanan dasar berdasarkan (1) ukuran daerah; (2) jumlah penduduk; (3) pendapatan local; dan (4) kapasitas dari fasilitas yang sudah ada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak ▪ Waktu berjalan kaki ▪ Sebaran penduduk
6.	Louis Thurstone (1928) & Rensis Likert (1932) (<i>dalam Azwar 1995</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sikap didefinisikan sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan 	Dalam penelitian ini sikap perilaku masyarakat juga sebagai indikator optimasi tingkat kepuasan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perilaku dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang ada.
7.	Ruswurm (1987) Daldjoeni (2003), Bintarto (1975), Asy'ari (1993), Test Plan Tata Desa (1977)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan desa terdiri dari 3 unsur yaitu daerah, penduduk dan tata kehidupan. ▪ Desa dan masyarakat terbentuk dengan sejarah dan kondisi lingkungan yang tradisional. ▪ Tingkatan desa berdasarkan jumlah penduduk, kelengkapan fasilitas. 	Mengetahui pola, persebaran desa, tingkatan desa, komponen-komponen desa, sosiologi berdasarkan hubungan dengan kebutuhan pelayanan dasar untuk skala kecamatan dan desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola pemukiman ▪ Pola desa ▪ Tipologi desa ▪ Sosiologi masyarakat desa ▪ Hirarki desa

TABEL II.2 Lanjutan

No.	Sumber	Uraian	Kaitan dengan Penelitian	Variabel
8	Sir Ebenezer Howard (1850-1928) Clarence Perry(1929) Golany (1984)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ konsep neighborhood <i>unit</i> , dapat disimpulkan bahwa Perry mempunyai tujuan utama bagi sebuah lingkungan permukiman yang baik untuk membuat interaksi sosial di antara penghuni lingkungan permukiman, sedangkan penataan fisik lingkungan merupakan cara untuk tujuan utama. ▪ Prinsip <i>neighbourhood unit</i> (1) <i>Prinsip Sharing System</i>, terjadinya tukar menukar pelayanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari pusat-pusat pelayanan yang ada dilingkungannya dan (2) <i>Prinsip Social Governance</i>, terjadinya pengaturan dan pengelolaan 	Sebagai parameter besaran <i>neighbourhood</i> diturunkan dari ukuran efesiensi jarak tempuh pejalan kaki antara rumah dengan fasilitas pelayanan. Berdasarkan prinsip <i>neighbourhood</i> dapat digunakan sebagai rencana optimasi penelitian ini.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jangkauan ▪ Jumlah penduduk ▪ Lingkungan

Sumber: Hasil Rangkuman Teori

Berdasarkan hasil rangkuman teori ditemukan beberapa variabel yang dapat digunakan dalam penelitian optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar Kota Kecamatan Jalancagak. Variabel-variabel yang terpilih meliputi: kondisi geografi berdasarkan homogenitas, penggunaan lahan, pola desa, tipologi desa, jumlah dan sebaran penduduk, sebaran pelayanan dan transportasi, jangkauan pelayanan, kapasitas dan kebutuhan sarana dasar yang dibutuhkan, dan kecenderungan masyarakat. Lebih jelasnya lagi variabel-variabel terpilih untuk penelitian optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar dapat dilihat pada sub bab berikutnya.

2.6 Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian. Variabel dibedakan atas kuantitatif dan kualitatif. Pemisahan jenis variabel ini sangat penting untuk menentukan teknik analisis datanya, karena jenis variabel menentukan jenis datanya (Arikunto,2000:111)

Variabel-variabel juga saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Fenomena sosial dapat dijelaskan dan diramalkan apabila hubungan antar variabel tertentu telah diketahui. penentuan variabel penelitian yang dapat diukur dan perumusan hubungan antara variabel adalah dua langkah yang sangat penting dalam penelitian sosial (Singarimbun, 1989:48).

Salah satu hal yang penting didalam suatu penelitian adalah perumusan atau pembuatan variabel penelitian. Menurut Masri.S (1989), variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, variabel yang akan dikaji merupakan variabel-variabel yang memiliki hubungan terhadap proses perkembangan **Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar Kecamatan Jalancagak - Subang**. Untuk jelasnya lihat pada Tabel II.3.

TABEL II.3
VARIABEL PENELITIAN

No	Analisis	Sub variabel	Sasaran	Jenis Data
1.	Pola Perwilayahan	Fisik dasar wilayah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geografi ▪ Penggunaan Lahan ▪ Batas adminstrasi ▪ Homogenitas ▪ Tipologi Desa ▪ Pola Pemukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pola wilayah (Peter Hagget dalam Bintarto 1987) pola desa dalam satu kesatuan wilayah dapat diketahui bentuk <i>uniform</i> $T=2,15$ <i>random</i> $T=1$ dan <i>cluster</i> $T=0$ di melalui metode <i>Nearest Neighbour Statistic</i>. 2. Mendapatkan wilayah homogenitas berdasarkan ciri-ciri dominasi penggunaan lahan. 3. Mendapatkan tipologi desa-desa dan pola pemukiman di dalam wilayah studi. 	<u>Sekunder</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kabupaten Subang. ▪ Peta Kota Kecamatan Jalancagak <u>Primer</u> : Observasi
2. 3.	Pola Pelayanan Sarana Dasar dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar	Sosial : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola Pertumbuhan Penduduk. ▪ Pola Persebaran Penduduk Kecamatan Jalancagak. Pola: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebaran Transportsi ▪ Sebaran Pelayanan ▪ Jangkauan Pelayanan Tingkat Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecenderungan masyarakat. ▪ kapasitas yang ada ▪ Kebutuhan kapasitas 	Pola Pelayanan Sarana Dasar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan sebaran transportasi sebagai penunjang aksesibilitas ke pelayanan. 2. Mendapatkan sebaran sarana dasar didalam wilayah studi 3. Mendapatkan jarak jangkauan pemukiman ke sarana berdasarkan metode <i>Next Oppurtunity Matix</i>. Tingkat Pelayanan Sarana Dasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan perilaku masyarakat terhadap sarana pelayanan di wilayah studi. 2. Mendapatkan jumlah kapasitas yang ada dan kebutuhan berdasarkan Kepmen PU.1987 	<u>Primer</u> : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi visual ▪ Kuisisioner <u>Sekunder</u> : <ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA ▪ Kecamatan Dalam Angka 2004 ▪ Kepmen PU 1987
4.	Opimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar	Hasil dari Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar dantinjauan Arahan Kebijakan RDTR Kota Kecamatan Jalancagak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan kategori desa-desa berdasarkan optimal, cukup optimal dan kurang optimal yang dilakukan dengan menggunakan metode skoring pembobotan. 2. Merencanakan optimasi untuk desa yang kurang optimal dengan pendekatan prinsip <i>Neighborhood Unit</i>. 	<u>Primer</u> : Observasi visual <u>Sekunder</u> RDTR

Sumber : Hasil Analisis, 2006

BAB III

KONDISI UMUM PELAYANAN SARANA DASAR KOTA KECAMATAN JALANCAGAK-SUBANG

Tinjauan Internal Wilayah Penelitian Kota Kecamatan Jalancagak

Pendekatan kewilayahan dalam pembangunan perdesaan dengan memadukan semua aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara fungsional dan spasial. Keterpaduan fungsional mencakup semua kegiatan sosial-ekonomi yang mempengaruhi kehidupan penduduk, termasuk kesehatan, pendidikan dan perdagangan. Sehingga dibutuhkan tinjauan internal untuk mengetahui kondisi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar dari wilayah Kecamatan Jalancagak sehingga dapat diketahui potensi dan kendala yang ada di Kecamatan Jalancagak. Tinjauan internal yang mempengaruhi pola dan optimasi tingkat pelayanan sarana dasar di wilayah Kecamatan Jalancagak meliputi perwilayahan, wilayah administratif, wilayah homogen, letak geografi, tata guna lahan, sebaran penduduk, sebaran permukiman, tingkat pendidikan, jumlah sarana pelayanan dasar dan sebaran pelayanan dasar di wilayah studi .

Kondisi Perwilayahan Kecamatan Jalancagak

Kecamatan Jalancagak merupakan suatu wilayah yang memiliki keterbatasan fisik dalam pengembangannya, namun dengan posisi yang strategis serta potensi kondisi fisik alamnya yang sesuai untuk perkebunan dan pertanian justru mendukung pengembangan wilayah. Kecamatan Jalancagak secara keruangan dalam batasan jarak fisik, ini mencakup radius sekitar 16 kilometer dari

Kota Subang sehingga kecamatan Jalancagak merupakan *outer fringe* mencakup radius sekitar 25 kilometer dari Kota Subang Wilayah Subang Selatan termasuk didalamnya, hal ini bersamaan dengan teori Russwurm (1987).

Kecamatan Jalancagak mempunyai fungsi dominan yang dapat dikenali sebagai pemasok dan pengendali air Subang, pemasok produk pertanian dan perkebunan, dan pusat rekreasi dan pariwisata, penampung perkembangan permukiman, serta kawasan konservasi sumberdaya hayati. Oleh sebab itu untuk memahami karakteristik fisik wilayah Kecamatan Jalancagak akan dianalisis dalam konteks regional sebagai bagian dari wilayah Subang Selatan yang berbatasan dengan Bandung Utara.

Pada bagian analisis wilayah Kecamatan Jalancagak ini akan dikemukakan bahwa Kecamatan Jalancagak sebagai bagian dari wilayah Subang Selatan mempunyai fungsi-fungsi secara fisik, yaitu sebagai Kawasan Budidaya Perkebunan dan Kebun Campuran serta sebagai Kawasan Konservasi bagi wilayah Subang.

Berdasarkan wilayah administratif Kecamatan Jalancagak sebagai dasar kebijakan pembagian wilayah pedesaan terbagi oleh 5 Bagian Wilayah Kota sebagai penentu perkembangan wilayah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan, pusat koleksi distribusi hasil pertanian, pusat perhubungan antar kota dan pengembangan pariwisata (RDTR Jalancagak 2001).

Wilayah Administratif

Kecamatan Jalancagak berada di selatan Kabupaten Subang yang memiliki luas wilayah sebesar 8.578 Ha yang sebagian besar penggunaan lahan

diperuntukan sebagai pertanian dan perkebunan (2.478,80%). Kecamatan Jalancagak secara administratif memiliki 17 desa. Fungsi wilayah Berdasarkan RUTRK Kecamatan Jalancagak (Tahun 2001). Kota Jalancagak terbagi ke dalam lima (5) Bagian Wilayah Kota (BWK) yang meliputi lima (5) desa yaitu Desa Jalancagak, Desa Bunihayu, Desa Tambakan, Desa Sarireja dan Desa Curugrendeng, dengan luas Total 2.484 Ha dan memiliki fungsi seperti pada Tabel III.1 di bawah ini. Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dapat dilihat pada gambar 3.1 dan gambar 3.2.

TABEL III.1
FUNGSI BAGIAN WILAYAH KOTA JALANCAGAK

BWK Jalancagak	BWK Bunihayu	BWK Curugrendeng	BWK Tambakan	BWK Sarireja
<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan sosial ekonomi skala WP, kecamatan, kota dan desa, • Pusat permukiman, • Pertanian lahan basah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan sosial ekonomi desa, • Kebun campuran. • Daerah konservasi lindung, • Permukiman, • Pertanian lahan basah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan sosial ekonomi desa, • Pertanian lahan basah • Kebun campuran dan perkebunan • Permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan sosial ekonomi desa, • Kebun campuran dan perkebunan, • Permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan sosial ekonomi desa, • Kebun campuran dan perkebunan, • Permukiman, lahan basah.

Sumber: RDTR Jalancagak Tahun 2001

Dari data yang didapat maka pusat pelayanan sosial dan ekonomi di Kecamatan Jalancagak berada di BWK Jalancagak yang berfungsi melayani skala yang lebih besar yaitu untuk wilayah pengembangan, kecamatan, kota dan desa. Hasil observasi dilapangan BWK Jalancagak memiliki fasilitas sarana dan prasarana terlengkap dari segi sosial (kesehatan, pendidikan TK,SD,SLTP dan SLTA) dan didukung oleh jalur transportasi dan moda.

Gambar 3.1
Peta orientasi Kecamatan Jalancagak-Subang

Gambar 3.2
Peta Kecamatan Jalancagak

Semakin besar peranan fungsi serta kemampuan pelayanan suatu desa akan membentuk beberapa kumpulan desa yang berada dibawah pengaruh dari desa yang memiliki kelengkapan pelayanan. Pada Kota Kecamatan Jalancagak terlihat berdasarkan susunan hirarki tertinggi terletak pada desa Jalancagak yang juga berstatus sebagai Ibu Kota Kecamatan yang memiliki fungsi tingkat pelayanan sosial ekonomi untuk skala kota, kecamatan, desa dan desa-desa lainnya. Hal ini juga dapat dilihat pada (Tabel III.2) hasil survai kelengkapan sarana dan prasana yang ada di wilayah Kecamatan Jalancagak menurut hirarki desa dengan berdasarkan hipotesa hasil survai Kota Kecamatan Jalancagak melalui kelengkapan komponen desa berdasarkan hirarki tingkat desa.

TABEL III.2
KELENGKAPAN KOMPONEN DESA DI KECAMATAN JALANCAGAK
TAHUN 2004

Komponen Desa		Desa				
		Jalancagak	Bunihayu	Curug rendeng	Sarireja	Tambakan
WISMA	Perumahan-perumahan	✓	✓			
	Perumahansemi permanen	✓	✓	✓	✓	✓
	Perumahan Temporer	✓	✓	✓	✓	✓
KARYA	Sawah/ kebun	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengolahan	✓				
	Lumbung	✓	✓	✓	✓	✓
	KUD	✓				
	Padangpengembala ternak	✓	✓	✓	✓	
	Kecamatan	UDKP	✓			
	Desa		✓	✓	✓	✓
MARGA	Jalan antar desa	✓	✓	✓	✓	✓
	Jalan internal desa	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminal	✓				
SUKA	Bale desa	✓	✓	✓	✓	✓
	Pasar	UDKP	✓			
	Pasar mingguan		✓			
	Pertokoan	✓	✓			✓
	Warung	✓	✓	✓	✓	✓
	Lapangan terbuka	✓	✓	✓	✓	✓
Lapangan olah raga	✓	✓	✓	✓		

TABEL III.2 Lanjutan

Komponen Desa		Desa				
		Jalancagak	Bunihayu	Curugrendeng	Sarireja	Tambakan
PENYEMPUR NA	Peribadatan	✓	✓	✓	✓	✓
	Puskesmas	✓	✓	✓	✓	✓
	Puskesmas pembantu	✓	✓			
	Pos yandu	✓	✓	✓	✓	✓
	Toko obat	✓				
	TK	✓	✓	✓	✓	✓
	SD	✓	✓	✓	✓	✓
	SLTP	✓				✓
	SLTA	✓				

Sumber: Hasil Survei Desa di Kota Kecamatan Jalancagak 2005

Perbedaan jenjang ini akan terlihat perbedaan lingkup pelayanan secara fungsional maupun kelengkapan fasilitas serta komponen kegiatan yang tersedia disetiap desa. Jadi dalam hubungan kelengkapan dari 5 komponen untuk sarana pelayanan akan semakin lengkap ketersediaan maupun kualitas dari komponen-komponen kegiatan fungsional, sehingga semakin tinggi hirarki desa di Kecamatan Jalancagak yaitu desa Jalancagak akan semakin besar lingkup daya layanannya karena sebagai pelayanan bagi desa-desa lainnya yang fasilitasnya belum lengkap.

Data tingkatan jenjang suatu desa (hirarki) yang diperoleh di Kota Kecamatan Jalancagak berdasarkan tingkat kemajuan, desa-desa didalamnya terbagi dalam tipologi desa swadaya dan desa swakarya hal ini dapat dilihat pada (Tabel III.3).

**TABEL III.3
HIRARKI DESA DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK**

No	Tipologi Desa	Hirarki Desa	Desa
1	Desa Swadaya	Desa Madya	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Curugrendeng • Desa Sarireja
2	Desa Swakarya	Desa Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Bunihayu • Desa Tambakan
3	Desa Swasembada	Kota Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Jalancagak

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Subang 2004

Wilayah Homogen

Kecamatan Jalancagak merupakan wilayah homogen, menurut Blair (1991) dapat dilihat dari aspek sumber daya alam (iklim, tanah dan vegetasi), sosial, dan ekonomi. Wilayah kecamatan Jalancagak yang terletak di daerah pegunungan dan dataran berfungsi sebagai wilayah perkebunan dan rata-rata penduduk bekerja sebagai petani maupun buruh perkebunan. Suku etnis penduduk di desa-desa Kecamatan Jalancagak berasal dari suku Sunda, 90% masyarakat yang tinggal merupakan hasil turunan asli warga Kecamatan Jalancagak.

Berdasarkan homogenitas, mayoritas penggunaan lahan di wilayah studi adalah perkebunan teh dan kebun campuran. Hal ini banyak terdapat di Desa Curugrendeng, Desa Tambakan dan Desa Sarireja. Sehingga pada umumnya untuk desa Bunihayu, desa Curugrendeng, desa Tambakan dan desa Sarireja dapat diambil dari teori Bintarto (1983) bahwa, wilayah pedesaan merupakan hasil perpaduan erat antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Kecirikan fisik ditandai dengan pemukiman yang tidak padat, sarana dan prasarana transportasi yang langka, penggunaan tanah untuk persawahan dan pertanian.

Kondisi Geografis

Topografi Kecamatan Jalancagak cukup bervariasi meliputi daerah pegunungan dan dataran. Dilihat dari kemiringan lerengnya sekitar 38 % merupakan wilayah yang mempunyai kemiringan lereng antara 15 – 40 % meliputi Desa Curugrendeng, Desa Sarireja, sekitar 32 % merupakan wilayah yang mempunyai kemiringan antara 2 – 15 % yaitu meliputi Desa Jalancagak dan

sebagian Desa Tambakan dan sekitar 30 % merupakan wilayah yang mempunyai kemiringan > 40 % yaitu meliputi Desa Bunihayu dan sebagian Desa Tambakan.

TABEL III.4
KEMIRINGAN LERENG KECAMATAN JALANCAGAK

NO	Tingkat Kemiringan Lahan		Luas (Ha)	%	Desa
	%	deskripsi			
1	2-15	Landai	227,00	32	▪ Jalancagak
2	15-25	Agak curam	935,00	38	▪ Curugrendeg ▪ Sarireja
3	25-40	Curam	1.330,70	30	▪ Bunihayu ▪ Tambakan

Sumber : Diolah dari data Dinas Penataan Ruang Kabupaten Subang

Dengan dominannya kemiringan 15-25% menunjukkan bahwa Kota Kecamatan Jalancagak merupakan daerah berbukit bergelombang hingga curam sehingga memiliki beberapa keterbatasan dalam pengembangan fasilitas sarana sosial dan ekonomi. Penempatan penggunaan lahan harus disesuaikan agar tidak terjadi limitasi bagi pengembangan wilayah.

Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di wilayah Kota Kecamatan Jalancagak meliputi lahan terbangun dan lahan non terbangun. Lahan terbangun terdiri dari lahan permukiman (10,32 %) beserta sarana dan prasarananya (21.36 %) dan lahan non terbangun meliputi lahan pertanian seperti sawah, perkebunan dan hutan. Penggunaan lahan lebih dominan sebagai pertanian (sawah 34,14 %, sawah non teknis 13,29%) dan perkebunan (20,50%) dapat dilihat pada Tabel III.5. Pada wilayah ini dominasi lahan pertanian dan perkebunan dimanfaatkan sebagai sektor unggulan. Sektor ini untuk mendukung keseimbangan lingkungan Kota

Kecamatan Jalancagak dan wilayah Selatan Kabupaten Subang, juga merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk.

TABEL III.5
JENIS PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK
TAHUN 2004

	Jenis Penggunaan Lahan	Desa					Total	%
		Tambakan	Bunihayu	Jalancagak	Curug Rendeng	Sarireja		
1	Pemukiman	42,20	30,00	52,14	68,57	63,50	256,41	10,32
2	Sawah	306,66	161,34	62,36	276,58	75,42	847,94	34,14
3	Sawah non irigasi	47,00	101,05	-	182,11	-	330,16	13,29
4	Kuburan	3,00	1,50	2,40	1,01	0,35	8,26	0,33
5	Kebun	-	406,20	63,00	11,30	28,73	509,23	20,50
6	Empang	0,14	0,51	-	0,65	-	1,3	0,06
7	Lainnya	63,00	107,40	83,10	201,78	41,00	530,70	21,36
		462,00	808,00	263,00	742,00	209,00	2484,00	100,00

Sumber : Kecamatan Jalancagak Dalam Angka Tahun 2004

Kawasan pemukiman terlihat memusat di desa Curugrendeng dan Sarireja yang memiliki dominasi peruntukan lahan pertanian sehingga penduduk lebih mudah dalam pencapaian ke lokasi pekerjaan. Peruntukan lahan yang dominan sebagai perkebunan dan pertanian diperlukan lokasi yang tepat untuk menempatkan fasilitas sarana sosial dan ekonomi agar berfungsi secara optimal.

Karakteristik Sosial

Untuk mengetahui tingkat pelayanan sarana dasar dalam penelitian ini dibutuhkan data-data sebagai penunjang untuk mengetahui tingkat kualitas sumber daya manusia di Kota Kecamatan Jalancagak sebagai pengguna pelayanan sarana dasar. Data yang dibutuhkan adalah (1) jumlah dan kepadatan penduduk, (2) komposisi umur, (3) tingkat pendidikan dan (4) mata pencaharian.

a. Kepadatan Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduknya, Desa Jalancagak mempunyai kepadatan paling tinggi dibandingkan dengan desa lainnya yaitu 28 jiwa/ha dengan kondisi fisik wilayah yang landai dan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan sosial dan ekonomi sehingga kecenderungan penduduk untuk tinggal di desa yang memiliki sarana yang lebih lengkap. Desa Sedangkan Desa Bunihayu mempunyai kepadatan yang paling rendah yaitu 6 jiwa/ha, sesuai dengan kondisi fisik wilayah yang memiliki tingkat kemiringan >40% (curam) dan peruntukan lahan di dominasi sebagai perkebunan. Kepadatan penduduk per desa dapat dilihat pada Tabel III.6.

TABEL III.6
KEPADATAN PENDUDUK PER DESA
DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK TAHUN 2004

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Jalancagak	7.249	263,00	27,60	28
2	Bunihayu	4.917	808,00	18,72	6
3	Tambakan	5.490	462,00	20,90	12
4	Sarireja	2.830	209,00	10,77	13
5	Curugrendeng	5.783	742,00	22,01	8
J u m l a h		26.269	2.484,00	100,00	67

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2004

b. Struktur Penduduk Menurut Komposisi Usia

Jumlah penduduk pada komposisi usia 0-19 tahun lebih dominan di Kota Kecamatan Jalancagak seperti tampak pada (Tabel III.7) hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk alami dengan angka kelahiran yang meningkat sebesar 3,12 % pertahun diatas angka pertumbuhan penduduk alami secara nasional yakni 2-2,5% jumlah pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada (Tabel III.8).

TABEL III.7
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK TAHUN 2004

No	Kelompok Umur	Nama Desa					Jumlah
		Bunihayu	Curugrendeg	Jalancagak	Sarireja	Tambakan	
1	0-5	319	365	1.006	299	305	2.294
2	5-9	381	520	926	417	546	2.790
3	10-14	415	588	758	279	591	2.631
4	15-19	387	659	892	274	599	2.811
5	20-24	384	632	464	155	446	2081
6	25-29	380	501	375	141	339	1736
7	30-34	393	469	353	128	310	1653
8	35-39	401	320	311	92	317	1449
9	40-44	388	262	307	87	315	1359
10	45-49	401	333	482	145	540	1901
11	50-54	259	322	307	106	327	1321
12	55+	809	804	1.068	707	855	4243
	Jumlah	4.917	5.783	7.249	2.830	5.490	26.269

Sumber: Monografi KantorKecamatan Jalancagak 2004

TABEL III.8
PERSENTASE PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA KECAMATAN
JALANCAGAK TAHUN 2000 – 2004

No	Desa	Jumlah Penduduk		Rate Pertumbuhan (%)
		Tahun 2000	Tahun 2004	
1	Bunihayu	4145	4917	4.66
2	Curugrendeng	4954	5783	4.18
3	Jalancagak	6396	7249	3.33
4	Sarireja	2825	2830	0.04
5	Tambakan	4832	5490	3.41
	Jumlah total	23152	26269	3.12

Sumber: Monografi KantorKecamatan Jalancagak 2004

Sedangkan pada komposisi usia 19-54 jumlah penduduk kecamatan Jalancagak menurun yang berarti akan meningkatkan beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif kepada penduduk usia produktif tersebut, seperti tampak pada Table III.9.

TABEL III.9
ANGKA KETERGANTUNGAN MENURUT KELOMPOK UMUR
PRODUKTIF DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK TAHUN 2004

Kelompok umur	Tahun 2004 (Jumlah Jiwa)
	(%)
0-14	7.715
	(29, 37)
15 -54	12.990
	(49, 45)
55<	5.564
	(21, 18)
Angka ketergantungan	102, 22

Sumber: Monografi KantorKecamatan Jalancagak 2004

Bila melihat angka ketergantungan yang sangat besar (102,22 %) maka jumlah angkatan kerja non produktif jauh lebih banyak dari produktif. Kondisi ini berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan yang cukup rendah. Hal ini terkait dengan masyarakat yang umumnya adalah tamatan SD dan masyarakat yang sulit melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, serta usia penduduk sekolah yang tidak sekolah. Sehingga kemungkinan besar terdapat indikasi pengangguran kelompok usia sekolah dan meningkatnya tenaga kerja pada sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian dominan masyarakat kecamatan Jalancagak. Dilain pihak dominannya kelompok usia sekolah 5-19 tahun yang tidak sekolah dapat menyebabkan bertambahnya pengangguran, hal ini dikarenakan aspek sarana dan prasarana, kelengkapan jumlah sekolah tingkatan selanjutnya jumlah sarana pendidikan sangat terbatas di kecamatan Jalancagak, sehingga mereka melanjutkan pendidikan di sekolah kemampuan kapasitas yang masih kurang, sehingga penduduk kecamatan Jalancagak pada kelompok usia ini diasumsikan masuk pasar kerja dan kemungkinan dapat berakibat terjadinya surplus tenaga kerja pada mata pencaharian pertanian maupun perkebunan.

c. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dilihat dari struktur penduduk menurut tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk di wilayah studi adalah tamatan SD yaitu sekitar 70,81 %, disusul kemudian oleh tidak tamat SD sejumlah sekitar 13,10 % dan tamatan SLTP sekitar 9,72 % (lihat Tabel III.10). Rata-rata SDM di Kota Kecamatan Jalancagak relatif cukup rendah dilihat dari dominasi penduduk yang hanya lulusan SD. Hal ini perlu ditinjau kembali kebutuhan fasilitas sarana pendidikan di wilayah ini dan jumlah usia anak sekolah yang masih memerlukan pelayanan sarana pendidikan di setiap tingkat (SD, SLTP dan SLTA).

TABEL III.10
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2004

No	Tingkat Pendidikan	Jalan Cagak	Bunihayu	Curug rendeng	Sarireja	Tambakan
1	Tidak Tamat SD	678	577	583	399	590
2	Tamat SD	3531	3218	3376	1709	3458
3	Tamat SLTP	1030	411	401	133	121
4	Tamat SLTA	783	156	281	51	86
Jumlah		6022	4362	4641	2292	4255

Sumber :Kecamatan Dalam Angka Tahun 2004

d. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Dilihat dari jumlah penduduk menurut mata pencapaian, penduduk kota kecamatan Jalancagak sebagian besar penduduk di wilayah studi bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yaitu sekitar 73,72 %, sesuai dengan dominasi fungsi lahan perkebunan dan pertanian sebagai area tempat mata pencapaian penduduk. Disusul kemudian oleh sektor jasa (11,5%) dan perdagangan (4,61%) yang merupakan fungsi kewilayahan sebagai pusat pelayanan bagi seluruh desa-desa di wilayahnya.

TABEL III.11
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STRUKTUR MATA PENCAHARIAN
TAHUN 2004

No	Sektor/ Subsektor	Jalan cagak	Bunihayu	Curug rendeng	Sarireja	Tambakan	Jml	%
1	Perkebunan/ pertanian	2.388	1.555	1.998	1.105	1.482	8.528	73,72
2	Pertambangan	39	25	25	4	25	118	1,1
3	industri	17	27	19	29	81	173	1,7
4	Perdagangan	232	76	69	39	98	514	4,61
5	Angkutan	246	67	156	57	16	542	4,9
6	Lembaga keuangan	3	2	2	-	-	5	0,5
7	Jasa	569	130	249	154	178	1.280	11,5
							11.160	100

Sumber : Profil Desa Tahun 2004 Kec Dalam Angka Tahun 2004

Aspek Transportasi

Sistem transportasi yang digunakan di Kota Kecamatan Jalancagak adalah sistem transportasi darat. Sistem transportasi ini selain melayani pergerakan penumpang dalam kota juga melayani pergerakan penumpang ke luar kota. Kota Kecamatan Jalancagak yang terletak di selatan Kabupaten Subang merupakan jalur alternatif pergerakan Kota Bandung-Kota Jakarta via Kota Subang, sehingga pada hari libur intensitas jalur transportasi di wilayah Kota Kecamatan Jalancagak relatif tinggi.

1. Prasarana Transportasi

A. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang terdapat di Kota Jalancagak berdasarkan statusnya adalah sebagai berikut :

1. Jalan Propinsi yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Subang,
2. Jalan Kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Jalancagak dengan Kecamatan Sagalaherang.

3. Jalan Desa yang menghubungkan desa-desa di dalam wilayah Kecamatan Jalancagak

B. Terminal

Terminal yang ada di Kota Jalancagak merupakan sub-terminal, dimana pada saat ini terdapat 2 lokasi sub-terminal yaitu sub-terminal Pasar Jalancagak dan sub-terminal Desa Jalancagak. Terminal Pasar Jalancagak mempunyai daya tampung 10 kendaraan roda empat, sedang terminal Desa Jalancagak mempunyai daya tampung 20 kendaraan roda empat.

2. Sarana Transportasi

Sarana angkutan regional maupun lokal yang berperan di Kota Kecamatan Jalancagak adalah bis dan minibis yang melayani angkutan regional serta minibis dan pick up jenis angkutan kota dan pedesaan melayani angkutan lokal. Trayek angkutan umum yang terdapat di Kecamatan Jalancagak meliputi angkutan kota dalam kabupaten, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

Aspek Sarana dan Prasarana

1. Sarana Sosial Ekonomi

A. Pendidikan

Jenis sarana pendidikan di wilayah penelitian saat ini meliputi TK, SD, SLTP dan SLTA. Total jumlah sarana pendidikan pada Tahun 2004 berjumlah 24 unit. Persebaran sarana pendidikan dapat dilihat pada Tabel III.12. Kelengkapan fasilitas sarana pendidikan tingkat dasar (SD) dan tingkat menengah (SLTP dan SLTA) berada di desa Jalancagak, yang merupakan sebagai pusat pelayanan bagi

Kecamatan Jalancagak dalam skala kecamatan, kota dan desa. Jumlah sarana pendidikan di Kota Kecamatan Jalancagak dapat dilihat pada table III.7.

TABEL III.12
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN TAHUN 2004

No	Jenis Pendidikan	Jalancagak	Bunihayu	Curugrendeng	Sarireja	Tambakan	Jml
1	TK	2	1	1	1	1	6
2	SD	5	4	2	2	2	15
3	SLTP	1	-	-	-	1	2
4	SLTA	1	-	-	-	-	1

Sumber : Profil Desa Tahun 2004

B. Kesehatan

Sarana kesehatan di wilayah Kota Kecamatan Jalancagak berjumlah 34 unit yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit bersalin/ BKIA, posyandu, balai pengobatan/poliklinik dan praktek dokter yang semua berada di orientasi pusat pelayanan yaitu desa Jalancagak. Sedangkan fasilitas sarana kesehatan di desa-desa lain tidak selengkap seperti di desa Jalancagak dikarenakan penyediaan sarana kesehatan mengikuti jumlah ambang batas penduduk yang akan dilayani. Penyebaran sarana kesehatan di wilayah studi dapat dilihat pada Tabel III.13.

TABEL III.13
JUMLAH TEMPAT PELAYANAN SARANA KESEHATAN TAHUN 2004

No	Jenis Sarana	Jalancagak	Bunihayu	Curugrendeng	Sarireja	Tambakan	Jml
1	RSB/BKIA	1	-	-	-	-	1
2	Puskesmas	1	-	-	-	-	1
3	P. Pembantu	-	1	-	-	-	1
4	Posyandu	5	6	5	4	4	24
5	Balai pengobatan	1	1	-	-	-	2
6	Praktik dokter	5	-	-	-	-	5
							34

Sumber : Profil Desa Tahun 2004

C. Perekonomian

Sarana perekonomian yang tersedia disetiap desa-desa yang ada di Kota Kecamatan Jalancagak meliputi kios/warung. Sedangkan untuk sarana perekonomian yang lebih spesifik seperti pasar, toko dan cenderung berada di kawasan pusat pelayanan yaitu berada di desa Jalancagak. Penyebaran sarana perekonomian tersebut secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.14.

TABEL III.14
JUMLAH SARANA PEREKONOMIAN TAHUN 2004

N o	Jenis Sarana	Jalancagak	Bunihayu	Curug Rendeng	Sarireja	Tambakan	Jml
1	Pasar	1	-	-	-	-	1
2	Toko	30	4	5	4	10	53
3	Kios/warung	90	87	30	45	67	319
4	Bank	1	-	-	-	-	1
5	Koperasi	1	-	-	-	-	1
Jumlah		123	91	35	49	77	374

Sumber : Profil Desa Tahun 2004

Arah Kebijakan Pembangunan

Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Jalancagak 2001 membagi Bagian Wilayah Kota (BWK) menjadi lima (5), yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Bunihayu, Desa Curugrendeng, Desa Jalancagak, Desa Sarireja dan Desa Tambakan dengan pertimbangan nilai lokasional, dan kegiatan-kegiatan yang sudah berkembang di wilayah Kecamatan Jalancagak dan kecenderungan akan perkembangannya. Pembagian BWK berdasarkan fungsi dan potensi yang berada pada desa-desa tersebut terdiri dari BWK Pusat kota (desa Jalancagak) sebagai pusat pelayanan yang memiliki skala kota, kecamatan dan desa-desa yang pada wilayah Kota Kecamatan Jalancagak dan sub-sub BWK lainnya (Bunihayu, Curugrendeng, Sarireja dan Tambakan).

TABEL III.15
PEMBAGIAN BWK KECAMATAN JALANCAGAK DAN FUNGSI

NO	BWK	Desa	Luas (ha)	Fungsi
1	BWK Pusat Kota	Jalancagak	331,25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala wilayah (WP III), kecamatan & kota, ▪ Pusat pelayanan sosial ekonomi skala WP II/ kecamatan/ kota, ▪ Permukiman, ▪ Perkebunan
2	BWK B	Bunihayu	808,145	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pelayanan sosial ekonomi skala BWK ▪ Permukiman ▪ Perkebunan
3	BWK C	Curugrendeng	742,36	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pelayanan sosial ekonomi skala BWK ▪ Permukiman ▪ Perkebunan & pertanian lahan basah
4	BWK S	Sarireja	500,016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pelayanan sosial ekonomi skala BWK ▪ Permukiman ▪ Perkebunan
5	BWK T	Tambakan	394,323	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pelayanan sosial ekonomi skala BWK ▪ Permukiman ▪ Perkebunan & pertanian lahan basah

Sumber :Diolah dari Rencana Detail Tata ruang Kecamatan Jalancagak 2001

Karakteristik Pelayanan di Wilayah Studi

Karakteristik pelayanan di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan fasilitas pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Aksesibilitas yang mengandung arti tingkat kemudahan berhubungan dari suatu tempat ke tempat lain (Hansen, 1960) ditunjukkan oleh keberadaan sarana yang dimiliki oleh wilayah. Kota Kecamatan Jalancagak memiliki tingkat pelayanan dengan skala kota, kecamatan dan desa sekitarnya yang terletak di Desa Jalancagak. Desa Jalancagak merupakan pusat pelayanan dan memiliki tingkatan desa (hirarki) sebagai kota kecil (desa swasembada) yang ditunjang aksesibilitas dengan intensitas tinggi.

Kelengkapan fasilitas sarana pelayanan dasar yang berada di desa Jalancagak, menjadikan desa ini memiliki beban tanggungan pelayanan untuk

desa di Kota Kecamatan Jalancagak yaitu desa Curugrendeng (desa swadaya), desa Sarireja (desa swadaya), desa Bunihayu (desa swakarya) dan desa Tambakan (desa swakarya) yang tidak memiliki fasilitas sarana selengkap desa swasembada.

Karakteristik penduduk pedesaan tentang hakekat manusia dalam ruang berorientasi ke masa depan, penduduk Kota Kecamatan Jalancagak sudah menunjukkan suatu sifat kemajuan atau progress dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Penduduk desa di wilayah kota kecamatan Jalancagak mendatangi pusat pelayanan untuk memeriksa kesehatan dan menyekolahkan anak di sarana pendidikan tingkat menengah yang hanya berada di pusat pelayanan (desa Jalancagak).

Rangkuman

Kota Kecamatan Jalancagak yang terletak pada desa Jalancak memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan dengan skala kota, kecamatan dan desa tentunya memiliki beban yang cukup tinggi, terutama adanya pengembangan untuk kegiatan yang sudah ada. Agar dapat menunjang kegiatan tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang baik, sehingga penduduk Kota Kecamatan Jalancagak membutuhkan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Agar kualitas kehidupan kesehatan dan pendidikan meningkat maka, tingkat pelayanan sarana pendidikan dan kesehatan dapat memberikan pelayanan untuk seluruh penduduk desa pada wilayah Kota Kecamatan Jalancagak. Meskipun sarana pelayanan dasar sudah terdapat pada wilayah ini maka, perlu diketahui tingkat pelayanan yang diberikan pada saat ini, apakah berjalan dengan optimal atau kurang optimal. Sehingga perlu suatu kajian terhadap optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar di Kota Kecamatan Jalancagak.

BAB IV

ANALISIS OPTIMASI POLA DAN TINGKAT PELAYANAN SARANA DASAR KOTA KECAMATAN JALANCAGAK

4.1 Analisis Pola Wilayah

Analisis pola wilayah digunakan untuk mengetahui bagaimana perwilayahan dan karakteristik Kota Kecamatan Jalancagak. Sehingga dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa variabel yang berkaitan dengan pola perwilayahan yaitu Kondisi geografi, penggunaan lahan, homogenitas, tipologi desa dan pola pemukiman. Dengan menggunakan metode *nearest neighbour statistic* untuk melihat keruangan desa di dalam kesatuan wilayah.

4.1.1 Perwilayahan Kecamatan Jalancagak

Kota Kecamatan Jalancagak berada di selatan Kabupaten Subang merupakan wilayah pinggiran (pedesaan) yang berjarak 17 kilometer dari Kota Subang yang terletak di bawah kaki pegunungan Tangkuban Perahu. Hal ini berkaitan dengan teori Russwurn (1987) yang menyatakan wilayah *inner fringe* mencakup daerah perluasan antara 10-15 kilometer.

Kota Kecamatan Jalancagak merupakan pusat pelayanan sosial dan ekonomi di Kecamatan Jalancagak yang berfungsi melayani skala besar untuk wilayah, kecamatan, kota dan desa. Dengan dijadikan pusat pelayanan sosial dan ekonomi maka hal ini terkait dengan teori Blair bahwa wilayah administratif dibentuk oleh kepentingan pemerintah maupun pihak lain sebagai perumusan kebijakan perkembangan wilayah homogenitas dan atau fungsional. Kota

Kecamatan yang berada di desa Jalancagak merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah kecamatan.

Ciri-ciri yang dapat dilihat dari hasil observasi wilayah Kota Kecamatan Jalancagak merupakan wilayah homogenitas berdasarkan dominasi penggunaan lahan sebagai perkebunan dan pertanian sebesar 67.93% (dapat dilihat pada Tabel III.5), homogenitas ini juga dapat dilihat dari dominasi etnis penduduk suku Sunda dan mata pencaharian terbanyak sebagai petani sebesar 73,3% (dapat dilihat pada Tabel III.11). Wilayah Homogenitas Kota Kecamatan Jalancagak dapat dilihat pada gambar 4.1.

Kota Kecamatan Jalancagak memiliki kondisi fisik yang berbukit dan bergelombang hingga curam berdampak pada keterbatasan dalam menempatkan sarana pemukiman dan pelayanan sarana dasar. Hal ini terlihat adanya pengelompokan desa dan komponen-komponen didalamnya yang lebih banyak penduduk tersebar pada kemiringan yang landai seperti di desa Jalancagak, desa Curugrendeng dan desa Bunihayu (dapat dilihat pada Tabel III.4 dan III.6). Keterbatasan ini juga diakibatkan karena wilayah homogenitas sebagai perkebunan dan pertanian.

Perkembangan pada wilayah Kota Kecamatan Jalancagak pada saat ini dapat dikatakan cukup baik diakibatkan wilayah ini sebagai jalur transit Kota Bandung ke Kota Jakarta via Kota Subang sehingga wilayah homogenitas di Kecamatan Jalancagak menjadi suatu aset pariwisata, yang dapat memberikan pengembangan untuk wilayah ini dan perkembangan bagi penduduk Kota Kecamatan Jalancagak

Gambar 4.1
Gambar wilayah homogenitas

4.1.2 Pola Perwilayahan Desa

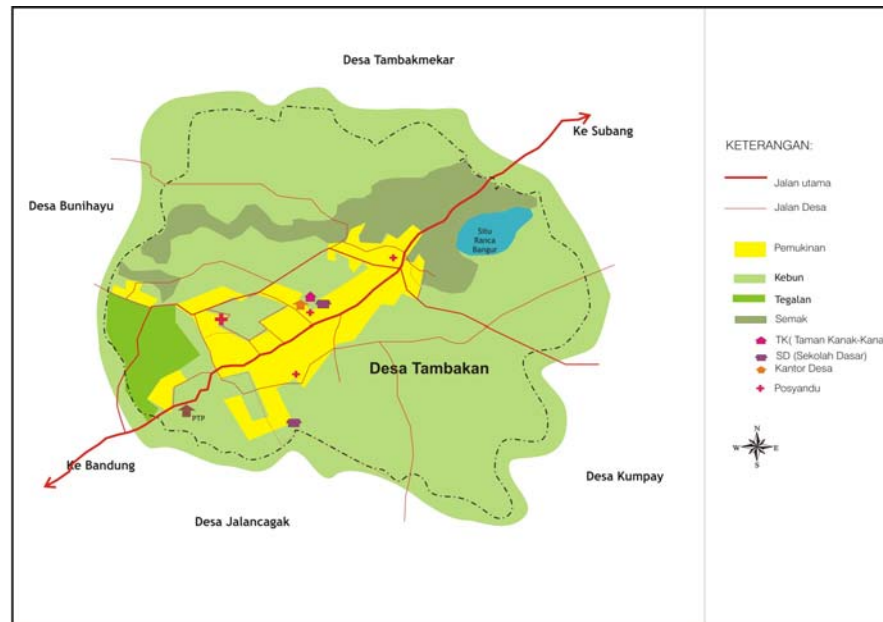
Pola pemukiman desa di Kota Kecamatan Jalancagak dapat dilihat dalam segi ruang (*space*). Melalui metoda analisa kuantitatif melalui pendekatan tetangga terdekat (*nearest-neighbour analysis*), seperti yang dikemukakan oleh teori Peter Hagget (1970) bahwa parameter tetangga terdekat T (*nearest neighbour statistic T*) dapat ditunjukkan dengan rangkaian kesatuan (*continuum*) untuk perbandingan antar pola titik. Hasil pola pemukiman desa dengan perhitungan tetangga terdekat untuk pola desa di kecamatan Jalancagak menyatakan bahwa Parameter tetangga terdekat (T) adalah **0,46** berarti tipologi pusat pemukiman desa di kecamatan Jalancagak adalah mengelompok (*clustered*).

Hal ini dikaitkan dengan penelitian bahwa desa-desa mengelompok disebabkan dengan keterbatasan kondisi fisik wilayah dan dominasi oleh lahan perkebunan sehingga dapat dipastikan kebutuhan sarana pelayanan juga mengelompok karena suatu kelompok pemukiman akan erat hubungannya dengan komponen-komponen penunjang. Teori ini berdasarkan Bintarto (1983) bahwa ada 3 (unsur) pembentuk desa yaitu daerah, penduduk dan tata kehidupan artinya kesatuan hidup atau *living unit* dan diperkuat oleh Beratha (1991) bahwa komponen-komponen desa terdiri dari wisma, karya, marga dan suka. Pengelompokan ini juga tidak lepas dari kehidupan sosiologi masyarakat pedesaan yang hidup secara gotong royong (*gemeinschaft*) dan selalu ingin berdekatan satu dengan yang lain. Seperti yang di ungkapkan oleh Wisadirana (2205) bahwa faktor lingkungan geografis memberikan pengaruh terhadap kegotongroyongan.

4.1.3 Bentuk Desa

Bentuk-bentuk fisik desa pada dasarnya akan berorientasi pada faktor-faktor dan potensi dimana desa itu berada dan dipengaruhi juga oleh topografi kondisi fisik wilayah.. Bentuk desa-desa di Kota Kecamatan Jalancagak sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh topografi di kecamatan Jalancagak. Kecamatan Jalancagak terbagi oleh 2 dataran yaitu dataran tinggi dan rendah sehingga ada 2 macam jenis bentuk desa yaitu bentuk linier dan terpusat Hal ini juga diungkapkan oleh Daldjoeni.(1986) dan Sujarto (1979) mengenai bentuk dan pola desa yang selalu berorientasi pada faktor-faktor dan potensi perkembangan dan pertumbuhan.

Bentuk linier dapat dilihat di **Desa Tambakan** yang memiliki tingkat desa swasembada (Gambar 4.2). bentuk linier disebabkan desa Tambakan berada di dataran rendah yang memiliki ciri-ciri penyebaran pemukimannya mengikuti jalan raya (jalan propinsi menghubungkan Kota Subang dan Kota Bandung) sehingga saat ini pengembangan desa tanah pertanian sepanjang jalan propinsi berubah menjadi pemukiman. Penyebaran sarana pemukiman di Desa Tambakan mengikuti orientasi yaitu jalan propinsi sehingga banyak lahan pertanian sepanjang jalan yang berubah menjadi perumahan. Pemekaran ke arah dalam di desa Tambakan dapat diatasi dengan cara membuka jalan baru mengelilingi desa, dengan maksud agar kawasan permukiman yang baru tidak terpencil dan masih dapat berhubungan dengan permukiman lainnya di sekitar desa.



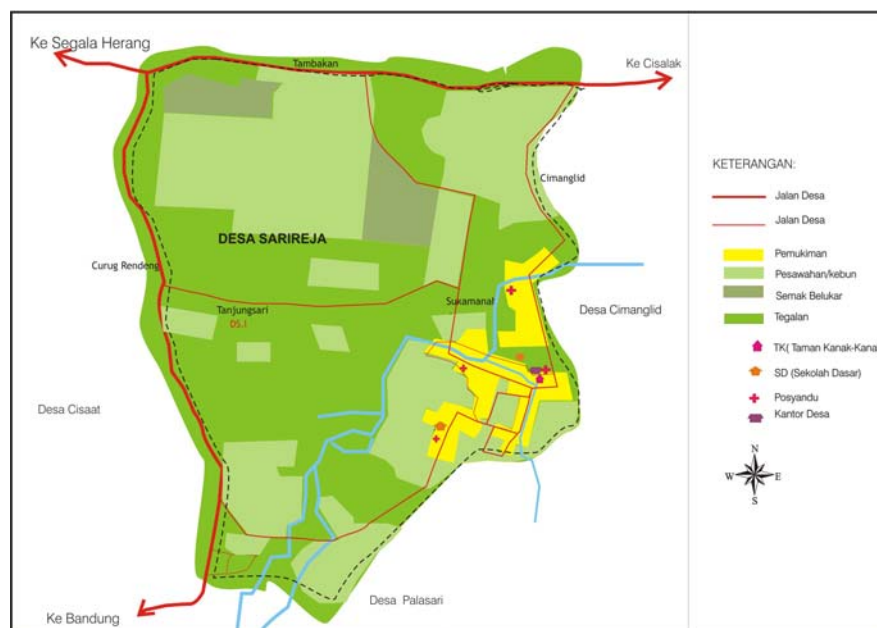
Sumber: Hasil Survei, 2006

GAMBAR 4.2
BENTUK DESA LINIER DI DESA TAMBAKAN

Pola pemukiman masyarakat di Desa Tambakan yang berada pada ruas jalan utama menyebabkan terjadinya pergeseran atau mengikuti trend yang semula sebagai lahan pertanian, saat ini banyak penduduk yang bergerak di bidang jasa seperti rumah makan, toko, dan tambal ban dilengkapi penjualan bahan bakar secara eceran. Fenomena ini juga sering terlihat pada desa-desa di Indonesia yang pada umumnya dilewati oleh jalur transportasi regional maupun jalur transportasi lokal.

Kecamatan Jalancagak juga memiliki desa-desa yang terletak di dataran tinggi yaitu **Desa Sarireja** yang memiliki tingkat desa swadaya (Gambar 4.3). Bentuk dari kedua desa itu adalah terpusat. Berdasarkan teori menurut Sujarto (1979) bahwa pemusatan desa dapat dicirikan oleh adanya suatu kegiatan yang homogen oleh sektor pertanian maupun perkebunan. Pemusatan di desa Sarireja

terjadi karena adanya fungsional yang homogen di bagian tengah desa, (perkebunan dan pertanian) serta didorongnya oleh faktor kegotongroyongan (*gemeinschaft*) ikatan kekeluargaan yang erat, masyarakat desa Sarireja merupakan karakteristik turun temurun dari keluarga yang berasal dari desa asli. Sifat kegotong royong dan ingin tinggal berdekatan dengan tetangga seperti yang di ungkapkan oleh Jayadinata (1999) mencerminkan perkampungan berbentuk berkelompok atau terpusat. Persebaran sarana pelayanan dasar di desa Sarireja juga cenderung terpusat dengan kantor desa, fasilitas sarana pendidikan dasar (SD), fasilitas sarana kesehatan yang meliputi posyandu, balai kesehatan.

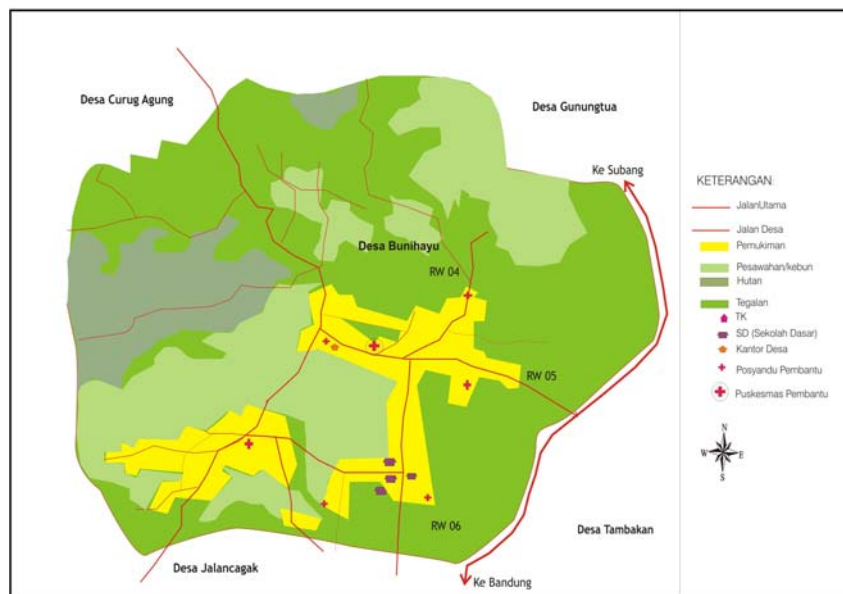


Sumber: Hasil Survei, 2006

GAMBAR 4.3
BENTUK DESA TERPUSAT DI DESA SARIREJA

Pola pemukiman di **Desa Bunihayu** yang memiliki tingkatan desa swakarya (Gambar 4.4) memiliki tipe terpusat, pengelompokan ini juga terlihat pada fasilitas sarana pendidikan tingkat dasar (SD) yang berjumlah 4 unit yang

terletak pada lokasi yang sama dan bersebelahan, hal ini dapat diakibatkan pola kegiatan masyarakat yang selalu berdekatan dengan kegiatan lainnya. Tipe desa terpusat pada desa Bunihayu dicirikan karena memiliki fungsi wilayah yang dominan sebagai lahan pertanian/perkebunan (82,7%). Karakteristik perilaku masyarakat desa tipe tersebar juga didapati pada masyarakat desa Bunihayu yang senang bersosialisasi, dan berkumpul. Begitu juga dengan fasilitas sarana sosial lainnya, seperti sarana kantor desa, bale pertemuan, posyandu dan puskesmas pembantu ditempatkan menjadi satu kelompok agar memudahkan masyarakat dan kegiatan lainnya saling berinteraksi.

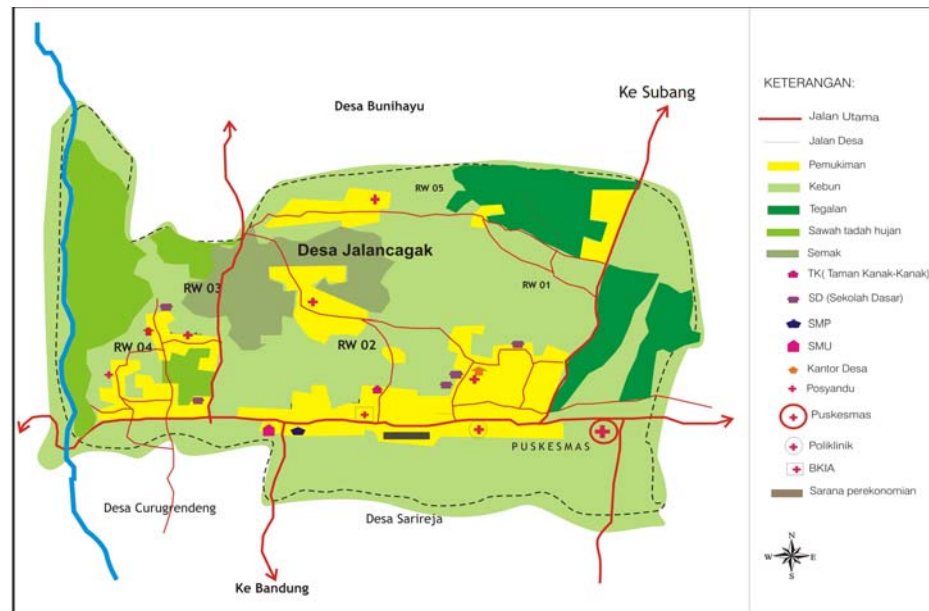


Sumber: Hasil Survei, 2006

GAMBAR 4.4
BENTUK DESA TERSEBAR DI DESA BUNIHAYU

Pola pemukiman tipe tersebar (*scattered*) juga ditemukan di Kecamatan Jalancagak yaitu Desa Curugrendeng, dan Desa Jalancagak Perkembangan desa sangat bervariasi mengikuti orientasi tempat bekerja di lapangan pertanian

maupun diperkebunan, dengan maksud agar perjalanan ke tempat kerja tidak terlalu jauh. Pada wilayah di masing-masing desa memiliki aktivitas yang tidak sama sehingga pola pemukiman menyebar dalam wilayah yang lebih luas.



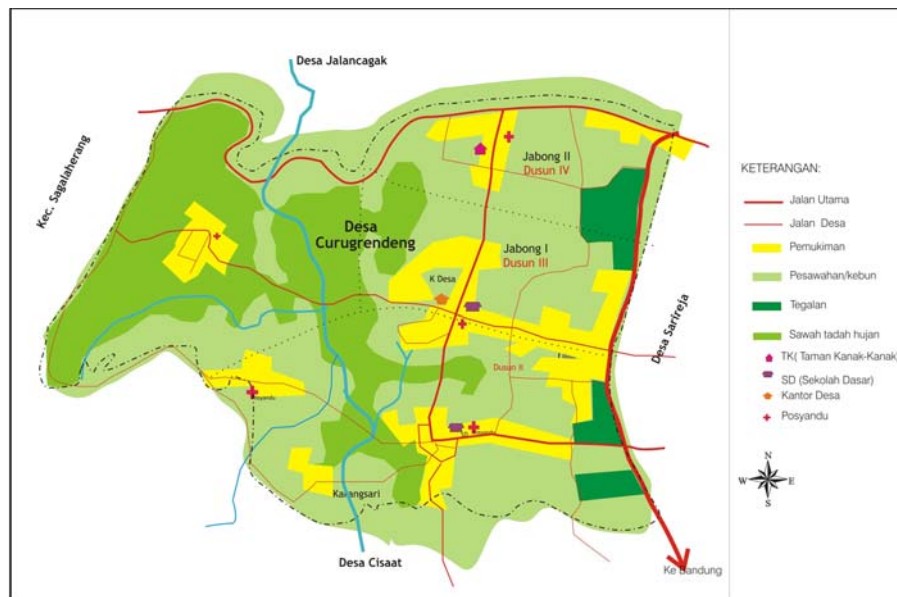
Sumber: Hasil Survei, 2006

GAMBAR 4.5
BENTUK DESA TERSEBAR DI DESA JALANCAGAK

Desa Jalancagak memiliki tingkat desa swasembada (Gambar 4.5) yang merupakan pusat kota kecamatan, pola pemukiman menyebar hal ini disebabkan oleh luas wilayah, dan juga orientasi penyebaran pada lahan pertanian. Pengelompokan sarana sosial dan ekonomi terlihat dari hasil pengamatan di desa Jalancagak terbagi 2 kelompok dan lokasi. Pengelompokan sarana sosial dan ekonomi juga terasa di desa Jalancagak, sebagai pusat pelayanan utama sarana ekonomi (pasar, pertokoan, terminal, bank), sarana perkantoran pemerintahan (kantor kecamatan), sarana kesehatan (puskesmas), sarana pendidikan tingkat SLTP dan SLTA berada di lokasi yang sama yaitu mengikuti sepanjang jalan raya.

Pengelompokan untuk sarana pendidikan tingkat SD dan TK berada di dekat kantor desa, hal ini diakibatkan tata letak pola pedesaan dalam meletakkan sarana sosial selalu berdekatan dengan kegiatan masyarakat desa untuk berkelompok.

Begitu juga dengan keadaan di **Desa Curugrendeng** yang memiliki tingkatan desa swadaya (Gambar 4.6) pola permukiman menyebar diakibatkan kegiatan aktifitas masyarakat berbeda. Hal ini memudahkan penduduk yang bekerja sebagai petani ke persawahan. Akan tetapi pengelompokan sarana sosial desa dipusatkan pada lokasi dimana masyarakat bersosialisasi dan berinteraksi seperti sarana SD, bale pertemuan dan Posyandu diletakan di dekat kantor desa.



Sumber: Hasil Survei, 2006

GAMBAR 4.6
BENTUK DESA TERSEBAR DI DESA CURUGRENDENG

4.2 Analisis Pola Pelayanan Sarana Dasar

Salah satu unsur terpenting dalam suatu daerah adalah pelayanan publik yang menjadi kebutuhan primer. Dalam sub bab ini akan diuraikan analisis mengenai aspek sarana di Kota Kecamatan Jalancagak yang meliputi tingkat pelayanan, pola persebaran, jangkauan pelayanan, dan kecenderungan tingkat kebutuhan. Analisis aspek sarana ini sangat penting dipertimbangkan karena aspek ini merupakan sarana pendukung yang menentukan berlangsungnya kegiatan-kegiatan penduduk di wilayah Kecamatan Jalancagak.

4.2.1 Jaringan Transportasi

Pola persebaran prasarana jalan di Kota Kecamatan Jalancagak menunjukkan adanya pemusatan di sekitar kawasan kota kecamatan yang meliputi desa Jalancagak, dan Tambakan. Di kawasan ini terdapat persilangan antara jalan propinsi dengan jalan kabupaten. Jalan propinsi ini merupakan koridor Subang-Bandung yang mempunyai fungsi kolektor primer, sehingga intensitas pergerakan yang melalui desa Jalancagak, Bunihayu, Tambakan sangat tinggi. Fungsi kolektor primer pada jalan koridor yang melayani pergerakan antar kota, berimplikasi pada kualitas pelayanan tinggi (aspal). Namun tingginya intensitas pergerakan, bukan disebabkan hanya karena aksesibilitas yang memadai, tetapi juga disebabkan karena adanya objek-objek wisata yang merupakan salah satu pergerakan penduduk sehingga intensitas pergerakan semakin meningkat.

Desa-desanya yang dilalui jalan kabupaten yaitu desa Curugrendeng, dan desa Sarireja mempunyai fungsi sebagai kolektor sekunder. Dengan fungsi sebagai penghubung antar pusat permukiman desa, maka jalan kabupaten ini

merupakan ruas jalan utama bagi kawasan perdesaan yang dilaluinya. Jadi tidak meratanya persebaran jaringan transportasi antara kawasan perkotaan dan perdesaan, maka berdampak pada tinggi-rendahnya aksesibilitas di kedua kawasan tersebut. Sehingga akan berpengaruh terhadap intensitas pergerakan penduduk.

Tingkat pelayanan prasarana jalan di Kota Kecamatan Jalancagak dan desa-desa di kecamatan Jalancagak dapat dikatakan sudah memadai, dalam arti seluruh desa telah terhubung dengan jaringan jalan. Kondisi permukaan jalan utama telah diaspal sehingga angkutan umum dapat mencapai sampai seluruh depan jalan masuk desa. Kondisi permukaan jalan masuk desa sangat bervariasi (aspal/batu/tanah), angkutan umum dilayani hanya dengan ojek. Di samping itu desa-desa merupakan kantong-kantong produksi perkebunan dan pertanian tidak ada hambatan dalam mengangkut hasil produksinya. Sebab kebutuhan tersebut dapat dilayani dengan bak terbuka (pick up) maupun truk-truk kecil khususnya di desa Sarireja yang fungsional kegiatan milik perkebunan. Meskipun secara umum jaringan transportasi telah memadai, namun disadari adanya perbedaan tingkat pelayanan yang mencolok antara kegiatan perkebunan dan industri kecil yang berada di desa Bunihayu. Keunggulan di Desa Bunihayu terdapat sebuah industri kecil (industri perkakas) dan juga tempat pariwisata sehingga memudahkan jalur transportasi di kawasan pedesaan karena para pemilik usaha memberikan fasilitas jaringan jalan khususnya permukaan jalan yang diaspalkan, sehingga desa Bunihayu tidak perlu menunggu waktu lama dari pemerintah.

Konsentrasi kepadatan permukiman merupakan pengaruh perbedaan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan transportasi. Sebab wilayah yang

memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dengan pusat-pusat permukiman yang terintegrasi, cenderung mempunyai karakteristik mobilitas penduduk yang lebih tinggi pula. Hal ini terkait dengan semakin tinggi peluang interaksi antar penduduk beserta kelengkapan fasilitas sarana yang mendukungnya. Dengan mobilitas penduduk yang tinggi maka dibutuhkan pelayanan jaringan jalan dan sarana transportasi umum yang lebih tinggi pula. Pada akhirnya pola konsentrasi kepadatan permukiman cenderung akan mengikuti pola jaringan jalannya. Sementara ini karena pola jaringan jalan sangat dipengaruhi oleh kontur wilayah, maka konsentrasi kepadatan penduduk permukiman cenderung akan mengikuti wilayah yang relatif landai untuk mempermudah terjadinya interaksi antar penduduk. Wilayah ini merupakan salah satu ciri kawasan kota kecamatan seperti terlihat di kawasan Kota Kecamatan Jalancagak.

Sementara itu di kawasan desa-desa lainnya permukiman relatif menyebar dalam kelompok yang kecil-kecil (kampong atau dusun) dengan mobilitas penduduk yang rendah. Hal ini selain disebabkan karena perdesaan hanya bergantung pada ruas jalan utama saja dan kegiatan penduduk yang homogen serta rendahnya ketersediaan fasilitas pelayanan umum. Dengan bercirikan sebagai kawasan agraris maka kegiatan utama penduduk sebagai petani dan buruh perkebunan. Dengan demikian tingkat kebutuhan pelayanan jaringan transportasi maupun fasilitas di suatu desa sangatlah dipengaruhi oleh tingkat mobilitas dan heterogenitas kegiatan penduduknya. Hal ini akan berimplikasi pada ketersediaan jenis-jenis fasilitas sarana lainnya beserta hirarki dan jangkauan pelayanan.

4.2.2 Persebaran Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial pada konteks analisis ini adalah fasilitas skala kecamatan yaitu sarana kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, bale kesehatan, dokter praktek, dan apotek) dan sarana pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) di Kota Kecamatan Jalancagak.

A. Persebaran Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang relatif tersebar di seluruh desa adalah posyandu dan balai pengobatan. Sementara itu fasilitas kesehatan yang memiliki skala kecamatan meliputi puskesmas, praktik dokter, rumah sakit bersalin, dan apotek hanya tersedia di desa Jalancagak. Keberadaan fasilitas-fasilitas hanya berlokasi di pusat pelayanan karena dibatasi oleh batas ambang minimum penduduk yang harus dilayani, juga terkait oleh aksesibilitas. Artinya keberadaan sarana fasilitas spesifik harus dapat dengan mudah dicapai dari seluruh desa, sehingga dapat terlihat bahwa fasilitas-fasilitas ini cenderung berlokasi yang memiliki akses langsung terhadap ruas-ruas jalan utama serta dilayani oleh sarana transportasi umum. Persebaran sarana kesehatan dapat dilihat pada (Gambar 4.7).

B. Persebaran Sarana Pendidikan

Fasilitas pendidikan tingkat dasar (SD) telah tersebar di seluruh desa, sedangkan untuk tingkat menengah SLTP dan SLTA hanya terkonsentrasi di kawasan kota kecamatan, maupun desa yang dilalui oleh jalan utama (jalan koridor dan jalan kabupaten), yaitu desa Jalancagak dan desa Tambakan. Persebaran sarana pendidikan dapat dilihat pada (Gambar 4.8).

GAMBAR 4.7
PERSEBARAN SARANA KESEHATAN KOTA JALANCAGAK
KECAMATAN

GAMBAR 4.8
PERSEBARAN SARANA PENDIDIKAN KOTA JALANCAGAK
KECAMATAN

Pemusatan sarana pendidikan tingkat menengah pada desa Jalancagak disebabkan karena tingkat kepadatan penduduk (28 jiwa/Ha) dan kemudahan aksesibilitas yang berada di ruas jalan utama sehingga memudahkan pencapaian ke lokasi dengan angkutan umum yang melewati jalur ini. Berdasarkan persyaratan penduduk ambang untuk sekolah lanjut pun lebih besar dari pada sekolah dasar (rasio 1 : 2). Angka rasio tersebut mengandung arti 1 sekolah lanjutan (480 penduduk ambang) setara dengan 2 sekolah dasar (240 penduduk ambang) sedangkan jumlah usia sekolah yang dilayani berjumlah 371 siswa untuk Kota Kecamatan jalancagak. Namun pada kenyataannya persyaratan penduduk ambang ini sulit dipenuhi di kawasan pedesaan, sehingga pendekatan yang lebih realitis adalah penduduk yang dilayani, maka jarak tempuh juga merupakan faktor penentu lokasi fasilitas sarana pendidikan.

4.2.3 Jangkauan Pelayanan

Analisis orientasi atau jangkauan pelayanan sarana dan prasaranya lebih di fokuskan pada jenis-jenis pelayanan kecamatan. Sebab dapat menggambarkan pola ketergantungan desa-desa terhadap desa tertentu dalam penentuan kebutuhannya. Untuk mendapat gambaran tentang jangkauan pelayanan fasilitas maka dipergunakan metoda pendekatan minimasi jarak tempuh, yang mengasumsikan bahwa penduduk cenderung mencari lokasi fasilitas terdekat dapat dilihat pada (Table IV.1) Keluarannya kemudian dikaitkan dengan ketersediaan jaringan jalan transportasi karena meskipun jarak pencapaian fasilitas di lokasi tertentu lebih dekat daripada lokasi lain, namun bila tidak diimbangi dengan kemudahan pencapaiannya maka tidak akan dipilih oleh penduduk.

TABEL IV.1
MATRIKS JANGKAUAN PELAYANAN (Km) KOTA KECAMATAN
JALANCAGAK

Desa	Curugrendeng	Sarireja	Tambakan	Jalancagak	Bunihayu
Curugrendeng		5	5	3	6
Sarireja	3		6	4	7
Tambakan	5	6		2	2
Jalancagak	3	5	2		3
Bunihayu	6	7	2	3	

Sumber: Hasil Survei, 2006

A. Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kota Kecamatan Jalancagak tampaknya masih tergantung pada desa Jalancagak sebagai satu-satunya desa yang memiliki fasilitas kesehatan yang terlengkap. Hal ini terjadi karena desa Jalancagak merupakan pusat pelayanan yang memiliki fasilitas spesifik seperti puskesmas, rumah sakit bersalin, praktek dokter dan apotek, sehingga menjadi acuan utama desa-desa di Kota Kecamatan Jalancagak. Selain itu karena letaknya yang strategis menyebabkan desa Jalancagak mudah dicapai dari segala arah, sehingga jangkauan pelayanannya pun mencakup desa Sarireja (5km) dapat dilihat pada (Tabel. IV.2 dan Gambar 4.9).

Fasilitas puskesmas pembantu, selain di desa Jalancagak juga terdapat di desa Bunihayu. Jangkauan puskesmas pembantu yang berada di desa Bunihayu dapat melayani seluruh desa di kota kecamatan Jalancagak. Dengan jarak jangkauan terjauh dari desa Sarireja yang menghabiskan sepanjang 7 km ke sarana puskesmas pembantu. Berdasarkan standar jangkauan pelayanan yang ideal dari pemukiman menuju pelayanan sarana kesehatan berjarak 1 km untuk berjalan kaki.

Gambar 4.9
Jarak Jangkauan Pelayanan Sarana Kesehatan

B. Sarana Pendidikan

Pada dasarnya desa-desa di Kota kecamatan Jalancagak memiliki ukuran jarak jangkauan berdasarkan karakteristik kondisi geografi pada wilayah desanya. Rata-rata jangkauan pelayanan terjauh adalah 5 km (desa Sarireja ke desa Jalancagak); 7 km (desa Sarireja ke desa Tambakan) dan 6 km (desa Curugrendeng ke desa Tambakan) dapat dilihat pada Tabel (IV.3 dan Gambar 4.10).

Sarana pendidikan tingkat menengah yang terletak di desa Jalancagak adalah sarana pendidikan lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sarana pendidikan tingkat atas (SLTA) yang terdiri dari 1 unit sarana pelayanan. Jangkauan pelayanan sarana pendidikan tingkat menengah (SLTP dan SLTA) melayani seluruh Kota Kecamatan Jalancagak maupun Kecamatan Jalancagak.

Desa Tambakan yang memiliki fasilitas pelayanan SLTP sebanyak 1 unit dapat membantu pada desa-desa tetangga yang relatif memiliki jarak jangkauan yang jauh untuk menuju ke fasilitas pelayanan sarana pendidikan yang berada di desa Jalancagak. Hal ini dapat membantu desa Bunihayu yang memiliki jarak jangkauan yang cukup dekat dengan desa Tambakan. Adapun penduduk desa Jalancagak dapat memilih untuk mendapatkan pelayanan pendidikan menengah pada desa Tambakan dikarenakan memiliki akses yang cukup baik dan memiliki jarak jangkauan yang cukup dekat. Meskipun sarana (SLTP) dapat memberikan pelayanan untuk desa tetangga, akan tetapi jarak jangkauan pelayanan untuk desa Curugrendeng dan Sarireja sangat jauh (6-7 km). Sedangkan jarak jangkauan yang ideal untuk SLTP dan SLTA dari pemukiman adalah 1-3 km.

Gambar 4.10
Jarak Jangkauan Pelayanan Sarana Pendidikan

TABEL IV.2
JANGKAUAN PELAYANAN FASILITAS SARANA KESEHATAN DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK 2006

NO	DESA	PUSKESMAS, BKIA, APOTEK, & PRAKTEK DOKTER				PUSKESMAS PEMBANTU				Moda dipakai	Kondisi jalan
		unit	Wilayah dilayani	Jarak terjauh	Jarak terdekat	unit	Wilayah dilayani	Jarak terjauh	Jarak terdekat		
1	Bunihayu					1	Bunihayu			Ojek	Aspal
							Curugrendeng	6 km		Ojek	
							Jalancagak		2 km	Ojek	
							Sarireja	7 km		Ojek	
							Tambakan		2 km	Ojek	
2	Curugrendeng									Angkutan umum	Berbatu
3	Jalancagak	1	Bunihayu		3 km					Ojek	Aspal
			Curugrendeng		3 km					Angkutan umum	Berbatu
			Jalancagak							Angkutan umum	
			Sarireja	5 km						Ojek	Berbatu
			Tambakan		2 km					Angkutan umum	Aspal
4	Sarireja									Ojek	Berbatu
5	Tambakan									Angkutan umum	Aspal

Sumber: Hasil Analisis, 2006

TABEL IV.3
JANGKAUAN PELAYANAN FASILITAS SARANA PENDIDIKAN DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK 2006

NO	DESA	SLTP				SLTA				Moda dipakai	Kondisi Jalan
		unit	Wilayah dilayani	Jarak terjauh	Jarak terdekat	unit	Wilayah dilayani	Jarak terjauh	Jarak terdekat		
1	Bunihayu									Ojek	Aspal
2	Curugrendeng									Ojek	Berbatu
3	Jalancagak	1	Bunihayu		3 km	1	Bunihayu		3 km	Ojek	Aspal
			Curugrendeng		3 km		Curugrendeng		3 km	Ojek	
			Jalancagak				Jalancagak			Angkutan umum	Aspal
			Sarireja	5 km			Sarireja	5 km		Ojek	Berbatu
			Tambakan		2 km		Tambakan		2 km	Angkutan umum	Aspal
4	Sarireja									Ojek	Berbatu
5	Tambakan	1	Bunihayu		2 km					Angkutan umum	Aspal
			Curugrendeng	5 km						Ojek	Aspal,berbatu
			Jalancagak		2 km					Angkutan umum	Aspal
			Sarireja	6 km						Ojek	Berbatu
			Tambakan							Angkutan umum	Aspal

Sumber: Hasil Analisis, 2006

4.3 Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Dasar

Kriteria optimasi pada analisis ini didapat dari hasil survai pendapat masyarakat diolah dengan menggunakan SPSS, *descriptive statistic analyze, frequency*. Dengan pendekatan pengguna (*user approach*) yang perlu untuk diketahui tidak hanya memikirkan bagaimana layanan kota itu diberikan kepada pengguna atau masyarakat kota tetapi juga bagaimana pengguna atau masyarakat kota bisa memberikan respon dengan adanya layanan fasilitas sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah.

4.3.1 Perilaku Masyarakat

Analisis tingkat pelayanan sarana dasar pada penelitian ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat kecamatan Jalancagak dapat dinilai dari pertanyaan kuisioner yang disebarkan pada responden yang meliputi; (5) kepuasan terhadap sarana kesehatan yang sudah tersedia di wilayah penelitian; (6) dan alasan ketidakpuasan (kondisi sarana, jangkauan jarak, dan pelayanan).lihat pada Tabel IV.5.

Ketidak puasan terhadap fasilitas sarana kesehatan sebesar 54.7 % dikarenakan kondisi dari sarana tersebut dan 44.6% dikarenakan jarak sarana yang jauh dari lokasi pemukiman penduduk. Berdasarkan persentase tingkat kepuasan penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan tidak begitu memuaskan dengan selisih persentase sebanyak 43% penduduk merasa tidak puas dengan sarana pendidikan yang ada.

Alasan ketidak puasan oleh penduduk dikarenakan jarak. Penduduk yang memilih alasan jarak adalah KK yang memiliki anak usia sekolah tingkat SLTP dan SLTA, disebabkan fasilitas sarana pendidikan tingkat SLTP dan SLTA

berlokasi di Kota Kecamatan yang berjarak 4 km. Disamping jarak SLTP dan SLTA yang relatif jauh dari pemukiman, ada juga alasan ketidakpuasan akibat jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang terbatas. Hasil dari observasi di kecamatan Jalancagak hanya memiliki 2 SLTP yaitu SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 yang baru didirikan berada di desa Bunihayu dan 1 SLTA (SMA Negeri 1 Kecamatan Jalancagak).

Mayoritas penduduk yang memilih tingkat ketidakpuasan dengan alasan kondisi sarana adalah KK yang memiliki anak usia sekolah tingkat TK dan SD hal ini dapat dilihat dari sarana pendidikan tingkat SD dan TK yang sudah melayani di setiap desa-desa wilayah Kecamatan Jalancagak. Alasan puas dan tidak puas dalam aspek angkutan kendaraan tidak menjadi pilihan dikarenakan para siswa khususnya anak usia tingkat SD menempuh perjalanan dengan berjalan kaki.

TABEL IV.4
TINGKAT KETIDAK PUASAN PELAYANAN DASAR

No	Sarana	Tingkat Ketidak Puasan				Total
		Angkutan	Kondisi Sarana	Jangkauan Jarak	Pelayanan	
1	Kesehatan	7%	54.7%	44.6%	-	100%
2	Pendidikan (SD)	-	84.2%	-	-	84.2%
3	Pendidikan (SLTP dan SLTA)		56.1%	43,9%	-	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2006

Penduduk yang memilih untuk berpola berjalan kaki menuju puskesmas yang berada di pusat Kota Kecamatan berjumlah 45 % yaitu penduduk desa Jalancagak dan sisanya menggunakan angkutan umum 38,1% adalah penduduk Desa Tambakan, Desa Bunihayu dan Desa Curugrendeng. Waktu tempuh selama 1 jam dari tempat pemukiman ke puskesmas diperoleh dari desa Sarireja yang berjarak 5 km dari pusat kecamatan dengan kondisi jalan yang berbatu dan

dibatasi oleh lahan perkebunan. Hasil observasi penduduk desa Sarireja memilih untuk pergi ke sarana kesehatan (puskesmas pembantu) yang berada di desa Cimanglid yang berjarak 3 km dari desa Sarireja melalui jalan desa sebagai penghubung menuju ke lokasi. Fasilitas sarana kesehatan Jalancagak yaitu puskesmas rata-rata memakan waktu tempuh sekitar 5 sampai 15 menit.

TABEL IV.5
TRANSPORTASI RESPONDEN KE PELAYANAN DASAR

No	Sarana	Transportasi yang digunakan responden				Total
		Jalan kaki	Angk.umum	Kendaraan pribadi	kombinasi	
1	Kesehatan	45.3%	38.1%	10.8	5.8%	100
3	Pendidikan (SLTP dan SLTA)	28.1%	57.6%	5.8%	8.6%	100

Sumber: Hasil Analisis, 2006

4.3.2 Kapasitas Pelayanan

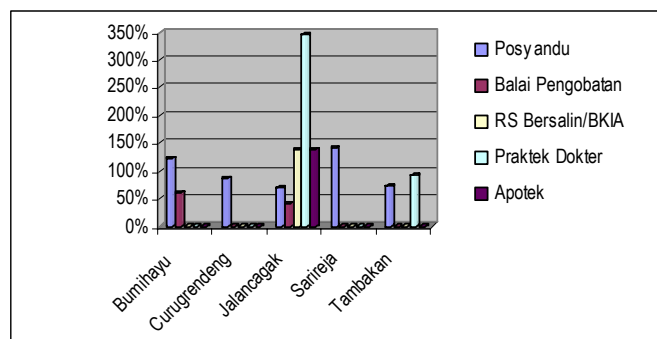
A. Sarana Kesehatan

Fasilitas sarana kesehatan , mensyaratkan jumlah penduduk ambang yang rendah yaitu 1.000 penduduk (posyandu) dan 3.000 penduduk (balai pengobatan atau poliklinik). Pada umumnya tingkat pelayanan kesehatan skala desa seperti balai kesehatan/poliklinik masih sangat rendah (22.85%), sedangkan posyandu relatif sudah memadai (91,39%). Meskipun tingkat pelayanannya rendah tetapi penduduk masih memiliki alternatif puskesmas yang mempunyai fungsi pelayanan sejenis. Desa Bunihayu memiliki puskesmas pembantu, sehingga apabila kekurangan pelayanan pada suatu fasilitas puskesmas dapat dipenuhi olehpuskesmas pembantu yang berada di desa Bunihayu. Sedangkan untuk fasilitas sarana BKIA yang berada di desa Jalancagak memiliki tingkat pelayanan yang masih rendah (38.08%) berdasarkan hasil persyaratan yang dibutuhkan

sebanyak 3 unit yang pada saat ini fasilitas sarana BKIA masih memiliki 1 unit untuk skala kecamatan. Begitu juga dengan sarana balai pengobatan yang masih rendah (22.85%) fasilitas ini memerlukan minimal 9 unit sedangkan yang tersedia berjumlah 2 unit.

Fasilitas sarana apotek di Kota Kecamatan Jalancagak tingkat pelayanannya sangat rendah (38.08%) hal ini diakibatkan karena jumlah unit yang tersedia masih belum dapat melayani skala kota maupun kecamatan, jumlah sarana yang tersedia saat ini sebanyak 1 unit sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 3 unit. Tingkat pelayanan yang tinggi adalah dokter praktek, pada saat ini memiliki 6 unit sedangkan kebutuhan sarana fasilitas dokter praktek berjumlah 5 unit di Kota Kecamatan Jalancagak.

Fasilitas sarana puskesmas memiliki ambang batas minimum penduduk sebanyak 120.000 sehingga tingkat pelayanan pada saat ini sudah dapat terpenuhi dikarenakan jumlah penduduk Kota kecamatan Jalancagak sebanyak 26.269 jiwa. Tingkat pelayanan kesehatan dapat dilihat pada (Table IV.6 dan Gambar 4.11).



Sumber: Hasil Analisis, 2006

GAMBAR 4.11
GRAFIK TINGKAT PELAYANAN FASILITAS SARANA KESEHATAN
DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK 2004

TABEL IV.6
TINGKAT PELAYANAN SARANA KESEHATAN
DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK 2004

No	Desa	Jml Penduduk	Posyandu				Balai Pengobatan				RS Bersalin/BKIA				Praktek Dokter				Apotik			
			Sediaan		Kebutuhan	Tkt	Sediaan		Kebutuhan	Tkt	Sediaan		Kebutuhan	Tkt	Sediaan		Kebutuhan	Tkt	Sediaan		Kebutuhan	Tkt
			Unit	Kapasitas	Unit	Pelayanan	Unit	Kapasitas	Unit	Pelayanan	Unit	Kapasitas	Unit	Pelayanan	Unit	Kapasitas	Unit	Pelayanan	Unit	Kapasitas	Unit	Pelayanan
1	Bunihayu	4.917	6	6.000	5	122.03%	1	3,000	2	61.01%	0	0	0	0.00%	0	0	1	0.00%	0	0	0	0.00%
2	Curugrendeng	5.783	5	5.000	6	86.58%	0	0	2	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	1	0.00%	0	0	1	0.00%
3	Jalancagak	7.249	5	5.000	7	68.98%	1	3,000	2	41.39%	1	10,000	1	137.95%	5	25,000	1	344.88%	1	10,000	1	137.95%
4	Sarireja	2.830	4	4.000	3	141.34%	0	0	1	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	1	0.00%	0	0	0	0.00%
5	Tambakan	5.490	4	4.000	5	72.86%	0	0	2	0.00%	0	0	0	0.00%	1	5,000	1	91.07%	0	0	1	0.00%
Jumlah		26.269	24	24.000	26	91.39%	2	6,000	9	22.85%	1	10,000	1	38.08%	6	30,000	5	114.24%	1	10,000	3	38.08%

Sumber: Hasil Analisis, 2006

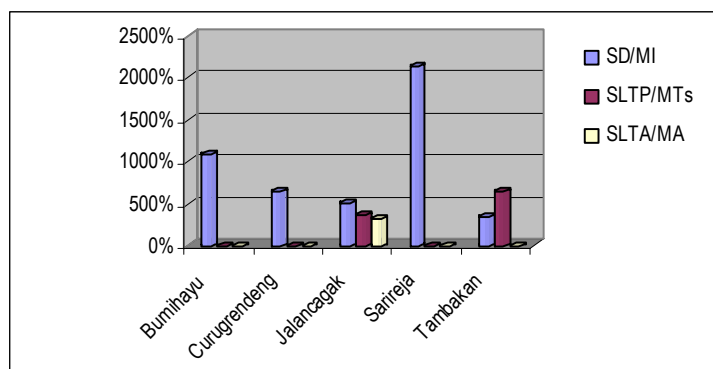
Keterangan :

- a. Kapasitas 1 unit Balai Pengobatan/ Poliklinik = 3.000 penduduk
- b. Kapasitas 1 unit BKIA = 10.000 penduduk
- c. Kapasitas 1 unit Posyandu = 1.000 penduduk
- d. Kapasitas 1 unit Praktik Dokter = 5.000 penduduk
- e. Kapasitas I unit Apotik = 10.000 penduduk

B. Sarana Pendidikan

Pada umumnya tingkat pelayanan fasilitas pendidikan dasar, yaitu SD di Kota Kecamatan Jalancagak, telah mencukupi (683.76%) bahkan melampaui batas kapasitas pada saat ini jumlah sarana sebanyak 20 unit sedangkan kebutuhan kapasitas sebanyak 3 unit. Hal ini terjadi disebabkan terjadinya pusat pelayanan sosial di Kota Kecamatan jalancagak sehingga terjadinya pengelompokan fasilitas sarana dasar untuk tingkat pelayanan skala kecamatan.

Begitu juga dengan pendidikan tingkat menengah (SLTP dan SLTA) tingkat pelayanan sangat tinggi di bandingkan dengan kebutuhan berdasarkan ambang minmum usia sekolah. Tingkat SLTP (272.73%) pada saat ini memiliki 2 unit sedangkan untuk melayani kebutuhan kota kecamatan pada saat ini sebanyak 1 unit SLTP. Sarana pendidikan SLTA memiliki tingkat pelayanan yang tinggi (129.38%) pada saat ini usia sekolah berjumlah 371 siswa sedangkan 1 unit pelayanan SLTA dapat menampung 480 murid. Tingkat pelayanan sarana pendidikan dapat dilihat pada (Tabel IV.7 dan Gambar 4.12).



Sumber: Hasil Analisis, 2006

GAMBAR 4.12
GRAFIK TINGKAT PELAYANAN FASILITAS PENDIDIKAN
DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK 2004

TABEL IV.7
TINGKAT PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN DI KOTA KECAMATAN JALANCAGAK 2004

No	Desa	Penduduk		SD					SLTP				SMU					
		Jumlah	% Desa	Sediaan		Kebutuhan		Tk.Pelayanan	Sediaan		Kebutuhan		Tk.Pelayanan	Sediaan		Kebutuhan		Tk.Pelayanan
				Unit	Kapasitas	7-12 Thn	Unit		Unit	Kapasitas	13-15 Thn	Unit		Unit	Kapasitas	16-18 Thn	Unit	
1	Bunihayu	4,917	18.72	4	960	89	0	1078.65%	0	0	46	0	0.00%	0	0	43	0	0.00%
2	Curugrendeng	5,783	21.99	4	960	133	1	657.53%	0	0	81	0	0.00%	0	0	87	0	0.00%
3	Jalancagak	7,249	27.60	6	1,440	279	1	516.13 %	1	120	133	0	360.90%	1	120	148	0	342.32%
4	Sarireja	2,830	10.78	4	960	45	0	2133.33 %	0	0	18	0	0.00%	0	0	18	0	0.00%
5	Tambakan	5,490	20.91	2	480	143	1	336.56%	1	120	74	0	648.65%	0	0	75	0	0.00%
	Jumlah	26,269	100.00	20	4,800	689	3	683.76%	2	240	352	1	272.73%	1	120	371	1	129.38%

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Keterangan :

- a. kapasitas 1 unit SD = 6 tingkat x 1 kelas x 40murid = 240 murid
 b. kapasitas 1 unit SLTP = 3tingkat x 4 kelas x 40murid = 480 murid
 c. kapasitas 1 unit SMU= 3 tingkat x 4kelas x 40 murid = 480 murid

- d. jumlah penduduk 7-12th = %penddk desa x (3/5 pdkk 5-9th. + 3/5 pdkk 10-14th)
 e. jumlah penduduk 13-15th = %pddk desa x (2/5 pdkk 10-14 th +1/5 pdkk 15-19 th)
 f. jumlah penduduk 16-18 th = % pdkk desa x (3/5 pdkk 15-19 th)

4.4 Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah

4.4.1 Kebijakan Publik Penyediaan Sarana Sosial Dasar di Kota

Kecamatan Jalancagak

Berdasarkan RDTR Kota Jalancagak Tahun 2002 – 2012, kebijakan penyediaan sarana fasilitas sosial terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pendidikan dan kesehatan. Fasilitas sarana pendidikan yang akan dikembangkan meliputi fasilitas pendidikan formal mulai dari tingkatan TK sampai SLTA. Tingkat akademi /perguruan tinggi belum akan dikembangkan mengingat jumlah penduduk (usia sekolah) belum mencukupi. Kebutuhan akan fasilitas sarana perguruan tinggi ini dapat dilayani oleh kota-kota sekitar Kota Jalancagak yaitu Kota Bandung, Subang, dan Sumedang.

Tingkat pelayanan fasilitas sarana pendidikan yang akan dikembangkan di wilayah Kota Kecamatan Jalancagak sebagai berikut:

- a) Fasilitas sarana pendidikan dengan skala pelayanan lingkungan /Sub BWK terdiri atas TK dan SD.
- b) Fasilitas pendidikan dengan skala pelayanan Desa /BWK terdiri atas SLTP.
- c) Fasilitas pendidikan dengan skala pelayanan kota kecamatan yaitu SLTA yang sudah ada di Pusat Kota, yaitu di Desa Jalancagak.

Fasilitas sarana kesehatan dikembangkan berdasarkan kebutuhan lokal dan regional. Kebutuhan regional, direncanakan akan dibangun rumah sakit yang dapat melayani kecamatan-kecamatan di Wilayah Pembangunan IV, yaitu Kecamatan Jalancagak, Cisalak, Tanjungsiang, dan Sagalaherang.

Lokasinya direncanakan di Kota Kecamatan Jalancagak, karena fungsinya sebagai pusat WP IV dan daya jangkau yang lebih baik dibandingkan dengan kota kecamatan lainnya yang ada di WP IV.

Secara lengkap tingkat pelayanan fasilitas kesehatan di Kota Kecamatan Jalancagak adalah sebagai berikut :

- a) Fasilitas Sub BWK (lingkungan): Posyandu
- b) Fasilitas kesehatan skala BWK (Desa): Praktek Dokter dan Poliklinik
- c) Fasilitas Kesehatan skala kota kecamatan: Puskesmas Pembantu, BKIA dan Apotik
- d) Fasilitas kesehatan skala kecamatan: Puskesmas
- e) Fasilitas Kesehatan Skala WP IV: Rumah Sakit

4.4.2 Arahan Kebijakan Pengembangan

Berdasarkan prospek pengembangan fasilitas pelayanan sarana dasar Kota Kecamatan Jalancagak, maka arah kebijakan pengembangan wilayah, sebagai berikut:

1. Dalam konstelasi regional, yaitu dalam cakupan Wilayah Pembangunan IV yang terdiri dari 4 kecamatan, memerlukan 1 unit rumah sakit untuk fasilitas kesehatan yang lokasinya berdasarkan RTRW Kabupaten Subang direncanakan berada di Kota Jalancagak. Sedangkan fasilitas sarana pendidikan regional, masih menurut RTRW, tidak diarahkan dibangun di Kota Jalancagak.

2. Untuk fasilitas puskesmas sudah tersedia berdasarkan standar. Dalam konstelasi skala kecamatan (120.000 jiwa), 1 unit puskesmas diperlukan untuk Kecamatan Jalancagak dan sudah terpenuhi dengan lokasi di pusat Kota Jalancagak, yaitu di Desa Jalancagak.
3. Fasilitas sarana kesehatan (puskesmas pembantu) sudah tersedia berdasarkan standar ambang batas penduduk (30.000 jiwa) dalam hal ini Kota Kecamatan Jalancagak yang terdiri dari 5 desa, sudah dapat terlayani dengan 1 unit puskesmas pembantu yang berlokasi di desa Bunihayu. Sarana BKIA dan apotik, dengan jumlah penduduk 26.269 jiwa diperlukan masing-masing sarana memerlukan 3 unit. Saat ini di Kota Kecamatan Jalancagak masing-masing memiliki 1 unit yang berada di pusat pelayanan (desa Jalancagak). Pengembangan untuk sarana BKIA dan apotek sebaiknya diarahkan pada desa yang lebih padat dibandingkan desa lainnya, yaitu Desa Curugrendeng dan Desa Tambakan.
4. Fasilitas pelayanan sarana pendidikan untuk SLTP dan SLTA berdasarkan standar diperlukan 1 unit di Kota Kecamatan Jalancagak. Berdasarkan eksisting di wilayah terdapat 2 unit SLTP. Berdasarkan hasil analisis tingkat pelayanan jumlah siswa SLTP dan SLTA masih di bawah kapasitas yang tersedia sehingga tingkat pelayanan melebihi batas standar yang dibutuhkan. Kebijakan pengembangan sarana pendidikan sebaiknya tidak diarahkan pada pembangunan fasilitas baru, tapi lebih mengoptimalkan fasilitas yang ada.

5. Untuk skala desa, dapat dilihat pada masing-masing desa, yaitu ;

I. Desa Jalancagak

Fasilitas pelayanan sarana pendidikan dasar, tidak ada pada rencana kebutuhan berdasarkan kebijakan RDTR, saat ini tingkat pelayanan SD sudah melampaui jumlah standar yang disyaratkan. Hal ini terbukti sebanyak 6 unit sarana pendidikan dasar berada di desa Jalancagak berdasarkan hasil analisis tingkat pelayanan 1 unit sudah dapat menampung kebutuhan pelayanan pendidikan dasar. Akibatnya jumlah murid di setiap sarana pendidikan dasar kurang dari standar yang disyaratkan.

TABEL IV.8
JUMLAH FASILITAS SOSIAL STANDAR, EKSISTING DAN
KEBIJAKAN RDTR (DESA JALANCAGAK)

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas			Keterangan
		Standar	Eksisting	Kebijakan RDTR	
I Fasilitas Pendidikan					
1	SD	1	6	9	Melebihi standar. Tapi belum memenuhi kebijakan RDTR
II Fasilitas Kesehatan					
1	Posyandu	7	5	-	Belum memenuhi Standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
2	Balai Pengobatan	2	1	-	Belum memenuhi Standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
3	Praktek Dokter	5	5	12	Sudah memenuhi standar. Tapi belum memenuhi kebijakan RDTR

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Sedangkan fasilitas sarana kesehatan posyandu dan balai pengobatan masih memiliki tingkat pelayanan yang rendah, berdasarkan hasil analisis tingkat pelayanan. Hal ini dapat dioptimalkan dengan cara memanfaatkan fasilitas sarana pendidikan dengan cara menggabungkan jumlah murid berdasarkan standar, sehingga sarana pendidikan yang tidak

terpakai digunakan untuk menampung pelayanan kesehatan yang masih memiliki tingkat pelayanan yang rendah.

II. Desa Bunihayu

Rencana kebutuhan sarana pendidikan dasar berdasarkan RDTR (12 unit). Berdasarkan standar, desa Bunihayu belum layak dibangun SD. Hal ini terbukti sebanyak 4 unit sarana pendidikan dasar di desa Bunihayu, jumlah murid tiap SD masih kurang dari standar yang disyaratkan. Rencana pengembangan sarana pendidikan dasar di Desa Bunihayu sebaiknya di tunda sebelum sarana yang ada saat ini dioptimalkan. Fasilitas sarana kesehatan balai pengobatan dan praktek dokter pada rencana kebijakan memerlukan 8 unit. Hasil analisis 1 unit praktek dokter sudah dapat menampung kebutuhan ambang minimum penduduk. Sedangkan jumlah posyandu sudah memenuhi standar.

TABEL IV.9
JUMLAH FASILITAS SOSIAL STANDAR, EKSISTING DAN
KEBIJAKAN RDTR(DESA BUNIHAYU)

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas			Keterangan
		Standar	Eksisting	Kebijakan RDTR	
I Fasilitas Pendidikan					
1	SD	-	4	12	Melebihi standar tapi belum memenuhi kebijakan RDTR
II Fasilitas Kesehatan					
1	Posyandu	5	6	-	Sudah melebihi standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
2	Balai Pengobatan	2	1	-	Belum memenuhi Standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
3	Praktek Dokter	1	-	8	Belum memenuhi standar dan kebijakan RDTR

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Agar di desa Bunihayu dalam pengembangan sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan optimal maka dilakukan penambahan 1 unit praktek dokter yang berlokasi pada sarana pelayanan pendidikan yang tidak berfungsi.

III. Desa Sarireja

Sarana pendidikan dasar (SD) sudah melampaui rencana kebutuhan berdasarkan RDTR dan standar yang disyaratkan. Saat ini terdapat 4 unit SD, berdasarkan hasil penelitian jumlah murid masih kurang dari jumlah kapasitas. Pengembangan sarana pendidikan dasar di Desa Bunihayu sebaiknya ditunda sebelum sarana yang ada saat ini dioptimalkan.

TABEL IV.10
JUMLAH FASILITAS SOSIAL STANDAR, EKSISTING DAN
KEBIJAKAN RDTR (DESA SARIREJA)

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas			Keterangan
		Standar	Eksisting	Kebijakan RDTR	
I Fasilitas Pendidikan					
1	SD	-	4	2	Melebihi standar dan kebijakan RDTR
II Fasilitas Kesehatan					
1	Posyandu	3	4	-	Belum memenuhi Standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
2	Balai Pengobatan	1	-	-	Belum memenuhi Standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
3	Praktek Dokter	1	-	8	Belum memenuhi standar dan di dukung oleh kebijakan RDTR

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Fasilitas balai pengobatan dan praktek dokter masih perlu penambahan karena belum memenuhi kriteria standar yang diterapkan. Optimasi pada tingkat pelayanan sarana dasar di desa Sarireja dapat

dilakukan dengan cara menyediakan sarana balai pengobatan dan praktek dokter (1 unit) pada fasilitas sarana pendidikan yang tidak digunakan dengan cara menggabungkan jumlah murid berdasarkan standar kapasitas terlebih dahulu, sehingga sarana pendidikan yang tidak berfungsi dengan optimal dapat di manfaatkan untuk pelayanan kesehatan.

IV. Desa Tambakan

Sarana pelayanan pendidikan dasar, walaupun belum memenuhi rencana kebutuhan berdasarkan RDTR, tapi sudah melampau jumlah standar. Hal ini terbukti sebanyak 2 unit yang ada di desa Tambakan, sedangkan menurut persyaratan dibutuhkan sebanyak 1 unit. Jumlah murid yang berada di sarana pada saat ini masih kurang dari standar yang disyaratkan.

TABEL IV.11
JUMLAH FASILITAS SOSIAL STANDAR, EKSISTING DAN
KEBIJAKAN RDTR (DESA TAMBAKAN)

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas			Keterangan
		Standar	Eksisting	Kebijakan RDTR	
I	Fasilitas Pendidikan				
1	SD	1	2	4	Melebihi standar tapi belum memenuhi kebijakan RDTR
II	Fasilitas Kesehatan				
1	Posyandu	5	4	-	Belum memenuhi Standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
2	Balai Pengobatan	2	-	-	Belum memenuhi Standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
3	Praktek Dokter	1	1	8	Sudah memenuhi standar dan di dukung oleh kebijakan

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Pengembangan sarana pendidikan dasar di desa Bunihayu sebaiknya tidak dilakukan sebelum fasilitas pelayanan sarana pendidikan yang ada pada saat ini dioptimalkan terlebih dahulu. Untuk balai pengobatan dan Posyandu masih perlu penambahan fasilitas baru karena belum memenuhi kriteria standar yang diterapkan. Pengembangan sarana pelayanan dapat dioptimalkan dengan cara menambahkan 1 unit balai pengobatan dan 1 unit posyandu dengan memanfaatkan sarana pendidikan yang telah diahli fungsikan.

V. Desa Curugrendeng

Kebijakan RDTR dalam pengembangan sarana sosial (12 unit SD dan 12 unit dokter) untuk desa Tambakan sangat jauh dari hasil penelitian tingkat pelayanan melalui analisis kapasitas pelayanan sarana dasar. Berdasarkan fasilitas sarana saat ini tingkat pelayanan sudah melampaui batas standar yang disyaratkan. Hal ini terbukti dengan jumlah 4 (empat) buah, jumlah murid tiap SD masih kurang dari standar yang disyaratkan. Maka pengembangan sarana dasar di desa Curugrendeng sebaiknya tidak dilakukan sebelum sarana yang ada dapat di manfaatkan lebih baik,

Pengembangan sarana kesehatan posyandu (1 unit), balai pengobatan (1 unit) dan praktek dokter (1 unit) masih dapat dikembangkan karena tingkat pelayanan kesehatan di desa Tambakan relatif masih rendah. Pengembangan ini juga dapat mengoptimalkan fasilitas pendidikan untuk dapat dimanfaatkan sebagai sarana kesehatan dengan cara yang sama pada

tiap desa, untuk menggabungkan jumlah murid SD dalam standar pelayanan kapasitas pendidikan dasar.

TABEL IV.12
JUMLAH FASILITAS SOSIAL STANDAR, EKSISTING DAN
KEBIJAKAN RDTR (DESA CURUGRENDENG)

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas			Keterangan
		Standar	Eksisting	Kebijakan RDTR	
I	Fasilitas Pendidikan				
1	SD	1	4	12	Melebihi standar tapi belum memenuhi kebijakan RDTR
II	Fasilitas Kesehatan				
1	Posyandu	6	5	-	Belum memenuhi Standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
2	Balai Pengobatan	2	1	-	Belum memenuhi Standar. Tapi kebijakan RDTR tidak mengarahkan penambahan posyandu
3	Praktek Dokter	1	-	12	Belum memenuhi standar dan kebijakan RDTR sudah terarah penembangannya.

Sumber : Hasil Analisis, 2006

4.5 Analisis Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan

4.5.1 Pembobotan Sarana Dasar

A. Sarana Kesehatan

Optimasi sarana kesehatan di Kota Kecamatan Jalancagak dapat dikategorikan berdasarkan hasil analisis sebelumnya yaitu analisis tingkat pelayanan yang meliputi perilaku masyarakat, kapasitas pelayanan, kategori jumlah pelayanan jangkauan pelayanan dan analisis arahan kebijakan pengembangan wilayah Kota Kecamatan Jalancagak. Hasil pembobotan yang tersendah akan dijadikan prioritas untuk merencanakan optimasi sarana kesehatan sesuai dengan kebutuhan penduduk yang mendasar.

Pembobotan Sarana Kesehatan dapat dilihat pada tabel IV.13 di bawah ini:

TABEL IV.13
KATEGORI PEMBOBOTAN SARANA KESEHATAN
KOTA KECAMATAN JALANCAGAK

Variabel Sarana Kesehatan	Bobot	Desa				
		Bunihayu	Curugrendeng	Jalancagak	Sarireja	Tambakan
Perilaku masyarakat	20	1	2	1	2	1
		20	40	20	40	20
Tingkat pelayanan	25	1	1	2	1	1
		25	25	50	25	25
Kategori jumlah fasilitas	15	2	1	3	1	1
		30	15	45	15	15
Jangkauan pelayanan	30	2	2	3	1	3
		60	60	90	30	90
Arah kebijakan	10	2	2	2	2	2
		20	20	20	20	20
Jumlah (Nilai x Bobot)		155	160	225	130	170
Rata-rata (Nilai x Bobot)		31	32	45	26	34
Kategori rata-rata (nilai x bobot): 20 – 42 : kurang optimal 43 – 66 : Cukup optimal 67 – 90 : Optimal						

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Hasil dari pembobotan untuk jenis sarana kesehatan dapat ditemukan pada Kota Kecamatan Jalancagak terdapat desa-desa yang masih kurang optimal. Berdasarkan rata-rata nilai tidak optimal (20-42) berada pada desa: (1) Tambakan, (2) Curugrendeng; (3) Bunihayu dan (4) Sarireja dan cukup optimal (43-66) berada pada desa Jalancagak.

Indikator pembobotan kurang optimal dan cukup optimal untuk

sarana pelayanan kesehatan didasarkan oleh:

(1) **Optimal**: terdapat pelayanan sarana kesehatan sudah dapat melayani kebutuhan seluruh penduduk Kota Kecamatan Jalancagak, mudah terjangkau dari pemukiman ke pelayanan sarana kesehatan (1km), kelengkapan fasilitas berdasarkan tingkat pelayanan menurut fungsi wilayah, sudah berdasarkan standar persyaratan sarana kesehatan, kondisi sarana yang baik dan terawat dan dukungan dari arahan kebijakan

(2) **Cukup optimal**: terdapat pelayanan sarana dan dapat melayani kebutuhan penduduk pada wilayah Kota Kecamatan Jalancagak, kelengkapan fasilitas sudah dapat mewakili kebutuhan sarana kesehatan spesifik, jarak jangkauan yang relatif mudah didatangi dengan kendaraan umum, kondisi yang sarana yang baik dan mendapat dukungan dari arahan kebijakan

(3) **Kurang optimal**: terdapat pelayanan sarana kesehatan yang belum sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan, kondisi sarana tidak terawat, kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan masih belum memenuhi standar kebutuhan suatu wilayah, jangkauan terhadap pelayanan kesehatan spesifik berjarak lebih dari 1 km dan dibatasi dengan adanya jalur transportasi dengan intensitas tinggi dan adanya arahan kebijakan yang mendukung tetapi tidak pada sasaran yang dibutuhkan.

Desa **Sarireja** merupakan desa yang memiliki nilai bobot terendah pada wilayah studi hal ini berdasarkan tingkat pelayanan kesehatan

yang masih rendah, jumlah fasilitas yang masih sedikit. Jarak jangkauan pelayanan yang relatif jauh (5km) menuju ke pusat pelayanan dan dibatasi oleh perkebunan dan jalur lalu lintas berkecepatan tinggi. Sedangkan arahan kebijakan untuk pengembangan sarana kesehatan di desa Sarireja pada dasarnya sudah terarah tetapi tidak menuju sasaran. Berdasarkan hasil pembobotan (26) sarana kesehatan maka desa Sarireja di kategorikan **kurang optimal**.

Sarana kesehatan di desa **Bunihayu** berdasarkan perilaku masyarakat atau persepsi memilih ketidak puasan pada kondisi sarana kesehatan yang ada di dalam wilayahnya. Sedangkan tingkat pelayanannya dinilai kurang karena melebihi kebutuhan penduduk. Jumlah sarana kesehatan terbilang cukup banyak, sarana kesehatan yang tersebar di dalam desa Bunihayu yaitu posyandu sedangkan terdapat puskesmas pembantu yang dapat melayani seluruh jangkauan wilayah kota kecamatan Jalancagak. Sedangkan jarak jangkauan sarana kesehatan yang lebih spesifik yang berada di desa Jalancagak terbilang cukup jauh (3 km) harus melalui jalur lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Arahan kebijakan pengembangan sarana kesehatan untuk desa Bunihayu sudah mendukung tetapi masih belum pada sasaran kebutuhan yang dibutuhkan berdasarkan hasil standar. Berdasarkan hasil pembobotan (31) sarana kesehatan maka desa Bunihayu di kategorikan **kurang optimal**.

Sarana kesehatan di desa **Curugrendeng** berdasarkan persepsi masyarakat bahwa kondisi sarana tidak terawat dengan baik dan tingkat

pelayanan kesehatan masih rendah, hal ini berdasarkan jumlah sarana kesehatan yang terbilang masih sedikit. Jarak jangkauan pelayanan ke sarana kesehatan spesifik yang berada di desa Jalancagak dikategorikan cukup jauh (3 km) dan memiliki jarak tempuh yang jauh (6km) untuk ke puskesmas pembantu yang berada di desa Bunihayu untuk ke pusat pelayanan kesehatan. Arahan kebijakan pengembangan sarana kesehatan untuk desa Curugrendeng sudah mendukung tetapi belum mencapai sasaran berdasarkan kebutuhan hasil dari standar kapasitas. Berdasarkan hasil pembobotan (32) maka desa curugrendeng di kategorikan sarana kesehatan masih **kurang optimal**.

Sarana kesehatan di desa **Tambakan** berdasarkan persepsi masyarakat kondisi sarana kesehatan masih tidak memuaskan dan tingkat pelayanan juga relatif rendah, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah sarana kesehatan masih sedikit. Sarana kesehatan yang tersebar di wilayah desa hanya terdapat sarana posyandu, sedangkan jarak jangkau desa Tambakan ke sarana kesehatan spesifik yang berada di desa jalancagak dikategorikan dekat (2 km). Arahan kebijakan pengembangan sarana kesehatan desa Tambakan sudah mendukung tetapi masih belum pada sasaran atau target yang dibutuhkan berdasarkan hasil standar. Berdasarkan hasil pembobotan (34) sarana kesehatan maka desa Tambakan di kategorikan masih **kurang optimal**.

Sarana kesehatan di desa **Jalancagak** berdasarkan persepsi masyarakat bahwa kondisi sarana kesehatan tidak memuaskan. Tingkat

pelayanan sarana kesehatan dikategorikan sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah sarana kesehatan terbilang banyak berdasarkan kelengkapan sarana kesehatan yang terpusat pada desa Jalancagak. Sedangkan jarak jangkauan relatif dekat dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang umumnya memilih berjalan kaki ke sarana pelayanan kesehatan. Arahan kebijakan pengembangan sarana kesehatan desa Jalancagak sudah mendukung tetapi masih belum pada sasaran atau target yang dibutuhkan berdasarkan hasil standar. Berdasarkan hasil pembobotan (45) maka desa Jalancagak di kategorikan **cukup optimal**.

B. Sarana Pendidikan

Optimasi sarana pendidikan di Kota Kecamatan Jalancagak dapat dikategorikan berdasarkan hasil analisis sebelumnya yaitu analisis tingkat pelayanan yang meliputi perilaku masyarakat, kapasitas pelayanan, kategori jumlah pelayanan jangkauan pelayanan dan analisis arahan kebijakan pengembangan wilayah Kota Kecamatan Jalancagak. Dapat dilihat pada tabel IV.19 di bawah ini:

Hasil dari pembobotan untuk jenis sarana pendidikan dapat ditemukan pada Kota Kecamatan Jalancagak terdapat desa-desa yang masih tidak optimal. Berdasarkan rata-rata nilai kurang optimal (20-42) berada pada desa: (1) Tambakan, (2) Curugrendeng; (3) Bunihayu dan (4) Sarireja dan cukup optimal (43-66) berada pada desa Jalancagak.

Kategori pembobotan sarana pendidikan Kota Kecamatan Jalancagak dapat dilihat pada tabel IV.14. Berdasarkan hasil skoring

memiliki tingkatan atau kategori yang sama dengan pembobotan sarana kesehatan yang tidak memiliki nilai optimal. Pembobotan dengan angka tertinggi yang dimiliki hanya sebatas cukup optimal.

TABEL IV.14
KATEGORI PEMBOBOTAN SARANA PENDIDIKAN
KOTA KECAMATAN JALANCAGAK

Variabel Sarana Pendidikan	Bobot	Desa				
		Bunihayu	Curug-rendeng	Jalan cagak	Sarireja	Tambakan
Perilaku masyarakat	20	2	2	2	2	2
		40	40	40	40	40
Tingkat pelayanan	25	1	1	1	1	1
		25	25	25	25	25
Kategori jumlah fasilitas	15	1	1	3	1	1
		15	15	45	15	15
Jangkauan pelayanan	30	2	2	3	1	2
		60	60	90	30	60
Arah kebijakan	10	2	2	2	2	2
		20	20	20	20	20
Jumlah (Nilai x Bobot)		160	160	220	130	160
Rata-rata (Nilai x Bobot)		32	32	44	26	32
Kategori rata-rata (nilai x bobot): 20 – 42 : kurang optimal 43 – 66 : Cukup optimal 67 – 90 : Optimal						

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Indikator pembobotan kurang optimal dan cukup optimal untuk sarana pelayanan kesehatan didasarkan oleh:

(1) **Optimal**: terdapat pelayanan sarana pendidikan sudah dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduk wilayah Kota Kecamatan Jalancagak, berdasarkan kebutuhan jumlah usia anak sekolah, mudah terjangkau dari pemukiman ke pelayanan sarana pendidikan. Kelengkapan fasilitas berdasarkan tingkat pelayanan menurut fungsi wilayah (tersedia

SLTP dan SLTA), jumlah fasilitas sudah berdasarkan standar persyaratan sarana pendidikan, kondisi sarana pendidikan terawat. Pengembangan sarana pendidikan mendapat dukungan arahan kebijakan.

(2) **Cukup optimal:** terdapat pelayanan sarana pendidikan dan dapat melayani kebutuhan penduduk pada wilayah Kota Kecamatan Jalancagak, minimal jumlah usia anak sekolah sudah dapat terpenuhi sesuai dengan kapasitas, kelengkapan fasilitas sudah dapat mewakili kebutuhan sarana pendidikan jarak jangkauan yang relatif mudah didatangi dengan kendaraan umum, kondisi yang sarana cukup terawat dengan baik. Pengembangan sarana pendidikan mendapat dukungan dari arahan kebijakan

(3) **Kurang optimal:** terdapat pelayanan sarana pendidikan yang tidak sesuai dengan ambang batas usia sekolah yang membutuhkan, kondisi sarana tidak terawat, kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan masih belum memenuhi standar kebutuhan suatu wilayah, jangkauan terhadap pelayanan kesehatan spesifik berjarak lebih dari 1 km dan dibatasi dengan adanya jalur transportasi dengan intensitas tinggi. Pengembangan sarana pendidikan mendapat dukungan arahan kebijakan tetapi tidak pada sasaran yang dibutuhkan.

Desa **Sarireja** merupakan desa yang memiliki nilai bobot terendah pada wilayah studi hal ini berdasarkan tingkat pelayanan pendidikan yang masih rendah, hal ini berdasarkan jumlah kapasitas yang melebihi kebutuhan unit usia sekolah SD. Jumlah fasilitas yang masih tidak

memenuhi standar, dan jarak jangkauan pelayanan yang relatif jauh (5km) ke pusat pelayanan pendidikan tingkat menengah (SLTP dan SLTA) yang berada di desa Jalancagak dan (7km) ke sarana pendidikan tingkat menengah (SLTP) yang berada di desa Tambakan. Sedangkan arahan kebijakan untuk pengembangan sarana pendidikan di desa Sarireja pada dasarnya sudah terarah tetapi tidak menuju sasaran. Berdasarkan hasil pembobotan (26) sarana kesehatan maka desa Sarireja di kategorikan **kurang optimal**.

Sarana pendidikan di desa **Bunihayu** berdasarkan perilaku masyarakat atau persepsi memilih ketidak puasan pada kondisi sarana pendidikan yang ada di dalam wilayahnya. Sedangkan tingkat pelayanannya dinilai kurang karena melebihi kebutuhan penduduk. Jumlah sarana pendidikan terbilang cukup banyak, sarana pendidikan yang tersebar di dalam desa Bunihayu yaitu SD. Sedangkan jarak jangkauan sarana pendidikan yang lebih tinggi (SLTP dan SLTA) berada di desa Jalancagak terbilang cukup dekat (3 km) dan SLTP di desa Tambakan (2km). Arahan kebijakan pengembangan sarana pendidikan untuk desa Bunihayu sudah mendukung tetapi masih belum pada sasaran kebutuhan yang dibutuhkan berdasarkan hasil standar. Berdasarkan hasil pembobotan (32) sarana pendidikan maka desa Bunihayu di kategorikan **kurang optimal**.

Sarana pendidikan di desa **Curugrendeng** berdasarkan persepsi masyarakat bahwa kondisi sarana tidak terawat dengan baik dan tingkat pelayanan pendidikan masih rendah, hal ini berdasarkan jumlah sarana pendidikan yang terbilang banyak dan jumlah murid tidak sesuai dengan

standar. Jarak jangkauan pelayanan ke sarana pendidikan spesifik (SLTP dan SLTA) yang berada di desa Jalancagak dikategorikan cukup dekat (3 km), tetapi jarak tempuh ke SLTP yang berada di desa Tambakan dikategorikan jauh (6 km). Arahan kebijakan pengembangan sarana pendidikan untuk desa Curugrendeng sudah mendukung tetapi belum mencapai sasaran berdasarkan kebutuhan hasil dari standar kapasitas. Berdasarkan hasil pembobotan (32) maka desa Curugrendeng di kategorikan sarana pendidikan masih **kurang optimal**.

Sarana pendidikan di desa **Tambakan** berdasarkan persepsi masyarakat kondisi sarana pendidikan masih tidak memuaskan dan tingkat pelayanan juga relatif rendah, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan melewati batas standar usia anak sekolah. Sarana pendidikan yang tersebar di wilayah desa hanya terdapat pendidikan dasar (SD), sedangkan jarak jangkauan desa Tambakan ke sarana pendidikan spesifik (SLTP dan SLTA) yang berada di desa Jalancagak dikategorikan dekat (2 km). Arahan kebijakan pengembangan sarana pendidikan desa Tambakan sudah mendukung tetapi masih belum pada sasaran atau target yang dibutuhkan berdasarkan hasil standar. Berdasarkan hasil pembobotan (32) sarana pendidikan maka desa Tambakan di kategorikan masih **kurang optimal**.

Sarana pendidikan di desa **Jalancagak** berdasarkan persepsi masyarakat bahwa kondisi sarana pendidikan tidak memuaskan. Tingkat pelayanan sarana pendidikan dikategorikan sangat memenuhi, hal ini dapat

dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan berdasarkan kelengkapan sarana pendidikan (SLTP dan SLTA) yang terpusat pada desa Jalancagak. Sedangkan jarak jangkau relatif dekat dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang umumnya memilih berjalan kaki ke sarana pelayanan pendidikan. Arah kebijakan pengembangan sarana pendidikan desa Jalancagak sudah mendukung tetapi masih belum pada sasaran atau target yang dibutuhkan berdasarkan hasil standar. Berdasarkan hasil pembobotan (44) maka desa Jalancagak di kategorikan **cukup optimal**.

4.5.2 Perencanaan

Untuk optimasi maka ditinjau dari hasil kategori optimasi ditemukan penambahan sarana. melalui pendekatan untuk melakukan suatu penataan fisik lingkungan berdasarkan:

- I. Prinsip *neighborhood unit* yaitu: (1) *Prinsip Sharing System*, terjadinya tukar menukar pelayanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari pusat-pusat pelayanan yang ada dilingkungannya dan (2) *Prinsip Social Governance*, terjadinya pengaturan dan pengelolaan (Golany, 1984).
- II. Syarat *neighborhood unit* yaitu: (1) memiliki jarak layanan yang mudah dicapai dengan berjalan kaki, dimana daya jangkau jarak layan efektif setiap fasilitas pelayanan sosial sebagai pertimbangan utama adalah kebebasan dalam gangguan transportasi berkecepatan tinggi; (2) syarat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial, yaitu pelayanan sosial yang melayani kebutuhan harian (Clarence Perry, 1992). Sebagai

parameter pengikatnya adalah besaran dan fasilitas pelayanan sosial yang melayani kebutuhan harian dan parameter besaran neighborhood diturunkan dari ukuran efisiensi jarak tempuh berjalan kaki antara rumah dengan fasilitas pelayanan.

III. Kebijakan dalam pengembangan yang ada untuk saat ini berdasarkan RDTR Kota Kecamatan Jalancagak Tahun 2004.

Berdasarkan ambang penduduk untuk balai kesehatan dari hasil penelitian sebelumnya yaitu 1 unit (3.000 penduduk), desa yang belum memiliki fasilitas sarana kesehatan adalah desa Curugrendeng, Sarireja dan Tambakan. Maka sarana kesehatan yang masih dikategorikan tidak optimal dan memiliki prioritas berdasarkan hasil analisis tingkat pelayanan adalah sarana praktek dokter, dan balai pengobatan.

Arahan kebijakan dalam pengembangan sarana kesehatan di desa Curugrendeng, Sarireja dan Tambakan sudah terencana untuk pengembangan sarana praktek dokter meskipun jumlah unit melebihi tingkat pelayanan. Hal ini dapat dimengerti untuk melakukan persiapan jangka panjang bagi pengembangan fasilitas sarana kesehatan di Kota Kecamatan Jalancagak.

Berdasarkan jangkauan maksimal pelayanan yang mensyaratkan 1 km dari pemukiman ke tempat pelayanan, maka tidak memungkinkan untuk di bangun sarana balai kesehatan maupun sarana praktek dokter diakibatkan rata-rata jangkauan terdekat ditempuh selama 5 km antar desa yang masih belum memiliki sarana pelayanan ini. Hal ini tidak dapat memenuhi syarat

neighborhood unit yang menekankan bahwa ukuran efisiensi berdasarkan jarak tempuh untuk berjalan kaki dari rumah ke pusat pelayanan.

Kesulitan untuk merencanakan melalui persyaratan *neighborhood* yang mensyaratkan tidak di lewati oleh jaringan lalu lintas dengan intensitas tinggi yang melalui daerah perencanaan, sedangkan desa Curugrendeng dan Sarireja di batasi oleh jalan provinsi yang memiliki intensitas tinggi. Begitu juga adanya *boundaries* atau batasan fungsi wilayah homogen sebagai lahan perkebunan dan pertanian akan semakin sulit untuk diterapkan. Hal ini juga dipertimbangkan oleh Spreiregen (1965) yang menganggap adanya kekeliruan, karena lengkapnya pelayanan suatu lingkungan, terdapat suatu jaringan individu yang menyangkut tempat-tempat pribadi dan adanya jalan-jalan yang akan jauh melintasi batas fisik permukiman

Berdasarkan temuan di lapangan di wilayah Kota Kecamatan Jalancagak perlu dihindari tidak terjadinya pemaksaan suatu lahan perkebunan dan pertanian berubah tetapi kebutuhan atau *demand* pelayanan sarana dasar tetap terpenuhi maka perencanaan optimasi dilakukan dengan cara mengikuti kaidah perencanaan pembentukan *neighborhood* yaitu: (1) prinsip *social governance* dan (2) prinsip *sharing system*.

Optimasi pada sarana kesehatan yang meliputi balai kesehatan dan praktek dokter dapat ditempuh dengan cara *social governance* dan *sharing system* yaitu tukar menukar pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ada di lingkungannya dapat dilihat pada gambar 4.13.

GAMBAR 4.13
OPTIMASI PERSEBARAN TINGKAT PELAYANAN SARANA
KESEHATAN

Pada desa Curugrendeng kebutuhan balai kesehatan dan praktek dokter belum tersedia sedangkan sarana posyandu melebihi 1 unit kapasitas, akibat berlebihan sarana posyandu juga menjadi suatu yang tidak optimal. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan maka dapat ditempuh dengan memanfaatkan 1 unit posyandu untuk dijadikan 1 unit sarana pelayanan praktek dokter dan balai kesehatan untuk melengkapi sarana kesehatan yang sesuai dengan standar kebutuhan di desa Bunihayu.

Pada desa Sarireja kebutuhan pelayanan balai kesehatan dan praktek dokter juga belum terpenuhi, dengan cara *sharing system* maka pelayanan pos yandu yang melebihi 1 unit kapasitas dapat dipergunakan sebagai balai kesehatan dan praktek dokter.

Kondisi berbeda dengan desa Tambakan yang memiliki tingkat pelayanan kesehatan yang rendah pada fasilitas posyandu, praktek dokter dan balai pengobatan. Melalui pendekatan jangkauan terdekat berdasarkan syarat *neighborhood* pada desa Tambakan yang merupakan tetangga terdekat dari desa Bunihayu yang memakan waktu tempuh selama kurang lebih 1 jam. Sehingga pelayanan kesehatan yang berada di desa Bunihayu dengan tingkat lebih baik lkarena dilengkapi dengan puskesmas pembantu maka, penduduk desa Tambakan dapat mencari pelayanan kesehatan pada desa Bunihayu.

Optimasi juga dapat direncanakan untuk memberikan suatu alternatif terhadap potensi yang ada di wilayah Kota Kecamatan Jalancagak. Pada desa Buni hayu selain memliki potensi hasil pertanian dan perkebunan

juga memiliki potensi penduduk sebagai pengerajin. Hal ini dikarenakan terdapatnya industri kecil manufaktur perkakas yang terdapat pada desa Bunihayu.

Hubungan antara sarana pelayanan pendidikan dan potensi ini dapat saling menunjang bahkan dapat berkembang apabila dimanfaatkan dengan baik. Sarana pelayanan pendidikan yang berada di desa Bunihayu adalah tingkatan dasar (SD) berdasarkan hasil penelitian berdasarkan tingkatan pelayanan sarana SD kategori melebihi kapasitas dari jumlah usia sekolah. Untuk itu rencana optimasi yang dapat digunakan berdasarkan prinsip *neighborhood* yaitu *social governance* dan *sharing system* dapat dilihat pada gambar 4.14.

Misalnya industri pengerajin dapat memanfaatkan fasilitas sarana pendidikan yang ada untuk dijadikan tempat pelatihan atau kejuruan. Sarana pendidikan yang berada di desa Bunihayu pada saat ini adalah fasilitas sarana pendidikan dasar, yang dimanfaatkan pada pagi hari sampai dengan siang hari. Sehingga pelatihan atau kejuruan yang digunakan untuk kebutuhan industri pengerajin dapat digunakan setelah jam sekolah dasar di desa Bunihayu sudah selesai. Hal ini sangat bermanfaat untuk menunjang keterampilan dan pengembangan potensi penduduk yang berada di desa Bunihayu dan sesuai dengan program pendidikan yang saat ini akan diarahkan di wilayah Kota Kecamatan Jalancagak. Dalam konteks *neighborhood* Bunihayu merupakan lingkungan spesifikasi yang homogen, dengan pengikat kegiatan yang sejenis dan hubungan kekerabatan.

GAMBAR 4.14
OPTIMASI TINGKAT PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN

4.6 Hasil Temuan Penelitian

4.6.1 Temuan Perwilayahan di Kota Kecamatan Jalancagak

1. Kecamatan Jalancagak secara keruangan dalam batasan jarak fisik, ini merupakan *outer fringe* mencakup radius sekitar 25 kilometer dari Kota Subang dan merupakan wilayah homogen berdasarkan isinya yang meliputi wilayah perkebunan.
2. Fungsi wilayah Kecamatan Jalancagak sebagai pusat pelayanan sosial skala kota, kecamatan dan desa sekitarnya yang memiliki homogenitas perkebunan dan pertanian, sehingga dapat mempertahankan daerah konservasi bagi wilayah kecamatan maupun Kota Subang, mengingat bahwa Kecamatan Jalancagak sebagai pemasok produk pertanian dan perkebunan dan juga sumber daya air bagi masyarakat kabupaten Subang.
3. Kota Kecamatan Jalancagak memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan membutuhkan kelengkapan fasilitas sarana pelayanan dasar untuk dapat menunjang kebutuhan masyarakat kecamatan Jalancagak, utamanya sarana sosial (kesehatan dan pendidikan).
4. Berdasarkan metode *nearest neighbour statistic* diketahui bahwa pola desa di wilayah Kota Kecamatan Jagak memiliki pola berkelompok yang ditunjukkan dengan nilai $T < 1$ menggambarkan pola desa di dalam wilayah Kota Kecamatan Jalancagak merupakan tipe berkelompok menurut teori Hagget.

5. Hirarki desa bervariasi mengikuti jumlah penduduk dan sarana yang dapat terlayani. Hasil analisis dapat diketahui bahwa desa Jalancagak, memiliki tingkatan yang tertinggi sebagai desa swasembada, dan diikuti oleh desa Bunihayu, dan Tambakan sebagai desa swakarya adapun desa yang memiliki tingkatan swadaya adalah desa Curugrendeng dan Sarireja. Hal ini berkaitan dengan klasifikasi tingkat desa untuk mengenal tipe-tipe desa berdasarkan tipikal yang dimiliki dengan pertumbuhan dan perkembangannya.
6. Tipe pola permukiman desa-desa di kecamatan Jalancagak juga bervariasi seperti pola permukiman linier dapat dilihat di desa Tambakan, pola permukiman terpusat ditemukan di desa Sarireja dan permukiman tipe tersebar (*scattered*) juga ditemukan di Kecamatan Jalancagak yaitu desa Curugrendeng, desa Jalancagak dan desa Bunihayu.

4.6.2 Temuan Pola Pelayanan Sarana Dasar

1. Jaringan transportasi di jalur utama sudah memiliki permukaan yang baik (aspal) sehingga memudahkan penduduk untuk dapat berinteraksi dan memudahkan ke sarana pelayanan yang dibutuhkan.
2. Persebaran sarana kesehatan dan pendidikan yang memiliki tingkat pelayanan skala kecamatan berada dilokasi pusat pertumbuhan atau pusat pelayanan yang berada di desa Jalancagak.
3. Kemudahan dalam pencapaian ke sarana pelayanan sarana dasar di Kota Kecamatan Jalancagak ditemukan melalui pendekatan perilaku

masyarakat yang lebih memilih untuk berjalan kaki dan menggunakan angkutan umum. Perilaku ini menggambarkan bahwa jarak lokasi fasilitas pelayanan sarana dasar tidak sulit ditempuh dari pusat pemukiman. Jangkauan pelayanan di kota kecamatan Jalancagak pada dasarnya cukup jauh berdasarkan kriteria yang disyaratkan. Hasil analisis menggunakan metoda matrix jauh, rata-rata jangkauan pelayanan terjauh adalah 4 km (desa Sarireja – desa Jalancagak), mengingat bahwa Kota Kecamatan Jalancagak berada di wilayah homogen sehingga sebaran pelayanan dasar terorientasi di satu pusat pertumbuhan yaitu desa Jalancagak.

4.6.3 Temuan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar

1. Kecenderungan masyarakat terhadap ketidakpuasan fasilitas sarana pelayanan dasar akibat kondisi sarana pelayanan yang kurang terawat. Sedangkan perilaku masyarakat lebih memilih berjalan kaki dan menggunakan angkutan umum ke fasilitas pelayanan yang dibutuhkan.
2. Kapasitas pelayanan saat ini cenderung memiliki tingkat pelayanan yang tidak optimal dikarenakan pelayanan kesehatan yang memiliki skala pelayanan kecamatan berdasarkan jumlah (ambang batas minimum penduduk) masih belum dapat melayani jumlah penduduk yang akan dilayani. Belumnya optimal pada tingkat pelayanan juga terdapat pada sarana pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) yang memiliki tingkat pelayanan yang melampaui batas yang akan dilayani.

4.6.4 Temuan Optimasi Pelayanan Sarana Dasar

Berdasarkan kategori optimasi yang dibuat dari hasil penelitian analisis pola pelayanan, analisis tingkat pelayanan dan analisis arahan kebijakan maka ditemukan optimasi yang di prioritaskan berdasarkan hasil analisis tersebut. Melalui pendekatan *neighborhood unit* maka yang diambil hanya secara prinsip yaitu dengan cara *social governance* dan *sharing system*.

Prinsip-prinsip yang digunakan tadi memberikan alternatif terbaik untuk jangka pendek optimasi saat ini. Hal ini diakibatkan sulitnya merencanakan suatu kawasan *boundaries* yang terdapat lintasan lalu lintas berkecepatan tinggi dan sebagai wilayah homogen perkebunan dan pertanian.

Optimasi pada penelitian ini lebih di prioritaskan pada fasilitas sarana yang memiliki tingkat pelayanan paling rendah. Tingkat pelayanan yang rendah pada sarana kesehatan dan pendidikan terjadi di desa Tambakan, Curugrendeng dan Sarireja. Arahan kebijakan pengembangan sarana kesehatan sudah mendukung tetapi masih belum pada sasaran yang dibutuhkan. Sebagai contoh pada arahan kebijakan mendukung dengan adanya pengembangan sarana posyandu pada desa Curugrendeng.

Berdasarkan hasil penelitian sarana posyandu sudah melebihi batas penduduk. Sedangkan sarana praktek dokter dan balai kesehatan belum terpenuhi, dan kebutuhan penduduk akan sarana praktek dokter dan balai kesehatan terus meningkat. Hasil temuan di lapangan terdapat 6 unit praktek

dokter yang berada di desa Jalancagak, menurut hasil analisis tingkat pelayanan, kapasitas yang dibutuhkan cukup 1 unit, sedangkan untuk menuju ke pelayanan sarana dasar dari desa Curugrendeng sejarak 3 km, dan dari desa Sarireja ke pusat pelayanan kesehatan sejarak 5 km.

Dengan cara *sharing system* untuk sarana desa Sarireja pelayanan pos yandu yang melebihi 1 unit kapasitas dapat dipergunakan sebagai balai kesehatan dan praktek dokter dan *social governance* dan *sharing system* yaitu tukar menukar pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ada di lingkungannya. Pada desa Curugrendeng kebutuhan balai kesehatan dan praktek dokter belum tersedia sedangkan sarana posyandu melebihi 1 unit kapasitas, kelebihan sarana posyandu juga menjadi suatu yang tidak optimal. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan maka dapat ditempuh dengan memanfaatkan 1 unit posyandu untuk dijadikan 1 unit sarana.

Optimasi juga dapat dilakukan berdasarkan potensi yang ada di wilayah studi seperti di lakukan untuk desa Bunihayu yaitu memanfaatkan sarana pendidikan sebagai penunjang kebutuhan industri kecil untuk mengembangkan pendidikan ketrampilan atau kejuruan dengan pendekatan prinsip *sharing system*, prinsip *social governance* dan *syarat neighborhood unit*.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar di Kota Kecamatan Jalancagak sebagai berikut:

1. Kota Kecamatan Jalancagak merupakan kawasan perdesaan yang terletak 16 km di selatan Kota Subang Kecamatan Jalancagak memiliki kondisi fisik yang berbukit (38%), landai (32%) dan curam (30%) diakibatkan keberadaannya terletak di daerah pegunungan dan memiliki fungsi wilayah sebagai pusat pelayanan sosial skala kota, kecamatan, desa dan merupakan wilayah homogenitas dengan ciri-ciri yang didominasi peruntukan lahan sebagai perkebunan dan pertanian (67,93%) dan didominasi mata pencaharian penduduk sebagai petani (73,72%). Sehingga perletakan fasilitas pelayanan sosial untuk skala kecamatan dikelompokkan pada satu kawasan yang strategis dimana para penduduk dapat dengan mudah menjangkau layanan yang dibutuhkan.
2. Karakteristik penduduk di Kota Kecamatan Jalancagak masih sangat kental sebagai ciri-ciri masyarakat pedesaan pada umumnya (hidup bergotong-royong, bersosialisasi, dan hidup sederhana) dan bermata pencaharian didominasi sebagai petani. Kecenderungan masyarakat menuju sarana pelayanan dasar lebih banyak menggunakan kendaraan umum ke puskesmas dan ke sarana pendidikan tingkat menengah (SLTP dan SLTA) diakibatkan kemudahan aksesibilitas dan waktu tempuh 15- 30 menit dan masyarakat yang berjalan kaki lebih banyak untuk ke sarana SD diakibatkan persebaran sarana

ini berada di setiap desa. Tingkat ketidakpuasan penduduk untuk setiap jenis sarana pelayanan dasar dikarenakan kondisi sarana yang tidak terawat.

3. Pola pemukiman di wilayah studi sangat bervariasi yaitu terpusat, terpecah dan linier. Hal ini terjadi dikarenakan faktor orientasi pusat pemukiman dan kondisi fisik wilayah. Persebaran sarana pelayanan dasar untuk tingkat kecamatan adalah fasilitas sarana yang spesifik, meliputi fasilitas kesehatan (puskesmas, BKIA, dokter praktek dan apotek), dan fasilitas pendidikan tingkat menengah (SLTP dan SLTA) berada di satu orientasi yaitu di desa Jalancagak yang diakibatkan desa Jalancagak sebagai pusat pelayanan sosial dan memiliki kemudahan aksesibilitas langsung terhadap ruas-ruas jalan utama serta dilayani oleh sarana transportasi umum dan juga dibatasi oleh ambang batas minimum penduduk yang harus dilayani.
4. Analisis Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar:

- **Pola Wilayah**

Melalui metoda (*nearest neighbour statistic*) dengan nilai $T < 1$ bahwa pola desa di wilayah Kota Kecamatan Jagak memiliki pola berkelompok. Kota Kecamatan Jalancagak sebagai wilayah homogen, disebabkan kondisi wilayah yang didominasi perkebunan dan pertanian sehingga ditemukan tipe desa linier, terpusat dan menyebar sehingga desa-desa memiliki karakteristik yang mengikuti keadaan kondisi fisik wilayah dan orientasi wilayah.

- **Pola Pelayanan Sarana Dasar**

Berdasarkan wilayah homogen, persebaran fasilitas sarana pelayanan dasar di Kota Kecamatan Jalancagak menumpuk pada satu lokasi yang strategis

yang berada di desa Jalancagak, hal ini disebabkan kondisi geografi yang landai dan kepadatan penduduk di desa Jalancagak memiliki aksesibilitas tinggi dan kemudahan dalam memilih transportasi. Pola pelayanan sarana dasar di wilayah studi cenderung terpusat pada kawasan pusat pertumbuhan. Hal ini berkaitan dengan teori Doxiadis dalam De Chiara (1975) yang menyatakan pendistribusian sarana fasilitas di pengaruhi oleh kepuasan pelayanan berdasarkan jarak-waktu (*time-distance*) dan jarak-biaya (*cost-distance*).

▪ **Tingkat Pelayanan Sarana Dasar**

Kota Kecamatan Jalancagak yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan sosial dengan pelayanan skala kota, kecamatan dan desa sekitarnya masih terdapat tingkat pelayanan yang rendah pada sarana kesehatan (posyandu, balai pengobatan, BKIA, dan apotek), sedangkan untuk sarana pendidikan ditemukan tingkat pelayanan tinggi yang cenderung melebihi kapasitas layanan yang dibutuhkan, hal ini disebabkan jumlah usia sekolah belum memenuhi jumlah kapasitas sarana pendidikan yang ada pada wilayah Kota Kecamatan Jalancagak. Kemudahan dalam aksesibilitas ke sarana pelayanan dapat terlihat dari penduduk yang banyak memilih ke tempat pelayanan dengan berjalan kaki dan angkutan umum. Sehingga hal ini bertentangan dengan teori tingkat pelayanan, yang seharusnya tingkat pelayanan diukur berdasarkan kebutuhan (*demand*), penyediaan (*supply*) dan persyaratan (Dillinger.W, 1994). Hal ini juga didukung oleh teori dari Walter Christaller dalam Daldjoeni (1987) bahwa setiap kegiatan akan mempertimbangkan jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan untuk kelancaran.

5. Analisis Optimasi Pelayanan Sarana Dasar

Optimasi pada penelitian ini lebih di prioritaskan pada fasilitas sarana kesehatan yang memiliki tingkat pelayanan paling rendah. Tingkat pelayanan yang rendah berdasarkan hasil skoring pembobotan kurang optimal pelayanan sarana dasar yang terdapat pada desa Tambakan, Curugrendeng dan Sarireja. Optimasi untuk ke tiga desa ini di rencanakan melalui pendekatan prinsip *neighborhood unit* yaitu prinsip *social governance* dan prinsip *sharing system*. Sarana posyandu yang memiliki tingkat pelayanannya yang tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga dapat dilakukan peningkatan posyandu sebagai sarana balai pengobatan dan praktek dokter yang memang dibutuhkan dan sudah mendapatkan dukungan arahan kebijakan pengembangan kesehatan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kajian beberapa aspek dan kesimpulan mengenai optimasi pola dan tingkat pelayanan sarana dasar, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Agar tidak terjadi pemaksaan suatu lahan perkebunan dan pertanian berubah dan kebutuhan atau *demand* pelayanan sarana dasar tetap terpenuhi maka perencanaan optimasi dapat dilakukan dengan cara mengikuti kaidah perencanaan pembentukan *neighborhood* yaitu: (1) prinsip *social governance* dan (2) prinsip *sharing system*.
2. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan pada desa Curugrendeng maka dapat ditempuh dengan cara *sharing system* yaitu menukar 1 unit posyandu yang kurang optimal diakibatkan *demand* dari

posyandu melebihi tingkat pelayanan agar dimanfaatkan sarana pelayanan praktek dokter dan balai kesehatan.

3. Pada desa Sarireja kebutuhan pelayanan balai kesehatan dan praktek dokter belum terpenuhi, dapat dilakukan dengan cara *sharing system* maka pelayanan pos yandu yang melebihi 1 unit kapasitas dapat dipergunakan sebagai balai kesehatan dan praktek dokter.
4. Desa Tambakan merupakan tetangga terdekat dari desa Bunihayu memakan waktu tempuh selama kurang lebih 1 jam dengan berjalan kaki sehingga pelayanan kesehatan yang cenderung lebih lengkap memiliki puskesmas pembantu maka penduduk desa Tambakan dapat melakukan mencari pelayanan kesehatan pada desa Bunihayu
5. Dapat melakukan optimasi sarana pendidikan yang ada pada desa Bunihayu dengan memanfaatkan potensi industri manufaktur yang terdapat pada desa Bunihayu dengan cara sarana pendidikan yang di pergunakan pada waktu pagi hari sampai dengan siang hari, setelah itu dapat digunakan untuk pelatihan kejuruan atau pengerajin

Mengingat berbagai kelemahan dalam penelitian ini, direkomendasikan untuk melakukan spesifikasi dan penambahan pada variabel-variabel yang terlibat seperti *cost and distance* yang belum sempat diterapkan pada penelitian ini dalam menentukan optimasi tingkat pelayanan sarana kesehatan dan sarana pendidikan dan juga melakukan penelitian optimasi tingkat pelayanan sarana dasar terhadap seluruh jangkauan wilayah kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asy'ari, S. I. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional
- Beratha, I.N. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksar
- Beveridge, Gordon S.G. and R. S. Schecter. 1970, *Optimizaation: Theory and Practice*. McGraw Hill, Inc
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Bintarto R. dan H. Suratopo. 1987. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES
- Daldjoeni , N .1997. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: PT. Alumni
- _____, 2003. *Geografi Kota dan Desa Edisi Revisi*. Bandung: PT. Alumni
- Daniels, P. W., and A. M. Warnes, eds. 1983. *Movement in Cities: Spatial Perspectives on Urban Transport and Travel*. London: Methuen & Co
- De Chiara, Joseph, and Lee Koppelman. 1975. *Urban Planning and Design Criteria*. Van Nostrand Reinhold Company
- Devas, N dan Rakodi, C, 1993, *Managing Fast Growing Cities New Approaches to Urban Planning and Management in The Developing World*. New York: Longman Scientific & Technical
- Dillinger, W. 1994. *Decentralization and Its Implication for Urban Service Delivery, Urban Management Program*. Washington DC : The World Bank
- Golany, Gideo.1976. *Social Planning, New Town Planning, Principles and Practice*. New York: John Wiley and Sons Inc
- Golany, S. Gideon. *Ethics and Urban Design: Cultural, Form, and Environment*. John Willey and Sons Inc

- Hanafiah, T. 1985. *Aspek Lokasi dalam Analisis Ekonomi Wilayah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Jayadinata, T. J. 1985. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB
- _____, 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Keating, W. Dennis, dan Norman Krumholz. 2000. *Neighborhood Planning. Journal of Planning Education and Research*
- Koestoer, R. H. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-Kota : Teori dan Kasus*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Nugroho, I dan R .Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia
- Riyadi dan Bratakusumah D.S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rohe, William and Gates, Laurend. 1985. *Planning with Neighborhood*. The University of North Carolina Press
- Rondinelli, A.D. 1990. *Decentralizing Urban Development Programmes*, USAID
- Rushton, G. 1979. *Optimal Location of Facilities*. Wentworth: COMPRESS, Inc
- Singarimbun, M dan Sofian Effendi. 1995. *Metoda Penelitian Survei* Cetakan Kedua . Jakarta: LP3ES
- Sujarto, D. 1977. *Distribusi Fasilitas Sosial (Pokok-pokok Pertimbangan untuk Perencanaan)*. dalam *Perencanaan Fisik*. Bandung: Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan LPP Departemen Planologi ITB.
- _____. 1978. *Perencanaan Pusat Kesehatan dalam Hubungannya dengan Perkembangan Kota*. Bandung: Departemen Planologi FTSP-ITB
- _____. 1979. *Pedoman Pengarahan Perencanaan Pola Tata Ruang Fisik di Dalam Pembangunan Desa*. Bandung: LPP Departemen Planologi ITB

- _____. 1990. *Beberapa Aspek Manajemen Lahan Kota*. Bandung: Jurusan Teknik Planologi-Institut Teknologi Bandung
- _____. 2004. *Bunga Rampai : Penataan Ruang dan Pengembangan Kota Baru di Indonesia*. Bandung: Departemen Teknik Planologi-ITB
- Tarigan, R. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tjahjaty, Budhi. 1990. *Tata Guna Lahan dan Sistem Aktivitas Kota tentang Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Kota*.
- Tjahjaty, B. dan Kusbiantoro, BS. 1997. *Bunga Rampai; Perencanaan Pembangunan di Indonesia mengenang Prof.Dr. Sugijanto Soegijoko*. Jakarta: PT Gramedia
- Van Dusseldorp, D.B.W.M. 1971. *Planning of Services Centres in Rural Areas of Developing Countries*. International Institute for Land reclamation and Improvement. Wageningen. The Netherlands
- Usman, Husaini dan Akbar, P. Setiady. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wisadirana, D. 2005. *Sosiologi Pedesaan: Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

BUKU TERBITAN TERBATAS/ DATA/ LAPORAN

- Menteri Negara Lingkungan Hidup: *Kehidupan yang Makin Berkualitas*. Jakarta: Kerjasama dengan UNDP
- Pedoman Kerja Puskesmas*. 1992. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Kamus Tata Ruang*, 1997. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencana
- Model Pengembangan Perdesaan : Disusun dari Hasil Survei Lapangan dan Pembelajaran pada Desa Perdesaan di Pulau Jawa, Madura dan Kalimantan*. Jakarta: Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Direktorat Jenderal Pengembangan Perdesaan, Direktorat Perdesaan wilayah Tengah, 2000.

Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan: UDKP, Model Pembangunan Kecamatan Terpadu. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Deputi Bidang Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 1999.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang 1996/1997. *Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Jalancagak Kabupaten Daerah Tingkat II Subang*

Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia: Kumpulan Makalah Terpilih Seminar Plano 42. Bandung: Departemen Teknik Planologi-ITB bekerjasama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko, 2002.

Soedrajat, Imam. 2004. *Konsepsi Pemngembangan Wilayah: Seminar Sektor Permukiman dan Prasarana Wilayah Dalam Rangka Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota.* Jakarta: Direktorat Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

TESIS

Pigawati, Bitta. 2001. *Pola Keterkaitan Kawasan dan Penggunaan Lahan di Kota Semarang.* Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro

Rahayu, Paramita. 2001. *Studi Perbandingan Optimasi Distribusi Spasial Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Studi Kasus: Kotamadya Semarang, Suatu Usulan).* Program Teknik dan Manajemen Industri Program Pascasarjana. Institut Teknologi Bandung

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

LAMPIRAN A
Jumlah Responden Kota Kecamatan Jalancagak

3. Desa Jalancagak :

$$a = 560 \text{ Jiwa}$$

$$b = 7.249 \text{ Jiwa}$$

$$p = 560/7.249 = 0,08$$

$$q = 0,92$$

$$n = (0,08) \times (0,92) \times (1,98/0,05)^2$$

$$= \pm 165 \text{ jiwa} = \pm 33 \text{ KK}$$

Jadi sampel untuk Desa Jalancagak adalah 33 KK.

4. Desa Bunihayu :

$$a = 178 \text{ Jiwa}$$

$$b = 4.917 \text{ Jiwa}$$

$$p = 178/4.917 = 0,04$$

$$q = 0,96$$

$$n = (0,04) \times (0,96) \times (1,98/0,05)^2$$

$$= \pm 81 \text{ jiwa} = \pm 16 \text{ KK}$$

Jadi sampel untuk Desa Bunihayu adalah 16 KK.

5. Desa Curugrendeng

$$a = 314 \text{ Jiwa}$$

$$b = 5.783 \text{ Jiwa}$$

$$p = 314 / 5.783 = 0,05$$

$$q = 0,95$$

$$n = (0,05) \times (0,95) \times (1,98/0,05)^2$$

$$= \pm 119 \text{ jiwa} = \pm 24 \text{ KK}$$

Jadi sampel untuk Desa Curugrendeng adalah 24 KK.

4. Desa Sarireja :

$$a = 81 \text{ Jiwa}$$

$$b = 2.830 \text{ Jiwa}$$

$$p = 81/2.830 = 0,03$$

$$q = 0,97$$

$$n = (0,03) \times (0,97) \times (1,98/0,05)^2$$

$$= \pm 65 \text{ jiwa} = \pm 13 \text{ KK}$$

Jadi sampel untuk Desa Sarireja adalah 13 KK.

5. Desa Tambakan :

$$a = 292 \text{ Jiwa}$$

$$b = 5.490 \text{ Jiwa}$$

$$p = 292/5.490 = 0,05$$

$$q = 0,95$$

$$n = (0,05) \times (0,95) \times (1,98/0,05)^2$$

$$= + 117 \text{ jiwa} = + 23 \text{ KK}$$

Jadi sampel untuk Desa Tambakan adalah 23 KK.

7. Apa alasan apabila tidak puas ?
 - a. Jarak
 - b. Kondisi sarana
 - c. Tidak ada angkutan umum

8. Berapa waktu yang anda tempuh untuk pergi ke lokasi sarana kesehatan yang paling sering anda kunjungi ?
 - a. 5 – 15 menit
 - b. 15 – 30 menit
 - c. 1 Jam
 - d. > 1 Jam

9. Dengan apa anda pergi ke tempat sarana kesehatan yang paling sering dikunjungi ?
 - a. Jalan kaki
 - b. Kendaraan pribadi
 - c. Angkutan umum
 - d. Kombinasi dari a,b, dan c

10. Berapa jarak dari rumah anda untuk pergi ke tempat dimana anda membeli obat?
 - a. Apotik = Km
 - b. Toko obat = Km
 - c. Warung = Km
 - d. Lainnya = Km

11. Sarana Pendidikan

1. Apakah bapak/ibu tahu di desa ada sarana pendidikan?
 - a. ya
 - b. tidak

2. Sarana pendidikan apa saja yang ada di desa bapak/ ibu?
 - a. TK
 - b. SD
 - c. SLTP
 - d. SLTA

3. Apakah penting pendidikan untuk keluarga bapak/ibu?
 - a. penting
 - b. tidak penting

4. Apa tanggapan/sikap bapak/ibu terhadap sarana pendidikan?
 - a. sangat puas
 - b. tidak puas

5. Apa alasan apabila tidak puas ?
 - a. Jarak
 - b. Kondisi sarana
 - c. Tidak ada angkutan umum

6. Bila anda mempunyai keluarga yang masih bersekolah, pada level pendidikan apa saja ?

- a. TK/TPA
b. SD/Madrasah
e. Lebih dari 1 level pendidikan
- c. SLTP/Tsanawiyah
d. SLTA/Sekolah kejuruan/Aliyah
7. Berapa jarak yang ditempuh oleh keluarga anda untuk pergi ke lokasi sarana pendidikan ?
- a. TK/TPA = Km
b. SD/Madrasah = Km
c. SLTP/Tsanawiyah = Km
d. SLTA/Sekolah Kejuruan/Aliyah = Km
8. Kira-kira berapa menit yang ditempuh untuk pergi ke lokasi sarana pendidikan TK atau yang selevel ?
- a. 5 – 15 menit
b. 15 – 30 menit
c. 1 Jam
d. > 1 Jam
9. Dengan apa keluarga anda pergi ke sekolah ?
- a. Jalan kaki
b. Kendaraan pribadi
c. Angkutan umum
d. Kombinasi dari a,b, dan c
10. Kira-kira berapa menit yang ditempuh untuk pergi ke lokasi sarana pendidikan SD atau yang selevel ?
- a. 5 – 15 menit
b. 15 – 30 menit
c. 1 Jam
d. > 1 Jam
11. Kira-kira berapa menit yang ditempuh untuk pergi ke lokasi sarana pendidikan SLTP atau yang selevel ?
- a. 5 – 15 menit
b. 15 – 30 menit
c. 1 Jam
d. > 1 Jam
12. Kira-kira berapa menit yang ditempuh untuk pergi ke lokasi sarana pendidikan SLTA atau yang selevel ?
- a. 5 – 15 menit
b. 15 – 30 menit
c. 1 Jam
d. > 1 Jam
13. Apakah tindakan bapak/ibu dengan sarana pendidikan yang ada, ingin memindahkan anggota keluarga ke tempat lain?
- a. ya
b. tidak

LAMPIRAN C PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Pengolahan data hasil kuisisioner menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan program SPSS.

Kependudukan Sosial

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi atau keadaan penduduk setempat baik secara sosial maupun ekonomi. Analisis dilakukan berdasarkan data identitas responden yang ada di dalam kuisisioner, seperti misalnya umur, pekerjaan, besar pendapatan, pengeluaran dan sebagainya.

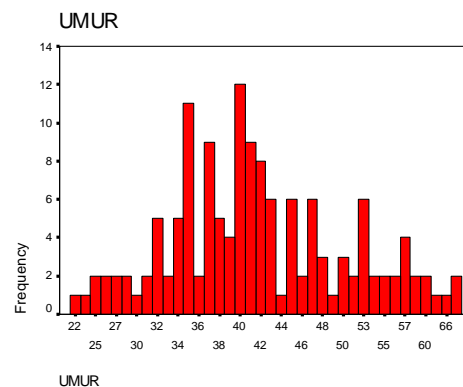
Umur Responden

UMUR		
N	Valid	139
	Missing	0
Mean		42.10
Median		41.00

Tabel Frekuensi Umur Responden di Kota Kecamatan Jalancagak Subang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22	1	.7	.7	.7
	24	1	.7	.7	1.4
	25	2	1.4	1.4	2.9
	26	2	1.4	1.4	4.3
	27	2	1.4	1.4	5.8
	29	2	1.4	1.4	7.2
	30	1	.7	.7	7.9
	31	2	1.4	1.4	9.4
	32	5	3.6	3.6	12.9
	33	2	1.4	1.4	14.4
	34	5	3.6	3.6	18.0
	35	11	7.9	7.9	25.9
	36	2	1.4	1.4	27.3
	37	9	6.5	6.5	33.8
38	5	3.6	3.6	37.4	

39	4	2.9	2.9	40.3
40	12	8.6	8.6	48.9
41	9	6.5	6.5	55.4
42	8	5.8	5.8	61.2
43	6	4.3	4.3	65.5
44	1	.7	.7	66.2
45	6	4.3	4.3	70.5
46	2	1.4	1.4	71.9
47	6	4.3	4.3	76.3
48	3	2.2	2.2	78.4
49	1	.7	.7	79.1
50	3	2.2	2.2	81.3
52	2	1.4	1.4	82.7
53	6	4.3	4.3	87.1
54	2	1.4	1.4	88.5
55	2	1.4	1.4	89.9
56	2	1.4	1.4	91.4
57	4	2.9	2.9	94.2
58	2	1.4	1.4	95.7
60	2	1.4	1.4	97.1
62	1	.7	.7	97.8
66	1	.7	.7	98.6
75	2	1.4	1.4	100.0
Total	139	100.0	100.0	



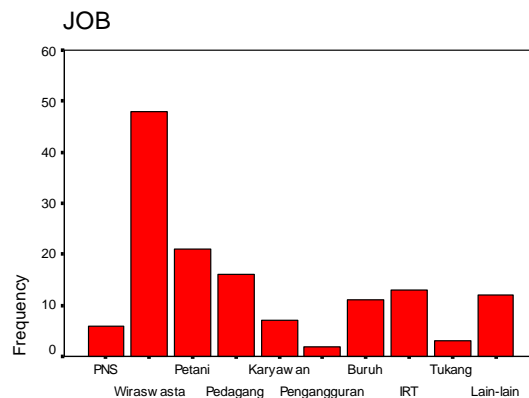
Gambar Bar Chart Umur Responden

Berdasarkan Tabel dan Bar Chart diatas maka dikatakan bahwa rata-rata umur responden di kecamatan JalanCagak Subang adalah 42 tahun dan sebanyak 8,6% berumur 40 tahun.

Deskriptif Pekerjaan Responden

Tabel Pekerjaan Responden di kecamatan Jalancagak Subang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	6	4.3	4.3	4.3
	Wiraswasta	48	34.5	34.5	38.8
	Petani	21	15.1	15.1	54.0
	Pedagang	16	11.5	11.5	65.5
	Karyawan	7	5.0	5.0	70.5
	Pengangguran	2	1.4	1.4	71.9
	Buruh	11	7.9	7.9	79.9
	IRT	13	9.4	9.4	89.2
	Tukang	3	2.2	2.2	91.4
	Lain-lain	12	8.6	8.6	100.0
	Total	139	100.0	100.0	



JOB

Gambar Bar Chart Umur Responden

Berdasarkan Tabel dan Bar Chart diatas , terlihat mayoritas responden memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta dan juga petani.

Pola Sarana Kesehatan

Pola Perjalanan

Penduduk mengkonsumsi fasilitas sosial melakukan pergerakan ke tempat di mana fasilitas tersebut berada. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas juga dipengaruhi oleh pola perjalanan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti misalnya karakteristik personal (pendapatan, kepemilikan kendaraan dan sebagainya). Untuk itu dalam penelitian ini akan dilihat beberapa hal yaitu identifikasi mengenai responden berdasarkan atas pendapatan dan jenis

transportasi yang digunakan untuk mencapai sarana kesehatan, besar pendapatan dan jenis sarana yang digunakan, serta pekerjaan dengan jenis sarana yang digunakan.

Tabel Tabulasi Silang antara Pendapatan dengan Jenis Transportasi untuk Mencapai Sarana Kesehatan

		Jenis Transportasi				Total
		Jalan kaki	Kendaraan pribadi	Angk.u umum	Kombinasi	
PENDAPATAN	<500.000	26	5	36	4	71
	500.000-1000.000	30	5	9	4	48
	1000.000	7	5	8	0	20
Total		63	15	53	8	139

Berdasarkan Tabel Tabulasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki pendapatan kurang dari 500.000 memilih menggunakan angkutan umum, sedangkan responden yang penghasilannya antara 500.000 sampai 1.000.000 justru berjalan kaki untuk mencapai sarana kesehatan.

Tabel Tabulasi Silang antara Pendapatan dengan Jenis Sarana Kesehatan yang Digunakan

		Sarana Kesehatan				Total
		Puskesmas	Balai Kesehatan	Polindes	Posyandu	
PENDAPATAN	<500.000	49	3	1	18	71
	500.000-1000.000	16	1	5	26	48
	1000.000	11	0	4	5	20
Total		76	4	10	49	139

Responden yang memiliki pendapatan kurang dari 500.000 cenderung pergi ke Puskesmas untuk berobat.

Tabel Tabulasi Silang antara Pekerjaan dengan Jenis Sarana Kesehatan yang Digunakan

		Sarana Kesehatan				Total
		Puskesmas	Balai Kesehatan	Polindes	Posyandu	
JOB	PNS	5	0	0	1	6
	Wiraswasta	25	3	6	14	48
	Petani	9	1	0	11	21
	Pedagang	8	0	0	8	16
	Karyawan	4	0	0	3	7
	Pengangguran	1	0	0	1	2
	Buruh	7	0	1	3	11
	IRT	7	0	3	3	13
	Tukang	0	0	0	3	3

	Lain-lain	10	0	0	2	12
Total		76	4	10	49	139

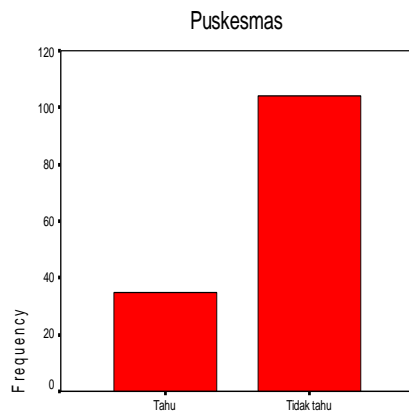
Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa apapun pekerjaan responden, mereka cenderung pergi ke Puskesmas untuk berobat.

Informasi yang Diterima

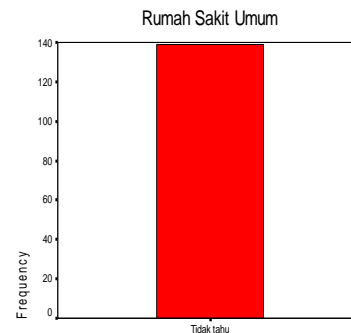
Berikut ini merupakan hasil observasi seberapa jauh informasi penduduk tentang keberadaan sarana kesehatan di kecamatan Jalancagak Subang. Analisa dilakukan berdasarkan jumlah atau frekuensi penduduk yang memberikan respon pada pertanyaan 1,2, 4, dan 5

Tabel Frekuensi Informasi Responden terhadap Setiap Sarana Kesehatan

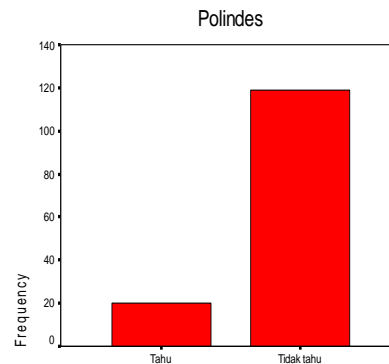
Sarana Kesehatan	Sarana yang diketahui	%
Puskesmas	35	25.2
Balaikesehatan	3	2.2
Polindes	20	14.4
Posyandu	97	69.8
Rumah sakit umum	0	0



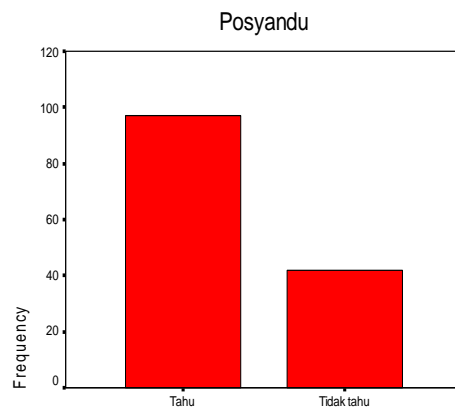
Gambar Bar Chart Frekuensi Informasi Responden terhadap Puskesmas



Gambar Bar Chart Frekuensi Informasi Responden terhadap RSU



Gambar Bar Chart Frekuensi
Informasi Responden terhadap
Polindes



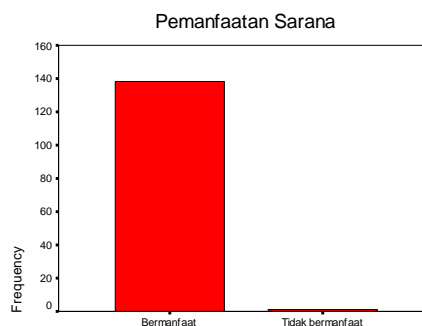
Gambar Bar Chart Frekuensi Informasi
Responden terhadap Posyandu

Tabel Informasi Responden Tentang kebutuhan Pelayanan pada Sarana Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	138	99.3	99.3	99.3
	Tidak	1	.7	.7	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Tabel Informasi Manfaat Sarana Kesehatan Bagi Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bermanfaat	138	99.3	99.3	99.3
	Tidak bermanfaat	1	.7	.7	100.0
	Total	139	100.0	100.0	



Gambar Bar Chart Informasi Manfaat Sarana Kesehatan Bagi Keluarga

Berdasarkan tabel dan bar chart di atas, dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang paling banyak diketahui oleh penduduk adalah Posyandu, sedangkan tidak ada responden yang mengetahui sarana rumah sakit umum. Responden cenderung mengetahui manfaat sarana kesehatan dan menyadari manfaat sarana tersebut bagi keluarganya (99,3%).

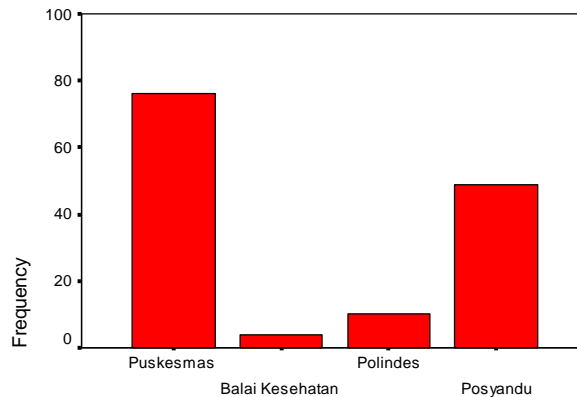
Preferensi

Analisis ini menunjukkan kecenderungan atau pilihan responden dalam menentukan atau memilih sarana kesehatan yang akan digunakan serta alat atau jenis transportasi yang digunakan untuk mencapai sarana kesehatan tersebut.

Tabel Frekuensi Sarana Kesehatan yang Paling Sering Dikunjungi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Puskesmas	76	54.7	54.7	54.7
	Balai Kesehatan	4	2.9	2.9	57.6
	Polindes	10	7.2	7.2	64.7

Posyandu	49	35.3	35.3	100.0
Total	139	100.0	100.0	



Gambar Bar Chart Informasi Manfaat Sarana Kesehatan Bagi Keluarga

Sarana kesehatan yang paling sering dikunjungi oleh responden adalah Puskesmas yaitu sebanyak 54,7%.

Tabel Jenis Transportasi yang Digunakan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jalan kaki	63	45.3	45.3	45.3
	Kendaraan pribadi	15	10.8	10.8	56.1
	Angk.umum	53	38.1	38.1	94.2
	Kombinasi	8	5.8	5.8	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Responden lebih banyak berjalan kaki untuk mencapai sarana kesehatan tersebut (45%) atau menggunakan angkutan umum (38.1%).

Pola Sarana Pendidikan

Berikut ini merupakan hasil observasi tentang keberadaan sarana pendidikan di kecamatan Jalancagak Subang. Analisa dilakukan berdasarkan jumlah atau frekuensi penduduk yang memberikan respon pada pertanyaan-pertanyaan kuisiner.

Pola Perjalanan

Tabel Kepentingan Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Penting	137	98.6	98.6	98.6
	Tidak penting	2	1.4	1.4	100.0

Total	139	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------



Gambar Bar Chart Informasi Manfaat Sarana Kesehatan Bagi Keluarga

Dari table terlihat bahwa 98,6% responden menyatakan bahwa pendidikan tersebut penting.

Tabel Level Pendidikan Keluarga Responden

Sarana Pendidikan	Jumlah
TK/TPA	24
SD/Madrasah	70
SLTP/Tsanawiyah	52
SLTA/Kejuruan/Aliyah	27
Lebih dari 1 level pendidikan	1

Tabel Tabulasi Silang antara Pendapatan dengan Tingkat Kepentingan Pendidikan

		Pendidikan		Total
		Penting	Tidak penting	
PENDAPATAN	<500.000	70	1	71
	500.000-1000.000	47	1	48
	1000.000	20	0	20
Total		137	2	139

Tabel Tabulasi Silang antara Pekerjaan dengan Tingkat Kepentingan Pendidikan

		Pendidikan		Total
		Penting	Tidak penting	
JOB	PNS	6	0	6
	Wiraswasta	48	0	48
	Petani	21	0	21
	Pedagang	15	1	16
	Karyawan	7	0	7
	Pengangguran	2	0	2
	Buruh	11	0	11
	IRT	13	0	13
	Tukang	3	0	3

	Lain-lain	11	1	12
Total		137	2	139

Responden yang memiliki pendapatan kurang dari 500.000, antara 500.000-1 juta, dan responden yang memiliki pendapatan diatas 1 juta menyatakan bahwa pendidikan itu penting. Begitu juga dengan semua responden yang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda memandang bahwa pendidikan itu penting.

Informasi yang Diterima

Tabel Frekuensi Informasi Responden terhadap Setiap Sarana Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tahu	135	97.1	97.1	97.1
	Tidak tahu	4	2.9	2.9	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Berdasarkan table frekuensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mengetahui keberadaan sarana pendidikan SD yang ada di lingkungan sekitarnya (97%).

Preferensi

Analisis ini menunjukkan kecenderungan atau pilihan responden dalam menentukan atau memilih sarana pendidikan yang akan digunakan serta alat atau jenis transportasi yang digunakan untuk mencapai sarana kesehatan tersebut.

Tabel Jenis Transportasi yang Digunakan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jalan kaki	80	57.6	57.6	57.6
	Kendaraan pribadi	8	5.8	5.8	63.3
	Angk.umum	39	28.1	28.1	91.4
	Kombinasi	12	8.6	8.6	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Berdasarkan jawaban responden , diperoleh hasil analisis bahwa responden mencapai sarana pendidikan dengan berjalan kaki atau menggunakan angkutan umum. Diperkirakan karena jarak sarana pendidikan tidak begitu jauh dari pemukiman penduduk.

Analisis Diskriminan

Analisis ini digunakan untuk melihat dari sudut pandang sebaran data yang melingkupi variabel berdasarkan tiga variabel utama yaitu sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana perdagangan.

Data yang digunakan adalah data berdasarkan responden yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner, Data tersebut kemudian dikelompokkan dalam dua kriteria umur berdasarkan data responden terbesar dan terkecil, yaitu grup 1 berumur 24-49 tahun dan grup 2 berumur 50-75.

Berikut hasil analisis terhadap ketiga variabel tersebut :

1. Uji validasi data yang dianalisis ditunjukkan dengan nilai Wilk's Lambda, dengan hasil sebagai berikut :

Wilks' Lambda

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1	,970	4,149	4	,386

Didapatkan Wilks' lambda sebesar 0,970 menunjukkan bahwa data yang dianalisis cukup valid dengan nilai sebesar 0,981 (mendekati 1)

2. Kelompok Sarana prioritas (koefisien paling dominant)

Structure Matrix

	Function
	1
SRN_LAIN	,749
SRN_PRDG	-,622
SRN_KES	,248
SRN_PEND	-,099

Dari hasil pengolahan maka sarana lain (sebesar 0.749) merupakan variabel yang memberikan nilai koefisien terbesar, atau dapat dikatakan sebagai variabel dominan untuk grup umur yang telah dikelompokkan.

3. Prioritas dan Grup Dominan

Dilakukan untuk menunjukkan prioritas dari hubungan antar variabel dalam mencari nilai dominan pada 2 grup yang berbeda, dihasilkan sebagai berikut :

Prior Probabilities for Groups

GROUP	Prior	Cases Used in Analysis	
		Unweighted	Weighted
24-49	,500	110	110,000
50-75	,500	29	29,000
Total	1,000	139	139,000

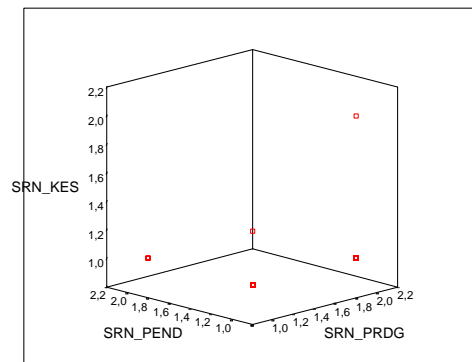
Masing-masing grup memiliki prioritas sama dalam pengelompokan yaitu sebesar 50%.

Functions at Group Centroids

GROUP	Function
	1
24-49	9,005E-02
50-75	-,342

Grup 1 (24-49) memiliki nilai fungsi yang lebih besar di banding dengan kelompok umur kedua hal ini disebabkan oleh varibilitas resepoden dan jumlah pada masing-masing responden.

Plot Grafik sebaran

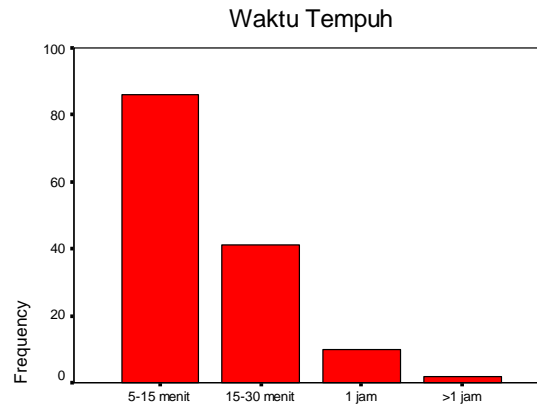


Sebaran diatas menunjukkan bahwa sarana kesehatan memiliki rata-rata nilai yang tinggi dibanding dengan sarana lainnya (pendidikan dan kesehatan).

Sarana Kesehatan Aspek Lokasi

Tabel Waktu Tempuh ke Sarana Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5-15 menit	86	61.9	61.9	61.9
	15-30 menit	41	29.5	29.5	91.4
	1 jam	10	7.2	7.2	98.6
	>1 jam	2	1.4	1.4	100.0
	Total	139	100.0	100.0	



Gambar Bar Chart Waktu Tempuh ke Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di kecamatan Jalancagak Subang rata-rata memakan waktu tempuh sekitar 5 sampai 15 menit, dan hanya sedikit responden yang harus menempuh waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai sarana kesehatan.

Jika dilihat dari waktu tempuhnya, maka lokasi sarana kesehatan dapat dikatakan optimal karena dengan waktu tempuh sekitar 5 sampai 15 menit dengan mengendarai kendaraan umum maka diasumsikan bahwa radius pencapaian tidak melebihi standar pada Bagian 2.3

Tabel Rata-rata Jarak Tempat Tinggal Responden ke Sarana Kesehatan

	N	Minimum	Maximum	Mean
PUSKESMAS	139	.00	15.00	1.5475
DOKTER	139	.00	5.00	1.3194
BIDAN	139	.00	10.00	.2546
LAINNYA	139	.00	5.00	.0763
Valid N (listwise)	139			

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jarak tempat tinggal responden dengan sarana kesehatan adalah sebagai berikut:

Puskesmas = 1,5 km

Dokter = 1,3 km

Bidan = 0,25 km

Lainnya = 0,07 km

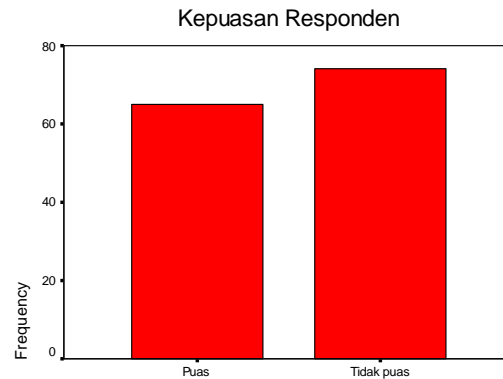
Aspek Karakteristik Permintaan dan Kebutuhan dari Masyarakat

Salah satu kriteria optimal sarana kesehatan pada aspek karakteristik permintaan dan kebutuhan dari masyarakat dapat dilihat kepuasan responden terhadap pelayanan sarana kesehatan yang ada. Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel Frekuensi Kepuasan Responden Terhadap Pelayanan Sarana Kesehatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Puas	65	46.8	46.8	46.8
	Tidak puas	74	53.2	53.2	100.0
	Total	139	100.0	100.0	



Gambar Bar Chart Kepuasan Responden

Sebanyak 74 % responde menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sarana kesehatan yang ada di kecamatan Jalancagak Subang.

Tabel Alasan Ketidakpuasan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jarak	62	44.6	44.6	44.6
	Kondisi	76	54.7	54.7	99.3
	Tidak ada angk.umum	1	.7	.7	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel di atas, sebanyak 76 % responden tidak puas dengan sarana kesehatan dikarenakan kondisi dari sarana tersebut, dan 62 % dikarenakan jarak sarannya yang jauh dari lokasi pemukiman penduduk.

Sarana Pendidikan

Tabel Rata-rata Jarak Tempat Tinggal Responden ke Sarana Pendidikan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TK	138	.00	2.00	.2307	.44054
SD	139	.00	2.50	.3690	.52247
SLTP	138	.00	13.00	.8220	1.53733
SLTA	139	.00	45.00	1.3712	4.24384
Valid N (listwise)	137				

Rata-rata jarak sarana pendidikan dari pemukiman responden adalah sebagai berikut:

- TK = 0,2 km
- SD = 0,4 km

- SLTP = 0,8 km
- SLTA = 1,3 km

Tabel Waktu Tempuh Responden ke Sarana Pendidikan TK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5-15 menit	96	69.1	69.1	69.1
	15-30 menit	32	23.0	23.0	92.1
	1 jam	8	5.8	5.8	97.8
	>1 jam	3	2.2	2.2	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Tabel Waktu Tempuh Responden ke Sarana Pendidikan SD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5-15 menit	112	80.6	80.6	80.6
	15-30 menit	21	15.1	15.1	95.7
	1 jam	3	2.2	2.2	97.8
	> 1 jam	3	2.2	2.2	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Tabel Waktu Tempuh Responden ke Sarana Pendidikan SLTP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5-15 menit	39	28.1	28.1	28.1
	15-30 menit	85	61.2	61.2	89.2
	1 jam	12	8.6	8.6	97.8
	> 1 jam	3	2.2	2.2	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Tabel Waktu Tempuh Responden ke Sarana Pendidikan SLTA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5-15 menit	40	28.8	28.8	28.8
	15-30 menit	65	46.8	46.8	75.5
	1 jam	23	16.5	16.5	92.1
	> 1 jam	11	7.9	7.9	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai setiap sarana pendidikan adalah sebagai berikut:

- TK = 5 sampai 15 menit
- SD = 5 sampai 15 menit
- SLTP = 15 sampai 30 menit

- SLTA = 15 sampai 30 menit

Aspek Karakteristik Permintaan dan Kebutuhan dari Masyarakat
Tabel Jenis Transportasi yang Digunakan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jalan kaki	80	57.6	57.6	57.6
	Kendaraan pribadi	8	5.8	5.8	63.3
	Angk.umum	39	28.1	28.1	91.4
	Kombinasi	12	8.6	8.6	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Berdasarkan jawaban responden , diperoleh hasil analisis bahwa responden mencapai sarana pendidikan SD dengan berjalan kaki atau menggunakan angkutan umum. Diperkirakan karena jarak sarana pendidikan tidak begitu jauh dari pemukiman penduduk.

LAMPIRAN C

Nearest Neighbour Statistic

Titik	Jarak (Km)
1-2	0,4
3-4	0,550
4-5	0,450
5-6	0,600
7-9	0,650
8-9	0,350
9-10	0,500
11-12	0,350
13-14	0,350
14-15	0,650
16-17	0,500
17-18	0,550
17-19	0,700
20-21	0,950
22-23	1,000
21-24	1,100
25-26	0,400
26-27	0,400

Perhitungan :

- Luas (L) = 24,76 Km²
- Σ Jarak (Σj) = 10,45 Km
- Σ Titik (ΣN) = 79 titik
- Jarak Rata-rata ($\hat{J}_{\bar{r}}$) = $\Sigma j / \Sigma N = 10,45 / 79 = 0,13$ Km
- Kepadatan Titik (p) = $\Sigma N / L = 79 / 24,76 = 3,19$ Titik / Km²
- Jarak Rata (Random) (\hat{J}_n) = $1/2 \sqrt{P} = 1/2 \sqrt{3,19} = 0,28$ Km
- Parameter Harga Terdekat T = $\hat{J}_{\bar{r}} / \hat{J}_n = 0,13 / 0,28 = 0,46$

Continuum berada pada / mendekati T = 0, menunjukkan bahwa pola penyebaran permukiman adalah mengelompok